

EDISI # 67 MEI 2026

# CELAH KORUPSI DI MBG

**JAKSA  
INCAR  
MANTAN  
PEJABAT**

Dugaan penyimpangan dana program Makan Bergizi Gratis yang **merugikan negara dan anak-anak Indonesia.**

LAPORAN KEUANGAN PROGRAM MBG  
DUGAAN MARK UP HARGA  
SUPPLIER FIKTIF  
KONFLIK KEPENTINGAN





# info indonesia

www.infoindonesia.id

INOVASI UNTUK NEGERI

## Network



**INFO PASANG**  
NUR AISAH  
+ 62 815-1157-6312  
**IKLAN**



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat

Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA  
JL. Raya Kalibata No. 8  
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781

Email : [redaksi@infoindonesia.id](mailto:redaksi@infoindonesia.id)

 [www.infoindonesia.id](http://www.infoindonesia.id)

 facebook @infoindonesia.id  twitter : @\_infoindonesia

 Instagram @info\_indonesia.id

 YouTube : infoindonesiatv



## PEMIMPIN UMUM :

Usman Rizal

## PEMIMPIN PERUSAHAN

Nur Aisah

## PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

## WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rahmad Romli

## Redaktur Pelaksana

Irmayani

## REDAKTUR

Nina Erlina, Ega Tri Gustina,  
Nur Khamida, Sukma Mawarni

## REPORTER

Ari Irgan, Siti Nieke, Agung Prasetya,  
Rizwan Suandi, Hari Priyadi,  
Putri Aridhani

## DESAIN MEDSOS

Al Amin, M. Fikri, Adam Aulia.

## TATA LETAK

Sujatmiko

## KEUANGAN

Atika

## SEKRETARIS REDAKSI

Nur Aisah

## PENGEMBANGAN BISNIS

Ega Tri Gustina, Ellisa Mawarni

## DISTRIBUSI

Abdul Muchtar

## BANK ACCOUNT

a/n PT. WAHANA MULTIMEDIA, BCA  
No. Rek 553-041-4321,  
KCP Otista Jakarta Timur

## RANGKAIAN

Perjalanan 100 hari kedua 2026 sudah mulai sejak awal April. Di rentang 100 hari kedua ini, kita menyimak rangkaian peristiwa yang merupakan dinamika pengujian ketahanan nasional di berbagai sisi.

Mulai dari perombakan (reshuffle) struktur kekuasaan di pusat pemerintahan pada Senin siang, 27 April 2026, juga tragedi transportasi yang merenggut nyawa di Bekasi, Jawa Barat, pada malam harinya, serta kecelakaan jamaah haji di Madinah, Arab Saudi keesokan harinya. Ketiga peristiwa ini, meski terjadi di ruang yang berbeda, terikat erat dengan penyelenggaraan negara memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Mengenai reshuffle kabinet, pemerintah berusaha mencapai potensi maksimalnya dengan menata ulang tim kerja demi efektivitas. Namun, efektivitas pemerintahan ini baru akan bermakna jika mampu menjamin fondasi kebutuhan yang lebih mendasar bagi masyarakat luas, yakni rasa aman dan kelangsungan hidup.

Nah, hanya berselang beberapa jam, kecelakaan kereta api di Bekasi pada malam di hari yang sama, seakan menjadi pengingat pahit bahwa kebutuhan akan Rasa Aman (Safety Needs) masih menjadi tantangan besar. Transportasi publik adalah urat nadi infrastruktur yang seharusnya memberikan perlindungan fisik bagi warga. Tragedi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem keamanan dasar yang wajib dipenuhi negara sebelum wacana ambisi-ambisi besar di level kebijakan.

Memasuki Selasa, 28 April 2026, kabar duka datang pula dari Tanah Suci mengenai kecelakaan bus jamaah haji di dekat Jabal Magnet, Madinah, Arab Saudi. Peristiwa ini menyentuh sisi kebutuhan sosial dan spiritual. Ibadah haji adalah momen kolektif hubungan dengan Sang Pencipta. Namun, musibah dapat terjadi tanpa diduga.

Apapun, kecelakaan di Bekasi dan Madinah memerlukan evaluasi terhadap kesanggupan kita sebagai bangsa menjaga kebutuhan di tingkat dasar. Kebutuhan fisik dan fisiologis seperti pangan, air, dan sandang beada di dasar sekali. Setelah itu, warga memerlukan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi berupa keamanan dan keselamatan.

Jika keamanan transportasi publik dan perlindungan warga di luar negeri masih menjadi masalah bagi kita, maka semangat reshuffle di pucuk penyelenggara negara hendaknya meluas dan menyebar hingga pelaksana yang langsung berhadapan dengan warga sebagai penerima layanan. Kepercayaan terhadap negara tumbuh secara alamiah dari rasa aman saat mereka beraktivitas, baik saat bekerja di dalam negeri maupun saat menjalankan ibadah di mancanegara.

Maka, tiga peristiwa dalam dua hari tadi menjadi cermin bagi bangsa Indonesia untuk merenung sejenak: Pembangunan bangsa hendaknya berjalan beriringan sejak dari pembenahan birokrasi di Istana hingga perbaikan sistem keselamatan di rel kereta dan jalur bus di negeri orang.

Hanya dengan memenuhi setiap tahapan kebutuhan rakyatnya, Indonesia dapat benar-benar mencapai puncak menjadi bangsa yang besar, aman, dan bermartabat. Toh merenung saja belum cukup tanpa mewujudkannya secara konkret di dunia nyata. ●

### ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,

Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

● TELP 021-791 96781 ● FAX 021-791 96786

Email : redaksi21pro@gmail.com

Instagram : info\_indonesia.id

Tiktok : infoindonesia.tv

Facebook : infoindonesia. id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH  
PT Wahana Multimedia  
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH  
PT Dua Satu Pro

# DAFTAR ISI

EDISI BULAN MEI 2026



## 6 INFO UTAMA

Liputan media konvensional maupun tayangan media sosial menyangkut kecelakaan dan keracunan MBG menjadi konsumsi warga lapisan menengah ke bawah serta Gen Z. Toh jajaran pemerintah mengemukakan fakta positif demi kesinambungan MBG.

## 44 INFO PRIORITAS SUMSEL

Pembangunan infrastruktur jembatan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Herman Deru selama memimpin Provinsi Sumatera Selatan. Sejak menjabat pada periode pertama tahun 2018 hingga berlanjut kembali pada 2025.

## 16 INFO KEMENTERIAN

Peran Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) ternyata juga mencakup urusan penanganan sampah terutama di perkotaan. Selain itu, ia juga menjabat Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP).

## 62 INFO JAKARTA

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi jangka panjang krisis sampah ibu kota.



**72**

**INFO EKONOMI**

Danantara akan terlibat dalam pengelolaan ojek online. Perlu cermat menghitung uang, barang, dan tentu saja orang yang menggantungkan hidupnya dari sana.



**76**

**INFO NASIONAL**

Mahasiswa merupakan kunci dalam menentukan arah masa depan bangsa, termasuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian nasional.



**80**

**INFO KHUSUS**

Yang terbaru adalah penetapan tersangka Arinal Djunaidi, Gubernur Provinsi Lampung 2019-2024. Bagaimana di berbagai daerah lainnya?

**3** DARI REDAKSI

**30** INFO PROFIL

**42** OPINI

**64** INFO ISTANA

**66** INFO KESEHATAN

**70** INFO WISATA



**26**

**INFO KEMENPAR**

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mulai memperkuat fondasi keamanan sektor pariwisata nasional dengan menyiapkan Program Keselamatan Wisata 2026 yang akan diterapkan di 38 provinsi di Indonesia.

# DI BALIK KECELAKAAN DAN KERACUNAN MBG

Liputan media konvensional maupun tayangan media sosial menyangkut kecelakaan dan keracunan MBG menjadi konsumsi warga lapisan menengah ke bawah serta Gen Z. Toh jajaran pemerintah mengemukakan fakta positif demi kesinambungan MBG.

Sebuah unit mobil operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menabrak dua lapak pedagang di Jalan Pulau Kalimantan Raya, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya, seorang pedagang mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat mobil operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut melaju dari arah Jalan Nusantara menuju Jalan Pulau Kalimantan. Namun, mobil tiba-tiba melaju kencang dan kehilangan kendali.

"Mobilnya tiba-tiba kencang, terus langsung nabrak lapak di sini. Suaranya keras banget kayak petir," kata seorang saksi mata, Yuli, 53, saat memberikan keterangan kepada wartawan di lokasi kejadian. Mobil tersebut langsung menghantam dua tempat usaha warga, yakni lapak tahu goreng dan lapak ayam goreng.

Benturan yang keras membuat seluruh barang dagangan dan peralatan milik pedagang terlempar hingga sejauh beberapa meter. Kecelakaan ini men-

gakibatkan Sanoeri, 41, seorang pedagang tahu goreng, mengalami luka berat setelah terhempas akibat hantaman kendaraan. "Tukang gorengan sudah tergeletak di jalan, berdarah-darah," ujar Yuli menambahkan.

Warga di lokasi kejadian segera mengevakuasi korban Sanoeri ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Sanoeri akhirnya

nengah ke bawah akibat program MBG yang mulai meluncur secara bertahap sejak 6 Januari 2025. Namun, yang paling mencolok dari peristiwa semacam ini adalah kasus-kasus keracunan makanan MBG yang dikonsumsi penerima manfaatnya.

Untuk kasus keracunan MBG, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengemukakan data evaluasi pelak-



⇒ Diteruskan  
Assalamualaikum wr wb  
Yth Bapak / Ibu Wali Murid kelas 6

Mohon maaf sebelumnya,  
Dikarenakan MBG baru datang,  
yang mau diambil silangkan  
ditunggu sampai pukul 14.00  
Anak-anak dimohon membawa  
tempat makan.

Demikian pemberitahuan ini atas  
perhatian dan kerjasamanya kami  
ucapkan terimakasih.

Wali kelas 6 13.20



meninggal dunia, sedangkan satu korban lainnya, seorang pedagang ayam goreng, Neni Anggraeni, 33, dilaporkan hanya mengalami luka ringan akibat insiden tersebut.

Kisah Sanoeri dan Neni menambah daftar panjang berbagai peristiwa malang yang menimpa warga lapisan me-

sanaan program MBG sejak masa peluncuran awalnya. Dari Januari 2025 hingga 10 Mei 2026, data Kemenkes mencatat 445 kejadian dugaan keracunan akibat mengonsumsi MBG di Indonesia. Sedangkan total korban keracunan mencakup 37.673 orang di berbagai wilayah Indonesia.

Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, mengungkapkan, ribuan kasus keracunan tersebut tersebar di 210 kabupaten dan kota yang mencakup 36 provinsi. Berdasarkan rincian medis, sambungnya, sebanyak 2.348 korban harus menjalani rawat inap, sementara 27.346 lainnya melakukan rawat jalan. Sedangkan 7.979 orang lainnya, lanjut Wamenkes Benjamin, mengalami gejala ringan tanpa perlu mendatangi fasilitas kesehatan.

Meski angka kasus keracunan menjadi sorotan, Wamenkes Benjamin menegaskan skala program ini jauh lebih masif dibandingkan dengan jumlah insiden keracunan yang terjadi. Data Kemenkes

kira-kira di atas delapan miliar piring... Keamanan pangan kini menjadi fokus utama dalam pengelolaan program yang dijalankan oleh 27.649 SPPG," kata Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus dalam kunjungan ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa, 12 Mei 2026.

Dari total SPPG yang operasional di 38 provinsi itu, sebanyak 56,72 persen diantaranya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yakni dokumen resmi yang menunjukkan usaha tersebut memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang ditetapkan pemerintah. Jumlah tersebut setara dengan

nesia dalam kurun waktu satu tahun empat bulan sebagai upaya menyelesaikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Maka saat ini BGN memiliki 27.000 kepala SPPG, 27.000 ahli gizi, 27.000 akuntan, dan 1,1 juta relawan yang siap menyukseskan salah satu AstaCita Presiden Prabowo Subianto itu.

Sedangkan data Kemenkes dan BGN tadi tampak menjadi pengimbang dari berbagai konten media mainstream maupun media sosial yang menampilkan keracunan, juga kecelakaan lalu-lintas seperti di Bekasi tadi. Data Kemenkes dan BGN pun menyasar kritik terhadap MBG melalui laporan investigasi mengenai rendahnya standar higienitas dapur umum SPPG di daerah pelosok yang memicu diare massal.

Viral pula di media sosial video amatir durasi pendek yang memperlihatkan, antara lain, antrian panjang anak sekolah kelaparan karena keterlambatan pengiriman makanan SPPG. Viral pula infografis buatan kreator lokal yang membandingkan menu makanan mewah di kota besar dengan menu ala kadarnya di desa terpencil.

Nah, kasus-kasus keracunan, standar hygiene, kecelakaan, umumnya menargetkan audiens dari lapisan menengah ke bawah dan gen Z (generasi yang lahir antara 1997-2022). Lapisan menengah ke bawah dan Gen Z umumnya merespons isu MBG secara terapeutik dan visceral (langsung terasa oleh fisik). Kasus keracunan atau kecelakaan mobil SPPG menjadi sangat viral di kalangan ini karena mereka adalah konsumen langsung yang merasakan dampaknya di lapangan.

Program di bawah pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut merupakan salah satu andalan sekaligus termasuk dalam AstaCita, 8 program hasil terbaik cepat, pemerintahan Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Apakah reaksi negatif sebagian warga lapisan menengah ke bawah dan Gen Z akan mempengaruhi kebijakan MBG? Yang jelas, program ini sudah memasuki tahun kedua tanpa tanda-tanda akan berhenti. Soal perbaikan memang sudah seharusnya. ●



menyebutkan, sejak diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, lebih dari delapan miliar porsi makanan telah didistribusikan kepada para siswa mulai dari tingkat PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

"Sampai hari ini yang sudah mendapat MBG selama program berlangsung

84,80 persen dari 18.493 SPPG yang mengajukan pengurusan SLHS. Lebih jauh seluruh SPPG yang beroperasi saat ini ditargetkan memiliki SLHS tanpa terkecuali.

Dalam catatan Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah telah berhasil mendirikan 27.000 lebih SPPG di Indo-

# CELAH KORUPSI PROGRAM MBG

Pegiat Antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan temuannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rupanya soal proyek pengadaan senilai Rp141,79 miliar; kali ini terkait sertifikat halal di dapur MBG yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan tajam dari lembaga pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW). Berdasarkan hasil penelusuran terkait pengadaan jasa sertifikasi halal di Badan Gizi Nasional, Indonesia Corruption Watch menemukan adanya empat persoalan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar Rp49,5 mil-

iar.

Pada tahun 2025 Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan pengadaan jasa sertifikasi halal hingga empat tahap. Total anggaran sertifikasi halal tersebut senilai Rp141,79 miliar dengan volume pekerjaan sebanyak 4.000 sertifikasi. Pemenang pengadaan tersebut adalah PT BKI.

"Dari hasil analisis terhadap proses pengadaan yang berlangsung di BGN, ICW menemukan adanya empat persoalan," ungkap Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Wana Alamsyah di Jakarta kepada kalangan media, pada Kamis, 7 Mei 2026. Wana mengemukakan, pertama, temuan ICW bahwa pengadaan jasa sertifikasi halal oleh tidak memiliki dasar hukum. Menurut dia, payung hukum Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG memang mewajibkan pemenuhan sertifikasi halal.

Sedangkan keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan MBG, lanjut Wana, menegaskan kewajiban pemenuhan sertifikasi halal menjadi tanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). "Dengan demikian seharusnya yang memenuhi sertifikasi halal adalah SPPG bukan BGN, terlebih SPPG telah mendapatkan insentif sebesar Rp6 juta per hari. Oleh sebab itu, pengadaan jasa sertifikasi halal oleh

BGN tidak memiliki dasar hukum," ungkapnya.

Temuan ICW kedua, kata Wana, pemecahan paket pengadaan jasa sertifikasi halal cenderung menghindari tender, seleksi, dan lari dari tanggung jawab. "Terdapat empat paket pengadaan jasa sertifikasi halal dengan lokasi, jenis, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta penyedia yang sama. Secara prinsip efisiensi dan kepatutan, paket-paket tersebut seharusnya digabungkan menjadi satu. Penggabungan memungkinkan perolehan harga yang lebih kompetitif seiring meningkatnya volume pekerjaan," kata Wana.

ICW menduga, sambungnya, pemecahan paket bertujuan menghindari sejumlah kewajiban. "Pertama, menghindari keharusan memperoleh pendapat ahli hukum kontrak sebelum penandatanganan. Kedua, menghindari mekanisme tender atau seleksi terbuka. Ketiga, membatasi tanggung jawab hukum Pengguna Anggaran (PA). Jika paket digabung, nilai pagu yang melampaui Rp100 miliar akan menempatkan tanggung jawab pemilihan penyedia secara langsung pada Kepala BGN selaku PA," ujar Wana.

Sedangkan temuan , ketiga, dugaan pinjam bendera, istilah teknis ketika satu perusahaan (peminjam) menggunakan nama, dokumen, kualifikasi, atau sertifikasi perusahaan lain (pemilik bendera) untuk mengikuti tender proyek. Ini dilakukan untuk mengakali persyaratan teknis, administratif, atau legalitas yang tidak dipenuhi oleh perusahaan peminjam

"ICW menelusuri daftar Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di sistem Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, kami tidak menemukan nama penyedia dalam daftar lembaga yang berwenang. PT BKI juga tidak tercatat sebagai LPH yang berhak melakukan pendampingan sertifikasi halal," ungkap Wana.

Temuan ini, kata dia, menunjukkan adanya dugaan pengalihan pekerjaan, baik seluruh maupun sebagian, kepada pihak lain yang memiliki status LPH. Praktik tersebut berisiko dilakukan tanpa dasar perjanjian yang jelas dan berpo-



tensi menimbulkan masalah akuntabilitas dalam pelaksanaan kontrak.

Tamahan lagi temuan keempat, dugaan penggelembungan harga. "Berdasarkan perhitungan menggunakan kalkulator biaya sertifikasi halal yang merujuk pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH, total biaya untuk satu perusahaan kategori usaha menengah meliputi sertifikasi halal, pelatihan penyelia halal, dan sertifikasi penyelia halal sebesar Rp23.057.500. Angka ini merupakan tarif batas atas atau biaya maksimum yang dapat dikenakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Berdasarkan penghitungan ICW, apabila menggunakan tarif maksimum untuk mengurus 4.000 sertifikat halal, maka biaya yang dikeluarkan yakni Rp92,2 miliar. Sementara itu, nilai kontrak pada empat paket pengadaan mencapai Rp141,7 miliar. Selisih antara nilai kontrak dan estimasi biaya tersebut menunjukkan adanya dugaan penggelembungan harga (mark up) sedikitnya Rp49,5 miliar.

"Dari rangkaian temuan tadi, kami menduga bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Untuk itu, kami mendesak agar KPK segera melakukan penyelidikan terkait pengadaan jasa sertifikasi halal yang dilakukan oleh BGN per 2025," kata Wana.

Mengenai langkah ke KPK, Wana menyebut ada dua terlapor yang ICW laporkan. "Pertama, Kepala BGN dengan inisial DH. Lalu kemudian yang kedua terlapor dari penyedia, PT BKI, dari Persero. Potensi kerugian negara yang kami hitung adalah tadi, Rp 49,5 miliar dari tata kelola yang bermasalah terkait dengan pengadaan sertifikasi jasa halal ini," kata Wana Alamsyah, kepada wartawan di kantor KPK.

Sedangkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana secara terbuka sudah menanggapi laporan ICW ke KPK. Dadan mengemukakan sikap menghormati langkah ICW sekaligus mengapresiasi perhatian yang diberikan terhadap proses sertifikasi halal. "Terima kasih untuk ICW yang memberi-

kan perhatian khusus terkait Sertifikasi Halal," kata Dadan pada Senin, 11 Mei 2026.

Kepala BGN Dadan pun menjelaskan, kegiatan sertifikasi halal masuk tunggakan anggaran 2025 yang harus diselesaikan 2026. Ia mengemukakan, seluruh proses pembayaran nantinya tetap akan melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi oleh lembaga terkait.

"Perlu kami sampaikan bahwa kegia-

lanjut berupa klarifikasi sesuai dengan tahapan penanganan di KPK. Sedangkan perkembangan pengusutan akan disampaikan langsung kepada pelapor.

"Dari laporan itu tentu nanti tahapannya akan dilakukan telaah dan klarifikasi oleh tim di pengaduan masyarakat. Setiap progress-nya, kami juga akan sampaikan kepada pihak pelapor," kata Budi usai ICW menyampaikan laporan-



tan sertifikasi masuk dalam tunggakan 2025 yang harus diselesaikan dengan anggaran 2026. "Nanti sebelum dibayar, pasti akan di-review oleh BPKP dan juga APIP. Jadi pasti semua akan disesuaikan dengan harga umum berlaku," tandasnya.

Di sisi lain, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengemukakan, laporan masyarakat, dalam hal ini pegiat antikorupsi ICW, akan mendapat tindak

nya

la menjelaskan di KPK sendiri soal program MBG sudah melakukan kajian. Dalam kajiannya KPK sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada BGN. "Baik dari sisi regulasinya, bisnis prosesnya, maupun kondisi di lapangan. Dan bagaimana pemangku kepentingan ini sebaiknya juga menggandeng para pemangku kepentingan lainnya," tandas Budi. ●



## CELAH DIGITAL PENGADAAN BGN

Anggaran pengadaan sertifikat halal dapur MBG tercatat Rp 141,79 miliar. Tapi, anggaran pengadaan motor listrik di BGN mencapai hampir Rp 1 triliun. Lolos juga.

**P**enyelenggaraan negara dan praktik birokrasi sudah melekat dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital. Namun, masih ada celah yang memungkinkan penyimpangan anggaran di tengah keterbatasan fiskal.

Menteri Keuangan mengakuinya. Dalam acara APBN KITA Edisi Mei 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kecolongan soal realisasi anggaran motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis domain Badan Gizi Nasional.

Sebagai bendahara negara ia mengemukakan sudah menolak pengadaan motor listrik untuk BGN sejak 2025 lalu. Namun, sambungnya, pengadaan tersebut tetap lolos karena ada celah di sistem milik Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu.

Tentu saja celah pada sistem digital itu perlu penanganan untuk mencegah kecolongan berikutnya. "Itu software

dari Dirjen Anggaran, sedang diperbaiki sehingga nggak kebobolan kayak kemarin tuh. Kamu kebobolan kan? Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi saya tolak. Pokoknya ada kebocoran dari acara tertentu malah melewati itu sehingga softwrenya tidak terdeteksi ya, sehingga sempat keluar. Sekarang sudah kita perbaiki dan hal seperti itu akan kita kurangi semaksimal mungkin," ucap Purbaya

dalam konferensi pers APBN KITA di kantor Kementerian Keuangan, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Mei 2025.

"Dalam pengertian Pak Dirjen Anggaran akan lihat apakah belanjanya ada yang aneh-aneh apa enggak ya dengan software yang lebih baik lagi. Dulu kan Anda yang bikin softwrenya kan, kok bisa bobol kita? Jadi yang bikin software SPPG itu dia, makanya saya dibobol sama dia. Tapi sekarang kita perbaiki," tambah Purbaya.



Sekitar sebulan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, pernah mengemukakan bahwa pengadaan motor listrik tersebut memang sudah masuk dalam rancangan anggaran tahun 2025. Menurut Dadan, kendaraan itu disiapkan untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam pelaksanaan program MBG.

Dadan mengemukakan, pengadaan sepeda motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jauh berada di bawah harga pasar motor listrik. "Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta, di bawah harga pasaran," ujar Dadan kepada sejumlah wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Menurut dia, BGN hanya bisa merealisasikan 21.800 unit—dari target pembelian 24.400 motor listrik. Dadan juga menjelaskan pembelian sepeda motor listrik ini sudah masuk ke dalam anggaran 2025 dan tidak akan ada lagi anggaran untuk pembelian barang serupa pada 2026. Jika dihitung, pembelian 21.800 unit motor listrik dengan harga Rp42 juta per unit berarti menyedot dana sekitar Rp915,6 miliar, hampir Rp1 triliun

Sedangkan target pengadaan sepeda motor listrik itu adalah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pengadaan Gizi (SPPG) di daerah sulit. "Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," ujar Dadan.

Pengadaan motor listrik ini, kata dia, sudah direncanakan sebagai bagian dari dukungan operasional Program MBG. "Khususnya untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," kata Dadan.

Masih di awal April, Menkeu Purbaya menegaskan, anggaran pengadaan sepeda motor untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak termasuk dalam pengadaan tahun ini. "Yang jelas tahun ini tidak ada, barusan saya cek lagi," kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Rabu, 8 April 2026.

Dia menegaskan kembali pengadaan tersebut merupakan bagian dari ang-

garan tahun sebelumnya."Itu anggaran tahun lalu, tahun ini tidak ada," tegasnya.

Pernyataan ini disampaikan menyusul beredarnya video di media sosial yang menampilkan sejumlah sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN). Video tersebut memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait pengadaan kendaraan tersebut.

Kala itu sejumlah video yang beredar di media sosial menampilkan deretan ribuan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) terparkir rapi dalam sebuah gudang besar. Narasi yang menyertai rekaman tersebut mengklaim adanya 70.000 unit motor yang khusus dialokasikan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat. Angka besar tersebut memicu perdebatan sengit terkait transparansi anggaran, efektivitas penggunaan kendaraan listrik, serta potensi pemborosan dana publik.

Video berisi tayangan motor listrik jenis trail dan matic yang masih terbungkus plastik, beberapa di antaranya tampak sudah dimuat ke atas truk pengangkut. Pembuat konten menyatakan,

"semua motor ada 70 ribu motor untuk wilayah Provinsi Jawa Barat doang," sambil menegaskan bahwa tidak ada niat menyebarkan hoaks.

Reaksi netizen langsung menyoal. Banyak yang menilai langkah pengadaan tersebut kontradiktif dengan upaya efisiensi anggaran pemerintah pusat. Kritik mengarah pada pertanyaan tentang urgensi pembelian motor dalam jumlah masif untuk program MBG dan bagaimana biaya pemeliharaan kendaraan listrik akan dikelola. Selanjutnya Kepala BGN mengklarifikasinya di Istana. Jadi celah digital sudah meloloskan informasi mengenai pengadaan motor listrik.

Bagaimana anggaran yang lolos karena celah digital di Kementerian Keuangan? Yang pasti, Dirjen Anggaran Luky Alfirman sudah dicopot oleh Menkeu Purbaya.

Soal apakah pencopotan Luky terkait kecolongan anggaran pengadaan 21.801 motor listrik akibat celah digital? "(Karena) motor MBG, mungkin. Anda tebak saja sendiri," kata Purbaya, Senin, 11 Mei 2026. ●



# POLITIK DAN EKONOMI MBG

Pemanfaatan algoritma dan kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) pun tak terhindarkan. MBG menjadi ujian bagi kebijakan pemerintah petahana.

**M**emang, kritik bahkan serangan, terhadap program Makan Bergizi Gratis maupun program lain yang tercakup dalam Asta Cita sudah melekat dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Heboh pengadaan motor listrik Badan Gizi Nasional untuk personel dapur makan bergizi gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), misalnya.

Jika bukan berawal dari faktor AI, setidaknya terpicu oleh ilustrasi produk AI yang menggambarkan jajaran sepeda motor dengan latar belakang logo Badan Gizi Nasional. Nah, beriringan dengan itu, berkembang pula rangkaian kegiatan Nexus Digital Strategy.

Salah satunya antara lain program pelatihan intensif seperti pelatihan digital creator dan program magang komunikasi pembangunan. Selain soal teknis keterampilan digital dan praktik magang, pelatihan Nexus Digital Strategy melibatkan pemahaman tentang pembangunan dan pendekatan-pendekatannya. Bolehlah dibidang sebagai upaya menjelaskan kebijakan pemerintah termasuk program MBG dan yang tercakup dalam Asta Cita

Dalam pelatihan Nexus Digital Strategy di Suites Hotel Surabaya, pada Senin, 11 Mei 2026, Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr Teguh Santosa mengemukakan, kebijakan pemerintah saat ini bukanlah langkah sporadis, melainkan sebuah manifestasi dari ideologi pembangunan Prabowo Subianto yang berakar kuat pada kesadaran akan realisme politik global dan keinginan mem-

bangun kedaulatan ekonomi.

Menurut Teguh yang juga mengajar Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, pondasi pertama pembangunan Indonesia saat ini berpijak pada kesadaran akan anarkisme dunia inter-

nasional. Sementara dalam perspektif realisme ofensif yang dikembangkan Mearsheimer, mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) ini menggarisbawahi kenyataan bahwa sistem internasional memaksa negara untuk terus mengejar kekuasaan demi kelang-



sungan hidup.

"Dunia cenderung bergerak dari tatanan liberal menuju anarki. Oleh karena itu, Prabowo melakukan pergeseran paradigma dari ekonomi liberal yang digerakkan pasar (market-driven) menjadi ekonomi yang berbasis intervensi negara atau state-driven," tegasnya.

Lebih lanjut, Teguh memaparkan apa yang disebutnya sebagai doktrin dasar bahwa keamanan sebuah negara adalah situasi di mana pertahanannya lebih besar daripada ancaman yang dihadapi. Kesadaran akan hal ini, membuat Indonesia di era Prabowo terlibat aktif menjaga keamanan di kawasan dan arena internasional. Ini yang disebut sebagai inclusive security, yang kata kuncinya adalah partisipasi dan keterlibatan.

Indonesia di era Prabowo juga mengembangkan prinsip active neutrality, di mana netralitas dan ketidakberpihakan adalah pilihan yang diambil berdasarkan kalkulasi kepentingan nasional. Bukan karena tekanan pihak lain. Sedangkan untuk bisa melesat menjadi negara dengan kekuatan dan reputasi yang diperhitungkan, menggunakan kaca mata dalam "Breakout Nations", Teguh menekankan empat syarat utama, yakni stabilitas politik, pemanfaatan demografi produktif, kebijakan ekonomi pragmatis, dan keberanian memutus ketergantungan pada komoditas mentah.

Ideologi pembangunan Prabowo ini juga membawa nafas "Soemitronomics", warisan pemikiran begawan ekonomi Soemitro Djohadikusumo yang merupakan ayah Prabowo. Teguh menyebut implementasi hilirisasi, Trilogi Pembangunan, hingga pembentukan daya dukung finansial melalui BPI Dnantara adalah langkah yang diambil untuk memperkuat struktur ekonomi nasional melalui industrialisasi yang masif.

Teguh juga menyinggung sisi sosialisme demokrasi dalam pemikiran Prabowo. Berbeda dengan Marxisme-Leninisme yang otoriter, konsep ini menekankan manajemen perekonomian nasional secara mandiri melalui koperasi yang dikembangkan dalam sistem demokrasi. "Tujuannya adalah menghapus praktik kapitalisme yang merugikan dan mewujudkan masyarakat adil melalui cara-cara demokratis, di mana pekerja

memiliki akses terhadap alat produksi," jelasnya.

Dalam konteks program MBG, berkembang pula perspektif lain yang tetap kritis. Pada akhir 2025, menjelang setahun pelaksanaan program MBG, misalnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis kajian "Ada Siapa di Balik MBG?: Patronase Politik dalam Memperkuat Dukungan".

Anggaran masif MBG, dalam kajian ICW, tidak dibarengi dengan kualitas implementasi dan pengawasan yang baik.

dan memperluas jejaring pendukung ataupun loyalis pemerintahan saat ini. ICW melalui kajian ini mengungkap praktik patronase serta keterlibatan Politically Exposed Person (PEPs) dalam pelaksanaan program MBG.

Menurut ICW penelusuran ini penting karena praktik patronase dan keterkaitan PEPs dengan program MBG dapat membuka ruang korupsi dan hanya menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara bebannya justru ditanggung oleh publik. Temuan



Dalam 10 bulan lebih pelaksanaan MBG, berbagai permasalahan mulai terungkap, termasuk minimnya transparansi. Informasi mengenai rincian anggaran, penyusunan peraturan, hingga data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak terbuka. Hal tersebut lalu mempersulit pengawasan publik untuk mendeteksi potensi penyimpangan.

Selain masalah-masalah tadi, yang tak kalah penting adalah program MBG rawan akan konflik kepentingan, patronase, dan kronisme. Program ini mudah dieksploitasi sebagai alat untuk merawat

dari penelitian ini menunjukkan bahwa program MBG diduga sarat akan praktik politik patronase dan konflik kepentingan, terlihat dari hubungan yayasan pengelola SPPG dengan partai politik, tim pemenang, pendukung Prabowo maupun Joko Widodo, militer, dan aparat penegak hukum. Keterkaitan ini mengindikasikan dugaan distribusi sumber daya kepada banyak pihak untuk memperkuat dan memperluas dukungan politik. Sehingga, program ini diduga digunakan sebagai alat konsolidasi politik daripada manfaat untuk publik. ●



# MEMACU PEMBANGUNAN TANGGUL LAUT PANTURA

Dari skalanya, pembangunan tanggul laut di pantai utara Jawa (Pantura) tergolong proyek raksasa. Namanya juga Giant Sea Wall.

**G**ambaran sederhananya begini: Dalam perencanaannya, Giant Sea Wall Pantura membentang sepanjang sekitar 575 kilometer, terbagi dalam dua wilayah. Wilayah I mencakup Serang, Tangerang, Teluk Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, hingga Cirebon. Sedangkan Wilayah II mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, hingga Gresik.

Contoh pembangunannya sudah tersedia di kawasan Teluk Jakarta yang sudah membentang 11,28 dari target 28,2 kilometer. Menurut rencana, pengembangan tanggul laut di Teluk Jakarta, National Capital Integrated Coastal De-

velopment (NCICD), terintegrasi dengan proyek Giant Sea Wall Pantura Jawa.

Mei 2026 ini, Menko AHY mengemukakan urgensi pembangunan Giant Sea Wall sebagai langkah strategis nasional untuk menjawab berbagai tantangan serius di kawasan pesisir. Kondisi Pantura saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan akibat meningkatnya frekuensi banjir rob, penurunan muka tanah, serta dampak perubahan iklim berupa kenaikan permukaan air laut.

“Terjadi kenaikan permukaan air laut sekitar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun akibat pemanasan global. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir rob yang dapat merusak permukiman dan infrastruktur masyarakat,” ujar Menko AHY.

Sebagai tanggapannya, pemerintah mendorong pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari solusi komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penataan kawasan pesisir secara menyeluruh, termasuk pengendalian banjir, penyediaan air bersih, serta perlindungan dan relokasi masyarakat terdampak. “Penanganan penurunan muka tanah tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatannya harus dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Jadi, menurut Menko AHY, pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara Jawa (Pantura) bertujuan melindungi aset ekonomi di sepanjang wilayah tersebut. Harap maklum, kawasan Pantura berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yakni mencapai US\$368,36 miliar atau sekitar Rp6.396 triliun.

“Potensi kerugian ekonomi 27 persen kontribusi Pantura terhadap PDB nasional, ini signifikan. Jika kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi pantura Jawa ini dengan baik dan serius. Dijaga jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan yang semakin buruk,” kata AHY.

“Kemudian juga sekaligus menjaga produksi pangan selain sentra-sentra industri yang harus kita lindungi,” ungkap AHY.



velopment (NCICD), terintegrasi dengan proyek Giant Sea Wall Pantura Jawa.

Nah, dalam konteks ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin kick-off meeting lintas kementerian dan lembaga guna mendorong percepatan perlindungan, pembangunan, dan pengelolaan Pantai Utara (Pantura) Jawa secara terpadu. Dalam forum yang berlangsung di Ballroom Gedung Mina Bahari III Lantai 1, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, pada Senin, 4

Yang juga jangan dilupakan, sambung AHY, cukup banyak sentra-sentra pangan, kawasan-kawasan pangan atau pertanian yang harus dipastikan juga terlindungi dari intrusi air laut. "Ini harus kita cegah. Investasi dalam modernisasi pertanian tentu dalam bentuk modernisasi irigasi, termasuk juga diversifikasi tanaman menjadi lebih visible," katanya.

Menko AHY juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya percepatan implementasi proyek melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, didukung perencanaan yang matang, berbasis data, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat. Salah satu langkah awal yang menjadi prioritas adalah percepatan penyusunan masterplan sebagai fondasi kebijakan jangka panjang pengelolaan Pantura Jawa.

"Percepatan penyusunan masterplan menjadi kunci. Ini membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak," ujarnya. Menko AHY pun mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi dan menghasilkan langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan.

Ia menjelaskan bahwa rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa ini akan mencakup 5 provinsi, 20 kabupaten, dan 5 kota, membentang dari Tangerang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Selain untuk melindungi aset ekonomi, proyek ini juga bertujuan menjaga kawasan permukiman pesisir yang saat ini dihuni sekitar 55 juta jiwa.

"Masyarakat yang ada di Pantura ini, kalau di wilayah pantura ada 20 kabupaten dan lima kota, itu kurang lebih 55 juta penduduknya. Jadi, ini masyarakat kita jumlahnya besar. Oleh karena itu, ini adalah urgensi yang kita harapkan mendorong dan menggerakkan kita semua," ungkapnya.

Karena urgensinya tadi, banyak yang hadir di forum ini. Tampak antara lain, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arif Satria; Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Laksamana TNI (Purn.) Didit Herdiawan; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknolo-

gi, Brian Yulianto; Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki; Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komjen Pol. (Purn.) Purwadi Arianto; Wakil Menteri Dalam Negeri II, Ribka Haluk; Plt. Kepala Badan Informasi Geospasial, Mohammad Arief Syafi'i; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak; Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani; Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja; Bupati Karawang, Aep Saepuloh; Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Pan-

Kaimuddin; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faizal; serta Staf Khusus Menteri, Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, Irjen Pol. Arif Rachman, dan Merry Riana.

Nah, sejauh ini Jakarta sudah memulai. Bagaimana dengan daerah lain? Dari Provinsi Jateng, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mengemukakan segera mengkoordinasikan rencana pembangunannya dengan masyarakat, teruta-



gan, Sugeng Santoso; serta Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto.

Sedangkan dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY membawa rombongan, antara lain Sekretaris Kementerian Koordinator, Ayodhia G. L. Kalake; Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Rachmat

ma di wilayah prioritas Jateng.

Dalam pembangunan itu, Wagub menyampaikan bahwa daerah yang menjadi prioritas di Jateng adalah Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal. "Saya minta nanti bupati dan wali kota segera turun, berkoordinasi dengan masyarakat bahwa ini akan segera ada pembangunan giant sea wall," tandasnya. ●



# SAMPAH JADI ENERGI LISTRIK JALAN TERUS

Peran Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) ternyata juga mencakup urusan penanganan sampah terutama di perkotaan. Selain itu, ia juga menjabat Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP).

Nah, untuk soal penanganan sampah perkotaan, Zulhas bertindak sebagai koordinator pusat untuk percepatan proyek PSEL sejak awal tahun 2026. Jadi tak mengherankan, mengapa ia mengemukakan Presiden Prabowo Subianto kerap menghubunginya untuk membahas penanganan sampah di Jakarta, khususnya Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Jakarta ini mendapat perhatian khusus dari Bapak Presiden. Kami hampir tiap minggu ditelepon soal sampah, utamanya Bantargebang," kata Zulhas dalam acara penandatanganan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Danantara Investment Management di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin, 4 Mei 2026.

Lebih dari itu, pada Selasa, 21 April 2026, Zuhas juga mengaku Presiden Prabowo Subianto memerintahkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy/PSEL) harus rampung dalam tujuh minggu guna mempercepat penanganan persoalan sampah nasional yang kian mendesak. Jadi, tenggat waktunya sekitar pertengahan Juni 2026.

gahan Juni 2026.

"Karena ini perintah Bapak (Presiden Prabowo Subianto) langsung. Kalau dalam tujuh minggu nggak selesai juga ya terpaksa kita (pemerintah pusat) ambil alih. Perintahnya begitu," kata Zulhas.

Nah, soal Bantargebang ternyata beres pada awal Mei 2026 dengan penandatanganan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Danantara Investment Management sebagai bagian dari percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di Jakarta dengan payung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo pada Oktober tahun lalu.

Sebetulnya pada 31 Maret 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah menyatakan lahan PSEL di Bantargebang sudah siap. "Saya tadi komunikasi langsung dengan Pak Menko Pangan dan beliau meminta untuk lahan di Bantargebang yang dipersiapkan untuk pembangkit listrik tenaga sampah, sudah kami persiapkan," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.

Ia juga menyebut, pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada pemer-



intah pusat terkait rencana tersebut. Menurut Pramono, kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang saat ini sudah sangat terbebani oleh volume sampah yang terus menumpuk selama bertahun-tahun.

"Memang saya setuju dengan Pak Menko, Bantargebang ini kan sudah terlalu lama sekali, bebannya terlalu berat. Di sana sudah ada sampah 55 juta tanpa bermaksud menyalahkan siapa pun, ini sudah peristiwa yang dari waktu ke waktu," jelasnya.

Alhasil, berlangsunglah penandatanganan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Danantara Investment Management tadi. Zulhas memastikan dalam enam bulan sejak Perpres tersebut diteken, proyek pengolahan sampah menjadi listrik di Jakarta sudah harus masuk tahap konstruksi bersama sejumlah kota lain. "Dalam waktu enam bulan, sejak diteken Perpres tersebut, sudah ada tiga lokasi yang sudah konstruksi termasuk Bandung, Bali, Bogor," sambungnya.

Dia menambahkan, pengelolaan sampah nasional kerap diukur dari keberhasilan penanganan Bantargebang. "Kalau Bantargebang enggak beres, walaupun beres seluruh Indonesia, kata orang, sampah belum beres. Tapi kalau Bantar Gebang beres, yang lain belum beres, kata orang, sampah sudah beres," ungkapnya.

Soal sampah di Bantargebang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menjalin sinergi strategis dengan Danantara (PT Danantara Indonesia) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada 4 Mei 2026 untuk mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Kerja sama ini melibatkan Danantara sebagai penyedia skema pembiayaan dan badan usaha yang akan merealisasikan infrastruktur pengolahan sampah modern di dua titik krusial, yakni Bantargebang dan Tanjungan (Kamal Muara). Melalui fasilitas ini, sampah akan dikonversi menjadi energi listrik ramah lingkungan yang mampu mereduksi ribuan ton beban sampah setiap harinya.

Nah, soal tenggat tujuh pekan sejak April 2026, Zulhas mengungkapkannya di acara penandatanganan Perjanjian

Kerjasama (PKS) antara tiga pemerintah daerah dengan Badan Usaha Pengembangan dan Pengelola (BUPP) Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Penandatanganan itu mencakup tiga wilayah strategis, yakni Kota Bekasi, Bogor Raya dan Denpasar, sebagai bagian dari upaya nasional dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus mendorong transisi energi bersih.

Zulhas menyebut sebelumnya proyek PSEL dirancang dalam kurun waktu 11 tahun, namun hanya dua proyek yang terealisasi dan itu pun tidak seluruhnya berjalan optimal. "Selama 11 tahun itu cuma dua. Dua pun, satu jalan satu tidak, yang jalan pun juga kadang-kadang jalan, kadang-kadang tidak," tuturnya.

Atas hal itu, pemerintah kemudian menargetkan penyelesaian proyek dalam waktu enam bulan. Namun, lanjut Zulhas, Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan yang jauh lebih cepat agar dampaknya segera dirasakan masyarakat.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 32

kawasan aglomerasi sebagai bagian dari upaya besar menangani persoalan sampah secara sistematis dan berkelanjutan. Namun, capaian tersebut baru akan menyelesaikan sekitar 24 hingga 25 persen dari total persoalan sampah nasional, sehingga masih diperlukan langkah lanjutan untuk menangani sisa permasalahan yang ada. "Kalau ada yang pakai waste-to-energy bisa, silakan, kita akan bikin agar lebih cepat. Karena itu banyak terdapat di beberapa kabupaten/kota," ucapnya.

"Jadi, tolong Pak Gubernur, Bupati, Walikota ini dikawal agar bisa selesai tepat waktu agar juga kita senang, kita bersih, tapi investornya juga tidak rugi karena selalu ada yang dikerjakan sampahnya tersedia," kata Menko Zulhas yang juga Koordinator Pusat Percepatan Proyek PSEL.

Apa hubungannya dengan Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih? Ya, siapa tahu pengelolaan sampah perkotaan di hulu sejak menjadi limbah rumah tangga juga dapat menjadi lahan bisnis Koperasi Merah Putih. ●





# TANTANGAN KINERJA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sektor kelautan dan perikanan menjadi bagian penting dari ketahanan pangan. Bagaimana perkembangannya?

Perhatian terhadap kawasan pesisir, nelayan, dan keluarganya, memang pantas. Toh sektor kelautan dan perikanan Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), misalnya, mencatat peningkatan nilai ekspor yang signifikan. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura mengungkapkan, nilai ekspor perikanan Indonesia per 2025 mencapai US\$6,2 miliar (atau setara Rp106,5 triliun dengan asumsi kurs Rp17.190/US\$) dengan pertumbuhan sekitar 5,2 persen secara tahunan.

"Kita menunjukkan neraca perdagangan yang surplus, artinya produk kita mampu bersaing di pasar global," tutur Andy, dalam acara Food Summit 2026, Senin, 27 April 2026.

Dalam paparannya, Andy Artha mengemukakan, struktur pasar ekspor kelautan dan perikanan Indonesia pada

2025 masih didominasi oleh negara-negara dengan daya beli tinggi dan permintaan seafood yang kuat. Amerika Serikat menjadi tujuan utama dengan nilai US\$1,99 miliar, diikuti China sebesar US\$1,22 miliar dan kawasan ASEAN sekitar US\$1,00 miliar.

Komposisi ini, ujarnya, merupakan indikasi ekspor Indonesia masih bertumpu pada pasar besar global, terutama untuk komoditas bernilai tinggi. Dari sisi komoditas, ekspor kelautan dan perikanan Indonesia masih sangat ditopang oleh produk bernilai tinggi dengan dominasi kuat pada komoditas udang.

Pada 2025, udang menjadi kontributor terbesar dengan nilai sekitar US\$1,87 miliar, menegaskan posisinya sebagai tulang punggung devisa sektor ini. Diikuti komoditas tuna dan cakalang yang mencatatkan sekitar US\$1,04 miliar, didorong permintaan global untuk produk protein laut berkualitas tinggi.

Perkembangan terbaru, ekspor

udang RI sudah mulai pulih. "Ekspor udang kita yang tadinya akibat kasus cesium itu sempat bermasalah, tahun ini per 26 April kita sudah mampu mengeksport kembali kurang lebih 3.400 kontainer, yang tadi saya sampaikan kurang lebih nilainya lebih dari Rp11 triliun," ujar Andy.

Sedangkan kelompok cumi, gurita, sotong berkontribusi sekitar US\$0,89 miliar, diikuti rajungan dan kepiting sebesar US\$0,51 miliar, dan rumput laut sekitar US\$0,32 miliar.

Toh gambaran ini menunjukkan bahwa ekspor Indonesia tidak hanya bertumpu pada perikanan tangkap, tetapi juga mulai bergeser ke komoditas budidaya dan bahan baku industri, meskipun tantangan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah masih menjadi pekerjaan rumah untuk mendorong ekspor yang lebih berkualitas.

Untuk kuartal I 2026, data KKP menunjukkan nilai ekspor produk perikanan

mencapai 983,1 juta Dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp16,7 triliun sejak awal tahun hingga pertengahan Maret 2026 hingga menjelang Idul Fitri pekan ketiga bulan yang sama. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini menjelaskan volume ekspor ikan ke berbagai negara mencapai 197.718 ton. Total volume tersebut tercatat hingga penghentian sementara angkutan barang pada 13 Maret 2026.

Nilai ekspor itu diperoleh berdasarkan penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) yang menjadi syarat standar keamanan pangan di 140 negara mitra dagang. "Sepuluh komoditas unggulan adalah udang vaname, tuna, cumi-cumi, rajungan, rumput laut, cakalang, kepiting, udang windu, ikan layur, serta gurita," ungkapnya.

Ishartini juga menyorot negara-negara dengan penyerapan terbesar produk perikanan Indonesia, antara lain Amerika Serikat, China, Jepang, Vietnam, Thailand, Malaysia, Australia, Arab Saudi, dan Singapura. Ia juga mengakui eskalasi konflik di Timur Tengah turut berdampak pada aktivitas ekspor perikanan.

Berdasarkan data, ekspor ikan saat ini dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu (2025) mengalami penurunan volume sebesar 41,35 persen yang berdampak pada penurunan nilai ekspor sebesar 21,71 persen.

"Untuk demand produk perikanan Indonesia saat ini relatif masih stabil, indikasinya dari permohonan SMKHP yang terus kami layani. Hanya saja memang dari sisi volume memang agak terkendala karena transportasi dalam rantai pasok terkena imbas eskalasi misalnya perubahan rute shipment, biaya tambahan logistik, kontainer dan mother vessel yang terbatas yang semuanya itu juga berkontribusi dalam menaikkan harga produk," ungkapnya.

Dengan kondisi itu, KKP juga berusaha menggenjot produksi dari penangkapan. Pada akhir April 2026, KKP membuka rekrutmen sekitar 20 ribu awak kapal perikanan (AKP) untuk mendukung operasional program modernisasi 1.582 unit kapal perikanan nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan



kebutuhan tenaga kerja tersebut muncul seiring transformasi sektor perikanan tangkap menuju sistem yang lebih modern dan terintegrasi. "Untuk implementasi program ini membutuhkan lebih kurang 20 ribu awak kapal perikanan untuk mengoperasikan kapal dan berdampak langsung pada pelibatan lebih dari 500 ribu tenaga kerja dalam ekosistemnya," kata Latif dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, 30 April 2026.

Ia mengatakan modernisasi kapal perikanan tidak hanya berfokus pada pembangunan armada, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikan kapal modern. Menurut dia, kapal perikanan modern membutuhkan awak dengan kemampuan teknis yang memadai, mulai dari pengoperasian alat tangkap ramah lingkungan hingga penerapan sistem rantai dingin sejak penangkapan ikan di laut.

Beriringan dengan itu KKP memburu penyelesaian 50 unit kapal perikanan modern pada 2026 sebagai tahap awal program modernisasi armada penangkapan ikan nasional. Dirjen Latif, mengemukakan, program tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama pemerintah Indonesia dan Inggris dalam pembangunan 1.582 unit kapal perikanan modern.

Dalam kaitan ini pula menjadi relevan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Untuk tahap pertama, 65 unit KNMP sudah siap beroperasi. "Kami melaporkan bahwa pekerjaan konstruksi KNMP tahap I pada 65 lokasi telah selesai sepenuhnya 100 persen per akhir April 2026," ujar Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Tahap I dan II Trian Yunanda, Sabtu, 2 Mei 2026.

Menjaga ketahanan pangan dari laut biru dan budidaya pesisir berjalan terus. Bahkan jika surplus pun bisa menjadi penghasilan dari ekspor. ●



## MERASA DISERANG LEWAT KASUS PONPES NDOLO KUSUMO

Kementerian Agama (Kemenag) mengaku banyak menerima hoaks terkait kasus kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren. Konten ini secara sengaja diframing untuk menyerang Menteri Agama Nasaruddin Umar.

**M**enteri Agama Nasaruddin Umar kembali menegaskan sikapnya bahwa tidak ada toleransi untuk tindak kekerasan dan pelecehan, baik fisik, verbal, maupun seksual.

"Sikap saya terkait tindak kekerasan seksual itu jelas dan tegas. Tidak ada toleransi untuk tindak kekerasan seksual. Saya tidak pernah menoleransi sedikit pun tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan," tegas Menag di Jakarta.

"Saya tidak hanya sebagai Menteri Agama, tapi sebagai seorang manusia juga menyatakan semua yang bertentangan dengan moralitas itu harus menjadi musuh bersama," sambungnya.

Menag menekankan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh pe-

serta didik.

"Lembaga pendidikan agama harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak kita untuk belajar, harus menjadi contoh masyarakat yang ideal", ujar Me-

nag.

Menag juga menjelaskan bahwa Kementerian Agama sudah memperkuat regulasi dan mekanisme pembinaan di satuan pendidikan keagamaan, yang



akan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

“Ini akan menjadi concern kami, terutama masalah terkait pondok pesantren ya. Kami sudah membentuk satuan pembinaan Pondok Pesantren, yang mana pimpinan pondok pesantren berkolaborasi untuk mengawasi dan mencegah penyimpangan apapun yang terjadi di pondok pesantren,” tegas Menag.

Menag mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam memilah informasi, terlebih informasi hoaks yang berpotensi memecah belah.

“Mari menjadi pemutus rantai hoaks dengan saring sebelum sharing. Cerdas bermedia sosial adalah cara kita menjaga kedamaian untuk sesama,” tandasnya.

### Cabut Izin Pesantren Ndolo Kusumo

Sementara Direktur Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said menegaskan, Kemenag akan mencabut tanda daftar (Ijop) Pesantren Ndolo Kusumo imbas kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh salah satu oknum kiai.

“Sejalan dengan proses afirmasi terhadap para santri, Kemenag juga akan mencabut tanda daftar (Ijop) Pesantren Ndolo Kusumo, Tlogosari, Tlogowungu, Kabupaten Pati,” kata Basnang.

Basnang menambahkan, pihaknya bersama Kanwil Kemenag Jawa Tengah sudah mengunjungi ponpes tersebut untuk memberikan pendampingan sekaligus mengambil langkah yang diperlukan.

Kemenag mengambil keputusan untuk memindahkan para santri ke sejumlah lembaga, baik itu pesantren, sekolah, atau madrasah. Perpindahan ini dilakukan agar pendidikan para santri terus berlanjut meski proses hukum kasus tersebut masih bergulir.

Saat ini ada 89 sembilan santri tingkat Madrasah Ibtidadiyah dan 30 anak di antaranya kelas 6 yang sudah mengikuti ujian dari 4-12 April 2026. Lalu, ada 91 santri yang belajar di Sekolah Menengah Pertama, 50 santri di Madrasah Aliyah, dan 8 santri tidak sekolah atau hanya mondok. Mereka semua tinggal atau mukim di pesantren. ●

## BENTUK SATGAS PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PONPES

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren menjadi sorotan publik, menyusul mencuatnya dugaan kasus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang melibatkan puluhan santriwati. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, sementara penanganannya masih berjalan lambat dan belum memberikan efek jera.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin menegaskan perlunya kerja kolektif lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh.

“Ini sudah bukan lagi kasus per kasus, tapi menunjukkan pola yang berulang dan sistemik. Negara tidak boleh kalah oleh pelaku kejahatan seksual, apalagi yang terjadi di ruang pendidikan seperti pesantren. Kita butuh langkah luar biasa,” kata Azis.

Ia mendorong kolaborasi konkret antara Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menangani sekaligus mencegah kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

“Selama ini penanganannya terkesan parsial dan lambat. Korban seringkali tidak mendapat perlindungan maksimal, sementara proses hukum berjalan panjang. Ini harus diubah dengan pendekatan yang lebih terintegrasi,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan Satgas juga akan berfungsi sebagai instrumen pencegahan melalui pengawasan, edukasi, serta pembentukan sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh para santri.

“Kalau kita serius ingin menghilangkan kasus ini, maka tidak cukup hanya reaktif ketika kasus muncul. Harus ada sistem pencegahan yang kuat, pengawasan ketat, dan edukasi yang masif di lingkungan pesantren,” tegas Azis.

Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan setiap anak, termasuk para santri, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

“Pesantren adalah tempat menimba ilmu dan membangun akhlak, bukan ruang yang justru melahirkan trauma. Kita harus pastikan lingkungan pendidikan benar-benar aman. Ini soal masa depan generasi bangsa,” pungkasnya.

DPR juga akan memanggil Kementerian Agama (Kemenag) hingga Direktorat Jenderal Pesantren terkait kasus dugaan pencabulan santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pemanggilan akan dilakukan pekan depan setelah masa reses berakhir. DPR ingin memastikan penanganan kasus berjalan serius dan menyeluruh.

“DPR memanggil semua pihak yang berkaitan. Pada awal sidang nanti bersama pimpinan Komisi VIII dan Komisi X akan membahas ini semua,” katanya.

Cucun menilai kasus tersebut mencoreng dunia pendidikan pesantren, terlebih terjadi tidak lama setelah pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kemenag. Menurutnya, pembentukan direktorat tersebut seharusnya diikuti peningkatan kualitas pengawasan dan pendidikan di lingkungan pesantren.

Sebelumnya, ratusan massa yang berasal dari Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) menggeruduk Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Aksi ini merupakan puncak kegeraman warga atas dugaan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan pengasuh pesantren tersebut terhadap puluhan santriwatinya.

Sementara itu, Kemenag Pati sudah menyatakan telah menginstruksikan penghentian penerimaan santri baru hingga mempertimbangkan pencabutan izin operasional lembaga tersebut. ●



## Denda Kehilangan KTP

# SOLUSI ATAU BUKTI GAGALNYA DIGITALISASI KEMENDAGRI?

Wacana pengenaan biaya cetak ulang kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga yang kehilangan dokumen tersebut memicu perdebatan luas.

D i satu sisi, pemerintah menilai langkah ini penting untuk mendorong tanggung jawab masyarakat sekaligus menekan beban anggaran negara. Namun di sisi lain, sejumlah pihak mempertanyakan relevansinya di tengah upaya percepatan digitalisasi administrasi kependudukan.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa tingginya angka kehilangan dokumen kependudukan menjadi salah satu alasan munculnya usulan tersebut.

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, ia menyebut laporan kehilangan e-KTP bisa mencapai puluhan ribu kasus setiap hari. Kondisi ini, menurutnya, berdampak langsung pada pembengkakan biaya pengadaan blanko yang selama ini ditanggung negara.

"Banyak warga kurang bertanggung jawab dalam menjaga dokumen kependudukan. Karena gratis, kehilangan menjadi hal yang dianggap sepele. Padahal ini menimbulkan beban biaya besar," ujarnya.

Meski sempat menuai polemik karena istilah "denda", Bima menegaskan bahwa yang dimaksud bukanlah sanksi penalti, melainkan biaya penggantian cetak ulang. Ia menjelaskan bahwa penerbitan pertama tetap gratis, sementara penggantian akibat kehilangan diusulkan dikenakan tarif tertentu sebagai

bentuk tanggung jawab administratif.

Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, anggaran pengadaan blanko e-KTP pada 2024-2025 mencapai sekitar Rp224-225 miliar untuk sekitar 22 juta keping, dengan harga rata-rata Rp10.187 per kartu.

"Jika angka kehilangan mencapai 1,5 juta kasus per tahun, tambahan beban anggaran bisa menyentuh Rp15 miliar hanya untuk penggantian dokumen yang hilang," jelasnya.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Teguh Setyabudi, menilai kebijakan ini perlu dipertimbang-

kan mengingat keterbatasan fiskal. Ia menekankan bahwa biaya yang diusulkan sejatinya merupakan pengganti material blanko, bukan bentuk hukuman.

Wacana ini muncul bersamaan dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pemerintah mengusulkan sejumlah perubahan strategis, antara lain penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal, perluasan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta pemberian dasar hukum bagi Kartu Identitas Anak (KIA).



Selain itu, pemerintah juga ingin menegaskan bahwa layanan administrasi kependudukan merupakan layanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen daerah dalam penganggaran dan perencanaan layanan publik berbasis data kependudukan.

Isu lain yang turut disorot adalah perlindungan data pribadi serta kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selama ini, koordinasi lintas lembaga kerap menjadi kendala dalam pengelolaan data kependudukan yang terintegrasi.

Di tengah wacana tersebut, kritik datang dari kalangan akademisi dan praktisi teknologi. Pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya menilai kebijakan itu justru mengaburkan persoalan utama, yakni belum optimalnya sistem identitas digital di Indonesia.

Menurutnya, ketergantungan pada kartu fisik menunjukkan bahwa integrasi data kependudukan belum berjalan maksimal. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dinilai belum sepenuhnya terhubung secara real time dengan berbagai layanan publik maupun sektor swasta.

"Masih banyak instansi yang meminta fotokopi KTP, padahal datanya sudah ada di sistem. Ini menunjukkan masalah interoperabilitas dan budaya birokrasi yang belum berubah," ujarnya.

Ia juga menyoroti belum adanya infrastruktur seperti API terbuka yang memungkinkan verifikasi identitas secara digital tanpa harus melihat kartu fisik. Kondisi ini membuat digitalisasi belum memberikan dampak signifikan dalam praktik pelayanan.

Sebagai perbandingan, negara seperti Estonia telah mengembangkan sistem identitas digital sejak 2007, di mana kartu fisik hanya menjadi salah satu opsi autentikasi. Sementara di Singapura, sistem Singpass memungkinkan akses ke ratusan layanan tanpa memerlukan dokumen fisik.

Dalam konteks tersebut, rencana

pengenaan biaya dinilai paradoksal. "Menghukum kehilangan kartu fisik, sementara alternatif digitalnya belum siap, adalah kebijakan yang tidak adil," tegas Alfons.

Dari sisi legislatif, anggota Komisi II DPR Ali Ahmad mengingatkan potensi munculnya praktik pungutan liar jika kebijakan ini diterapkan tanpa pengawasan ketat. Ia menilai masyarakat berpotensi mencari jalan pintas untuk menghindari prosedur resmi.

Selain itu, ia menekankan bahwa e-KTP merupakan akses utama warga terhadap layanan dasar seperti kesehatan, bantuan sosial, hingga perbankan. Karena itu, kebijakan tambahan biaya

"Digitalisasi bukan sekadar memindahkan data ke sistem elektronik, tetapi memastikan keterhubungan antarinstansi. Jika ini berjalan optimal, masyarakat tidak perlu dibebani prosedur berulang," jelasnya.

Ia menambahkan, inkonsistensi antara sistem digital dan praktik administrative seperti masih dimintanya fotokopi dokumen menunjukkan bahwa transformasi belum berjalan utuh.

Perdebatan mengenai biaya cetak ulang e-KTP pada akhirnya mencerminkan dilema yang lebih besar, antara kebutuhan efisiensi anggaran dan tuntutan modernisasi layanan publik. Di satu sisi, pemerintah berupaya mengurangi



berisiko menghambat kelompok rentan dalam mengakses haknya.

Ali juga menyoroti pentingnya membedakan penyebab kehilangan. Tidak semua kasus terjadi karena kelalaian, melainkan bisa disebabkan oleh pencurian, bencana, atau kecelakaan.

"Jika semua disamaratakan, ini akan melukai rasa keadilan," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan oleh Pakar Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Muhammad Eko Atmojo. Ia menilai wacana tersebut mencerminkan belum matangnya implementasi digitalisasi administrasi kependudukan.

Menurutnya, konsep e-KTP sejatinya berbasis integrasi data. Artinya, kehilangan kartu fisik tidak seharusnya menjadi persoalan besar karena data tetap tersimpan dalam sistem.

beban fiskal dan meningkatkan disiplin masyarakat.

Namun di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi bertabrakan dengan semangat digitalisasi yang tengah dibangun.

Sejumlah kalangan mendorong agar pemerintah memprioritaskan penguatan sistem identitas digital yang terintegrasi, sehingga ketergantungan pada kartu fisik dapat dikurangi secara bertahap. Dengan sistem yang solid, kehilangan dokumen tidak lagi menjadi persoalan krusial baik bagi warga maupun negara.

Dalam konteks ini, kebijakan apa pun yang diambil perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesiapan infrastruktur digital, serta dampaknya terhadap akses layanan publik. Tanpa itu, solusi yang ditawarkan berisiko menjadi beban baru alih-alih menjawab persoalan mendasar dalam tata kelola administrasi kependudukan di Indonesia. ●



## MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS

Usai masuk rumah sakit dan keluar lagi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menunaikan ibadah haji. Tanda-tanda baik untuk perekonomian Indonesia.

**T**oh di tengah kabar heboh Menkeu Purbaya masuk rumah sakit di akhir pekan, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro mengungkapkan kondisi sebenarnya. "Sampai saat ini Pak Menteri dalam keadaan sehat," kata Deni, Minggu, 3 Mei 2026.

Keesokan harinya, Senin, 4 Mei 2026, Purbaya pun muncul di kantornya. Kepada media, ia mengaku memang sempat datang ke rumah sakit. Namun, sambungnya, kunjungan itu hanya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin.

"Iya masuk rumah sakit, tapi keluar lagi. Check up biasa. Normal," ujar Purbaya di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 4 Mei 2026.

Menurut dia, banyak informasi keliru yang beredar terkait kondisi kesehatannya, termasuk kabar dirinya tidak bisa

bangkit dari tempat tidur hingga isu pemecatan. "Banyak gosip ya? Katanya udah enggak bisa bangkit dari tempat tidur, mau dipecat," ujar Menkeu dengan nada bercanda.

Lebih dari itu, pada Selasa, 5 Mei 2026, Menkeu Purbaya mengungkapkan secara serius kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 yang mencapai 5,61 persen (year-on-year/yoy). Ia menyebut angka pertumbuhan itu merupakan tanda Indonesia sanggup keluar dari jebakan pertumbuhan lima persen.

"Kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61 persen. Dibandingkan dengan Triwulan IV tahun lalu, pertumbuhannya lebih cepat dari 5,39 persen ke 5,61 persen. Ini menunjukkan kita bisa terlepas dari 'kutukan' pertumbuhan lima persen," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA Edisi

April 2026.

Jebakan pertumbuhan lima persen, sering juga disebut stagnasi ekonomi, berasal dari istilah middle income trap (perangkap pendapatan menengah) yang biasanya merujuk pada kondisi negara berkembang bagaikan terperangkap dalam angka pertumbuhan ekonomi yang moderat, sekitar lima persen, sehingga kurang memadai untuk naik peringkat menjadi negara maju. Istilah middle income trap diperkenalkan oleh ekonom Indermit Gill dan Homi Kharas dari Bank Dunia pada 2007.

Tantangannya adalah bagaimana keluar dari perangkap itu. Dalam hal ini Purbaya mengemukakan langkah kebijakan reformasi oleh pemerintah berdampak positif terhadap perekonomian. Toh ia mengakui tantangan dalam

Banyak gosip ya? Katanya udah enggak bisa bangkit dari tempat tidur, mau dipecat

jangka waktu dekat pun sudah menghangat: dinamika politik global yang meningkatkan ketidakpastian di luar kondisi domestik di dalam negeri.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Menkeu mengemukakan berfokus pada upaya memperbaiki kinerja domestik melalui dorongan terhadap berbagai mesin pertumbuhan ekonomi, misalnya memberikan dukungan kepada perusahaan berorientasi ekspor agar mereka lebih kompetitif di pasar global.

Menkeu juga mengungkapkan akan terus memantau pergerakan aktivitas ekonomi dan siap mengambil langkah intervensi agar pertumbuhan tetap terjaga. "Jangan khawatir, saya akan monitor terus data setiap hari. Pemerintah nggak takut dan ragu berinvestasi untuk menjaga laju ekonomi yang lebih cepat," kata Purbaya yang beberapa kali mengemukakan ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh hingga delapan persen per tahun.

Konfirmasi datang dari Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi terbaru triwulan 1-2026. "Ekonomi Indonesia pada triwulan 1-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y), salah satunya didorong oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga," ungkap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyananti, Selasa, 5 Mei 2026.

Ia juga mengemukakan, perekonomian sejumlah negara mitra dagang utama juga mencatat pertumbuhan yang positif pada triwulan 1-2026, antara lain: Vietnam 7,8 persen, Malaysia 5,3 persen, Tiongkok 5,0 persen, Singapura 4,6 persen, Korea Selatan 3,6 persen, dan Amerika Serikat 2,7 persen.

Menurut dia, di tengah dinamika geopolitik global, ekonomi Indonesia tetap resilien dan mencatat pertumbuhan yang solid. Amalia menjelaskan, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yaitu 2,94 persen. Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan 1-2026 utamanya didorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan Hari Besar Keagamaan (Nyepi dan Idul Fitri), berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi, serta berbagai stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi seperti diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada

level 4,75 persen sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meski begitu, wakil rakyat dari Komisi XI DPR Marwan Cik Asan mengingatkan, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya berkualitas. Dia mencontohkan masih dominannya sektor tenaga kerja informal yang mencapai sekitar 59 persen dari total tenaga kerja nasional. "Artinya, sebagian besar pekerja kita masih menghadapi produktivitas rendah, pendapatan tidak stabil, dan minim perlindungan sosial. Ini menjadi pekerjaan rumah besar," ujar wakil rakyat dari Fraksi Partai Demokrat itu pada Rabu, 6 Mei 2026.

Selain itu dalam banyak analisis sisi moneter, nilai mata uang rupiah justru melemah hingga menembus kisaran Rp17.400 per dolar USD, sedangkan in-

buhan ekonomi Indonesia 5,61 persen (year on year) pada kuartal I 2026 sebagai sinyal positif di tengah ketidakpastian global. Hal ini juga menandakan fondasi perekonomian Tanah Air kuat. "Capaian ini patut diapresiasi dan menunjukkan fondasi ekonomi domestik yang relatif kuat. Dengan tren ini, target pertumbuhan APBN 2026 sebesar 5,4 persen menjadi semakin realistis," ujarnya.

Nah, fondasi perekonomian yang masih sehat dan kuat itu agaknya membuat Menkeu Purbaya dapat tenang dan khusyu merencanakan terbang dari Jakarta pada Kamis, 21 Mei 2026 untuk menunaikan ibadah haji di Makkah, Arab Saudi. Sepulang berhaji, amanat pengelolaan fiskal menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas sudah



vestor asing masih terus mencatat jual bersih besar di pasar domestik. Kondisi ini menimbulkan tantangan domestik baru agar pertumbuhan ekonomi tinggi benar-benar berkualitas yang mendorong penguatan ekonomi riil masyarakat.

Toh Marwan mengapresiasi pertum-

menanti lagi.

O ya, doa yang selama ini beberapa kali terucap pun akan Menkeu Purbaya panjatkan di depan ka'bah. "Doa supaya kita ekonominya bagus terus, pertumbuhan makin kuat, tiga tahun lagi kita kaya bareng-bareng," ungkapnya Pak Menkeu, Rabu, 6 Mei 2025. ●



# DESTINASI AMAN, WISATAWAN NYAMAN

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mulai memperkuat fondasi keamanan sektor pariwisata nasional dengan menyiapkan Program Keselamatan Wisata 2026 yang akan diterapkan di 38 provinsi di Indonesia.

Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan standar keamanan destinasi sekaligus memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.

Langkah tersebut dilakukan di tengah perubahan tren wisata dunia. Wisatawan kini tidak lagi hanya mempertimbangkan keindahan alam atau popularitas destinasi, melainkan juga aspek keamanan, kenyamanan, kualitas layanan, hingga kesiapan penanganan keadaan darurat.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini Mohamad Paham, mengatakan keselamatan wisata saat ini menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kepercayaan wisatawan terhadap sebuah destinasi.

"Tantangan kita tidak lagi sebatas menghadirkan destinasi yang indah, tetapi memastikan wisatawan memperoleh pengalaman yang aman, nyaman, dan berkualitas. Isu keselamatan kini menjadi faktor penting dalam daya saing pariwisata," ujar Martini dalam keterangannya di Jakarta.

Menurut dia, sektor pariwisata global

sedang mengalami pergeseran paradigma. Wisatawan modern lebih selektif dalam menentukan tujuan perjalanan dan menempatkan faktor keamanan sebagai bagian penting dari pengalaman wisata.

Karena itu, melalui skema tugas pembantuan, Kemenpar menjalankan Program Pelatihan Peningkatan Keselamatan Wisata yang difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata, terutama terkait mitigasi risiko, penanganan kondisi darurat, serta penerapan standar operasional keselamatan di lapangan.

## Standarisasi Keamanan Destinasi

Program tersebut dirancang untuk menciptakan keseragaman prosedur keselamatan di berbagai destinasi wisata Indonesia. "Pemerintah menilai standar keamanan yang seragam akan meningkatkan kepercayaan wisatawan domestik maupun mancanegara," jelasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia terus mengalami pemulihan pascapandemi.



Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan asing tercatat mencapai lebih dari 13 juta kunjungan, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan mobilitas wisata itu diikuti dengan kebutuhan penguatan sistem keamanan destinasi, termasuk transportasi wisata, aktivitas wisata alam, hingga kesiapan penanganan bencana.

Indonesia sendiri memiliki karakteristik destinasi yang beragam, mulai dari wisata bahari, pegunungan, geopark, wisata petualangan, hingga kawasan konservasi. Kondisi tersebut membuat standar mitigasi risiko dan kesiapsiagaan menjadi kebutuhan mendesak.

Martini menegaskan keberhasilan Program Keselamatan Wisata 2026 tidak dapat dilakukan pemerintah pusat secara sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan dukungan pemerintah daerah.

"Kami mengharapkan peran aktif seluruh kepala dinas pariwisata sebagai inisiator di wilayah masing-masing. Keselamatan wisata bukan tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama," katanya.

Selain pelatihan teknis, program tersebut juga diarahkan untuk membangun budaya keselamatan di lingkungan industri pariwisata melalui pembinaan SDM yang memahami prinsip keselamatan kerja, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.

Kemenpar menilai profesionalisme layanan wisata akan semakin menentukan citra Indonesia sebagai destinasi yang aman dan berkualitas di mata dunia.

Dalam kuliah umum bertajuk "Keselamatan Wisata" di Politeknik Pariwisata Makassar, Martini menegaskan bahwa keselamatan wisata bukan sekadar pelengkap aktivitas perjalanan, melainkan fondasi utama pembangunan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

"Keselamatan bukan sekadar pelengkap dalam aktivitas wisata, melainkan prasyarat mutlak untuk mewujudkan destinasi yang tangguh, berdaya saing, dan dipercaya wisatawan," ujarnya.

Ia menjelaskan, risiko dalam sektor pariwisata dapat muncul dari berbagai faktor, mulai dari cuaca ekstrem, kondisi geografis, faktor teknis operasional, hingga kesalahan manusia atau human error.

Karena itu, seluruh pemangku kepentingan dinilai harus terlibat aktif dalam menciptakan standar keamanan wisata yang kuat, termasuk pelaku usaha, asosiasi industri, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga wisatawan itu sendiri.

Menurut Martini, wisatawan modern juga dituntut menjadi wisatawan yang bertanggung jawab. Salah satunya dengan memastikan kesiapan pribadi

pun dapat ditinggalkan jika tidak mampu memberikan rasa aman," kata Fadjar.

Ia menegaskan mahasiswa pariwisata memiliki peran strategis sebagai generasi penerus industri yang akan menentukan arah pengembangan pariwisata Indonesia di masa depan.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Kecelakaan Transportasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan,



saat melakukan perjalanan dan memilih layanan wisata yang memiliki izin resmi serta sertifikasi keselamatan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan, terutama pada sektor transportasi wisata dan aktivitas wisata berisiko tinggi seperti pendakian gunung, wisata bahari, arung jeram, hingga wisata petualangan.

Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenpar, Fadjar Hutomo, menilai keselamatan menjadi faktor utama yang menentukan keberlanjutan sebuah destinasi wisata.

"Destinasi yang paling indah sekali-

Jumaril, menyebut budaya keselamatan harus ditanamkan sejak dini kepada calon pelaku industri pariwisata.

"Mahasiswa Poltekpar yang kelak menjadi pemangku kebijakan harus menjadi role model dalam menanamkan budaya keselamatan sejak dini dan mampu memengaruhi lingkungan sekitarnya untuk berbudaya safety," ujarnya.

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kemenpar, Ika Kusuma Permana Sari, mengatakan kesiapan pemerintah daerah menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi program di lapangan. ●



# SEMUA IKUT TERGUNCANG DI INSIDEN KA BEKASI TIMUR

Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah melakukan simulasi terhadap sistem persinyalan kereta api sebagai bagian dari investigasi pasca insiden kecelakaan kereta rel listrik (KRL) dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Kementerian Perhubungan mendukung penuh proses investigasi dan simulasi yang dilakukan KNKT.

**M**enteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan simulasi persinyalan KNKT dilakukan untuk memahami kemungkinan penyebab teknis, khususnya terkait fungsi dan respons sistem persinyalan saat kejadian.

"Hasil simulasi menjadi bahan penting dalam mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan serta potensi kelemahan system," tutur Menhub Dudy

KNKT sendiri telah menekankan bahwa proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berbasis data lapangan. Untuk itu, juga Kemenhub berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil investigasi guna meningkatkan keselamatan operasional perkeretaapian.

"Kami tekankan kembali bahwa aspek keselamatan sebagai prioritas utama," lanjut Menhub Dudy.



Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengimbau masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk menunggu investasi KNKT yang akan memberikan hasil secara menyeluruh terkait penyebab terjadinya kecelakaan hingga rekomendasi keselamatan.

KNKT masih melakukan proses investigasi terhadap kecelakaan kereta listrik (KRL) dengan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi pada Senin, 27 April 2026 lalu.

"Proses investigasi KNKT dilakukan secara menyeluruh, objektif, dengan mengumpulkan fakta dan informasi di lapangan, mempertimbangkan berbagai hal serta analisis komprehensif. Untuk itu, mari kita sama-sama hormati proses tersebut dan tunggu hasil investigasi untuk mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan," papar

Menhub.

## Periksa 36 Saksi

Sementara Polda Metro Jaya telah memeriksa 36 saksi kasus kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur.

"Saksi yang sudah diperiksa sampai dengan saat ini, penyidik telah meminta keterangan dari 36 orang saksi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

Puluhan saksi yang telah dimintai keterangan itu oleh polisi itu antara lain pelapor Luga Cardo Christian Sipayung dan dua saksi dalam laporan polisi yakni Rendi Ebenzer serta Farrel Ardan.

Selanjutnya, 11 korban kecelakaan yang telah diperiksa yakni Hendro Efendi Munthe, Heri Septiansah, Ester Rajaguguk, Dinasti Kusuma Wardani,

Dwi Apriliana, Siti Maryam, Nuryati, Vira Oktaviani Putri, Ayu Priandari, Suwanto dan Hendro Efendi.

Kemudian juga ada delapan saksi yang berada di lokasi kejadian. Mereka di antaranya, Udin T selaku penjaga palang pintu perlintasan, Iwan Setiawan selaku penjaga warung di samping perlintasan rel, Aris Harpan, Lukman Nurhakim dan Prabu Anton Fortalisty selaku penjaga penitipan sepeda motor di sekitar lokasi kejadian.

Polisi juga telah memeriksa Richard Rudolf Passelima, selaku pengemudi taksi Green SM dan Abrar, selaku staf operasional Depot Bekasi milik Taxi Green SM.

Selain itu, pihak operasional perkera-  
taapian juga telah dimintai keterangan. Mereka adalah Hendrik selaku Kepala Pusat Pengendali, Mukhlis selaku Pengatur Perjalanan Kereta Api, Rendy selaku Petugas Sinyal, Ading selaku masinis kereta rel listrik, Nofiandi selaku masinis kereta api Argo Bromo, dan lainnya.

"Saksi dari instansi terkait Kristian Galuh Eko Prasetyo selaku saksi dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Utomo Harmawan selaku Kepala Subdirektorat Angkutan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Ridwan Muarief selaku saksi dari Dinas Bina Marga Kota Bekasi dan saksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bekasi," tutur Budi.

Dia menerangkan penyidik juga akan melakukan klarifikasi dan wawancara terhadap saksi lain terkait kejadian. Selain itu, akan mengirim surat kedua dan permohonan menghadirkan saksi kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

"Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi, mengajukan permohonan penyitaan barang bukti, mengajukan permohonan pembuatan gambar sketsa tempat kejadian perkara, menghadirkan saksi ahli dari Pusat Laboratorium Forensik, dan menindaklanjuti hasil visum korban dari rumah sakit," ucap dia.

Kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur terjadi pada Senin (27/4) malam. Insiden ini menyebabkan 16 orang meninggal dunia dan 90 orang lainnya mengalami luka-luka.

Insiden itu dipicu mogoknya taksi

Green SM di tengah perlintasan sebidang akibat gangguan sistem kelistrikan. Mobil tersebut kemudian dihantam KRL yang melintas.

Imbas dari kecelakaan pertama, satu rangkaian KRL tujuan Cikarang berhenti darurat di Stasiun Bekasi Timur

Dalam posisi berhenti tersebut, rangkaian KRL justru ditabrak dari belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek hingga menyebabkan gerbong belakang khusus wanita ringsek dan merenggut belasan nyawa.

### 172 Perlintasan Rel KA Akan Ditutup

Berpijak dari kasus kecelakaan ini PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan memperbaiki sejumlah perlintasan sebidang dan menutup sebagiannya untuk mene-

kan angka kecelakaan. Sebanyak 172 perlintasan akan ditutup.

"Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang, dengan 1.810 titik menjadi fokus penanganan. Dari jumlah tersebut, 172 perlintasan diarahkan untuk penutupan dan 1.638 lainnya ditingkatkan aspek keselamatannya secara bertahap," tulis KAI.

KAI menegaskan langkah ini menjadi urgensi pihaknya. KAI mencatat ada sebanyak 948 korban kecelakaan di perlintasan ilegal dalam rentang 2023-2026.

"Data juga menunjukkan urgensi. Dalam periode 2023-2026, tercatat 948 korban kecelakaan, dengan sekitar 80% terjadi di perlintasan yang belum terjaga," katanya. ●





# KARDING NAIK KELAS, DARI DPR KE PUCUK PIMPINAN BARANTIN



Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin).



### Naik Kelas

Dari DPR ke puncak pimpinan Barantin



### Amanah Baru

Memimpin Badan Karantina Nasional



### Untuk Indonesia

Karantina kuat, Indonesia maju

Penunjukan ini menandai babak baru kepemimpinan lembaga strategis yang berperan dalam menjaga keamanan hayati serta pengawasan lalu lintas komoditas pertanian dan perikanan.

Karding menggantikan Sahat Manaoar Panggabean yang sebelumnya memimpin lembaga tersebut.

Abdul Kadir Karding lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, pada 25 Maret 1973. Ia tumbuh dan menyelesaikan pendidikan menengah di Palu sebelum melanjutkan studi ke Universitas Diponegoro, Semarang.

Di kampus ini, Karding menempuh pendidikan sarjana di bidang perikanan, lalu melanjutkan studi magister di bidang administrasi publik. Sejak masa kuliah, ia dikenal aktif berorganisasi, termasuk menjabat Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan serta memimpin Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Aktivitas organisasi tersebut menjadi fondasi awal kariernya sebelum terjun ke dunia politik nasional.

Nama Karding bukan figur baru dalam politik Indonesia. Kariernya dimulai dari tingkat daerah saat terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Tengah pada Pemilu 1999. Di tingkat provinsi, ia sempat menjabat Ketua Komisi E, Ketua Fraksi PKB, hingga Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah.

Kariernya berlanjut ke tingkat nasional setelah terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah pada Pemilu 2009. Sejak itu, ia mengemban amanah sebagai legislator selama tiga periode.



Di parlemen, Karding pernah memegang sejumlah posisi penting, antara lain Ketua Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan sosial, keagamaan, dan kebencanaan. Ia juga aktif di Komisi III, Komisi VII, serta Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

Di lingkungan partai, ia dipercaya menjabat Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2014-2019.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Baranting, Karding juga sempat masuk kabinet sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia periode 2024-2025 dalam pemerintahan Presiden Prabowo.

Selain aktif di politik, Karding juga berkiper dalam organisasi alumni. Ia dipercaya sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA UN-DIP) sejak 2022.

Kiperah ini memperlihatkan konsistensinya dalam membangun jejaring serta kontribusi di luar jabatan formal pemerintahan. ●

### RIWAYAT JABATAN

1	Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2024-2025
2	Sekretaris Jenderal DPP PKB 2014-2019
3	Ketua Fraksi MPR Partai Kebangkitan Bangsa 2014-2019
4	Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI 2014-2019
5	Kapoksi Komisi III DPR RI 2014-2019
6	Anggota Komisi III DPR RI 2014-2019
7	Anggota Komisi VII DPR RI 2019-2024
8	Ketua Umum IKA UN-DIP
9	Wakil Ketua Badan Legislasi atau Baleg DPR RI 2014-2015
10	Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2009-2014
11	Sekretaris Fraksi MPR Partai Kebangkitan Bangsa 2009-2014
12	Ketua Komisi VIII DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa 2009-2012
13	Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah 2001-2006
14	Executive Committee Young Liberal Democratic Asia 2003-2009
15	Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah 2004-2009
16	Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah 2003-2004
17	Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah 2001-2003
18	Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah 1999-2001
19	Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII 1995-1996
20	Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro 1994-1995



# QODARI PEGANG KENDALI KOMUNIKASI PEMERINTAH DI ERA PRABOWO

Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet pada Senin, 27 April 2026, di Istana Kepresidenan, Jakarta.



Memperkuat komunikasi pemerintah yang efektif dan terarah



Membangun kepercayaan publik melalui informasi yang akurat dan terbuka



Mendukung visi Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045



## QODARI

KEPALA KOMUNIKASI PEMERINTAH

“Komunikasi yang baik adalah jembatan antara pemerintah dan rakyat untuk Indonesia yang lebih kuat.”

Dalam reshuffle tersebut, nama Muhammad Qodari resmi ditunjuk sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, posisi strategis yang berperan mengelola penyampaian kebijakan dan program negara kepada publik.

Penunjukan ini menandai langkah baru pemerintah dalam memperkuat komunikasi publik, terutama di tengah tuntutan transparansi dan kecepatan informasi. Qodari diharapkan mampu menjembatani kebijakan pemerintah dengan pemahaman masyarakat secara lebih efektif.

### Peran Baru di Pusat Komunikasi Negara

Dalam jabatan barunya, Qodari bertanggung jawab mengoordinasikan narasi komunikasi pemerintah, termasuk menjelaskan program prioritas Presiden kepada masyarakat. Posisi ini menjadi krusial dalam memastikan pesan pemer-

### Profil Muhammad Qodari

Lahir di Palembang pada 15 Oktober 1973, Qodari dikenal luas sebagai analis politik dengan rekam jejak panjang di dunia riset. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Indonesia dengan fokus Psikologi Sosial.

Pendidikan lanjut ditempuh di University of Essex, Inggris, dengan konsentrasi pada perilaku politik. Gelar doktor Ilmu Politik kemudian diraih dari Universitas Gadjah Mada pada 2016 dengan predikat sangat memuaskan.

Disertasinya mengangkat tema perilaku pemilih dalam konteks “split-ticket voting” pada Pemilu 2014, yang menjadi salah satu referensi penting dalam kajian politik elektoral di Indonesia.

### Karier Panjang di Dunia Riset

Sebelum terjun ke pemerintahan, Qodari dikenal sebagai pendiri lembaga survei Indo Barometer pada 2006. Lem-

turut ditempa saat menjadi peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Institut Studi Arus Informasi (ISAI).

Selain itu, Qodari aktif sebagai kolumnis dan kerap tampil sebagai narasumber di berbagai media nasional, membahas isu politik, pemilu, hingga kebijakan publik.

### Dari Analisis ke Lingkaran Kekuasaan

Masuknya Qodari ke pemerintahan dimulai saat ia dilantik sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan pada 21 Oktober 2024. Kariernya terus menanjak hingga dipercaya memimpin KSP pada September 2025.

Di lembaga tersebut, ia berperan dalam mengawal program prioritas nasional sekaligus mengelola komunikasi politik pemerintah. Pengalaman ini menjadi modal penting dalam menjalankan tugas barunya di Badan Komunikasi



intah tersampaikan secara utuh, akurat, dan mudah dipahami.

Sebelumnya, Qodari menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), lembaga yang memiliki fungsi pengendalian program prioritas nasional sekaligus pengelolaan isu strategis.

baga ini rutin merilis survei terkait opini publik dan dinamika politik nasional.

Ia juga pernah menjabat Direktur Riset di Lembaga Survei Indonesia (2003-2005) serta Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (2005-2006). Pengalaman risetnya

### RIWAYAT JABATAN

- Karier/jabatan**
- Kepala Kantor Staf Kepresidenan : 2025-27 April 2026
  - Wakil Kepala Staf Kepresidenan : 2024-2025
  - Direktur Eksekutif Indo Barometer : Sejak 2006
  - Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia : 2005-2006
  - Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia : 2003-2005
  - Chief Editor Majalah Kandidat : Campaign and Election Magazine
  - Peneliti Center for Strategic and International Studies atau CSIS : 2002-2003
  - Kolumnis dan pengamat politik : Sejak 1999
  - Peneliti Institut Studi Arus Informasi atau ISAI : 1999-2001

Pemerintah.

Penunjukan Qodari dinilai sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat komunikasi yang lebih terarah dan responsif. Tantangan ke depan tidak hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik di tengah arus informasi yang cepat dan dinamis.

Dengan latar belakang riset dan pengalaman di lingkaran pemerintahan, Qodari diharapkan mampu menghadirkan pendekatan komunikasi yang berbasis data sekaligus adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. ●

# BANYAK CELAH KORUPSI DI PROGRAM MBG

Jenderal Purn Dudung Abdurachman kini dipercaya menjabat sebagai kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan M Qodari.



## SOROTAN PROGRAM MBG

Jenderal Purn Dudung menyoroti banyaknya celah korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).



## POTENSI PENYIMPANGAN

Mulai dari pengadaan bahan makanan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan perlu diperketat.



## KOMITMEN PERBAIKAN

Sebagai Kepala KSP, ia berkomitmen memperkuat tata kelola dan mengawal program agar tepat sasaran dan bebas korupsi.



*Kita harus menutup setiap celah yang berpotensi disalahgunakan. Program baik seperti MBG harus dijalankan dengan **transparan dan akuntabel**.*

– Jenderal Purn Dudung Abdurachman  
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP)



Penunjukan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden terbaru dan diresmikan dalam prosesi pelantikan di Istana Negara. Dengan penugasan ini, posisi kepala KSP kembali diisi oleh figur berlatar belakang militer. Dalam prosesi tersebut, Dudung mengucapkan sumpah jabatan yang terlebih dahulu dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu tugasnya yang mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto serta program strategis lainnya.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa banyak celah untuk korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski tak membeberkan secara terperinci, tapi disebutkan salah satunya jual beli titik satuan pelayanan pemenu-

<b>Jabatan Jenderal (Purn)</b>
<b>TNI Dudung Abdurachman Saat Ini :</b>
<b>Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dilantik 27 April 2026</b>
<b>Ketua Umum Indonesia Football 7 Federation (IF7F)</b>
<b>Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD): Menjabat pada 17 November 2021 - 25 Oktober 2023 (Era Jokowi)</b>
<b>Ketua Timnas Mini Soccer Indonesia</b>

han gizi (SPPG) atau dapur MBG.

“Banyak celahnya, banyak celahnya. Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual beli titik. Ya itu ada itu, salah satunya ya. Nanti akan saya lihat itu jual beli titik,” kata Dudung.

Dudung menegaskan KSP akan mengecek langsung ke lapangan untuk memeriksa potensi ketimpangan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan makanan

“Nanti itu juga akan ada yang kita temukan. Jadi kalau misalnya ditemukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya, nanti akan saya cek langsung di lapangan,” lanjut Dudung.

Mantan KSAD itu menyatakan bahwa pihaknya juga akan mengawasi pelaksanaan program prioritas lainnya, seperti Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, hingga Kopdes Merah Putih.

“Ya, Presiden mengarahkan kepada saya, ‘Pak Dudung, coba dicek’. Karena program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden, ya salah satunya MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, dan itu nanti akan kita cek. Maka saya akan mengaktifkan kembali berkolaborasi dengan stakeholder terkait,” tuturnya.

“Minta doanya lah. Nanti dan kalau saya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan saja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, ya. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” imbuh Dudung.

### Dari Loper Koran Hingga Jadi Jenderal

Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman meniti karier militer dari bawah,



pernah menjadi loper koran semasa kecil hingga akhirnya menjabat posisi penting seperti Gubernur Akmil, Pangdam Jaya, Pangkostrad, dan KSAD.

Masa kecil Dudung dilalui dengan tidak mudah. Ayahnya wafat pada 1981. Saat itu ia masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Lantaran kehilangan tulang punggung keluarga, maka Dudung ikut membantu sang ibu mencari nafkah. Ia bekerja menjadi loper koran. Setiap hari harus bangun pukul 04.00 WIB. Ia mengantar koran ke rumah pelanggan dengan mengayuh sepeda.

Kemudian pada pukul 08.00 WIB, ia membantu ibunya menjajakan kue klepon di lingkungan Kodam III/Siliwangi, Jawa Barat. Dudung mengaku sengaja memilih sekolah di siang hari agar bisa membantu ibunya.

Ia kemudian masuk ke Akademi Militer (Akmil) dan lulus tahun 1988. Ia lulus

dengan pangkat Letnan Dua. Begitu lulus, ia kali pertama diterjunkan bertugas di Dili, Timor Timur, pada 1988.

Karier Dudung di bidang militer terbelang melesat. Ia pernah menjabat menjadi Aspers Kasdam VII/Wirabuana pada 2010. Ia lalu diangkat menjadi Danrindam II/Sriwijaya.

Lalu pada 2015, Dudung dipromosikan sebagai Wagub Akmil hingga 2016. Jenderal bintang dua itu menjadi kemudian diangkat menjadi staf khusus KSAD dan Waaster KSAD. Pada 2018, Mayjen Dudung dipromosikan menjadi Gubernur Akmil.

Kemudian, pada 27 Juli 2020, Dudung diangkat menjadi Panglima Kodam Jaya yang berkedudukan di Jakarta. Pada Mei 2021 lalu, Dudung sempat dipuji Presiden Jokowi karena tingkat keterisian di Wisma Atlet menurun drastis. Ia

kemudian diangkat menjadi Pangkostrad oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Mei 2021.

Dudung juga diangkat menjadi KSAD pada 17 November 2021 hingga Oktober 2023. Kemudian, dia diangkat menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional pada 21 Oktober 2024.

### Dijuluki Jenderal Baliho

Salah satu yang menyebabkan nama Dudung pada 2020 disorot karena mengancam hendak membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Padahal, sebagai prajurit TNI, ia tak memiliki kewenangan itu. Tetapi, sikap tegas Dudung terhadap FPI menuai pujian sejumlah pihak.

Aksi anak buah Dudung menurunkan spanduk atau baliho bergambar Rizieq Shihab sempat viral di media sosial. Dudung pun mengakui penurunan baliho itu adalah perintahnya. Hingga ia sempat dijuluki sebagai Jenderal Baliho. ●

# Mohammad Jumhur Hidayat

## TOKOH PERGERAKAN YANG BERADA DI TAMPUK KEKUASAAN

Mohammad Jumhur Hidayat telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada hari Senin, 27 April 2026.

“  
Komunikasi yang baik  
adalah jembatan antara  
pemerintah dan rakyat  
untuk Indonesia  
yang lebih kuat. ”



Memperkuat komunikasi pemerintah yang efektif dan terarah



Membangun kepercayaan publik melalui informasi yang akurat dan terbuka



Mendukung visi Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045

### PERJALANAN DAN DEDIKASI



Pernah menjadi sorotan publik karena rekam jejaknya sebagai aktivis yang pernah dipenjara namun kini berada di tampuk kekuasaan.



Menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam Kabinet Merah Putih periode 2022-2027.



Aktif di berbagai posisi strategis dan dipercaya sebagai tokoh buruh yang mewakili suara rakyat di kabinet.

**BERSAMA RAKYAT,  
UNTUK LINGKUNGAN YANG LESTARI  
DAN INDONESIA YANG MAJU**

Pelantikannya menjadi sorotan publik karena rekam jejaknya sebagai aktivis yang pernah dipenjara namun kini berada di tampuk kekuasaan.

Jumhur Hidayat menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih jilid 5. Ia menggantikan Hanif Faisol Nurofiq, yang kini ditugaskan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Ia dikenal sebagai tokoh buruh dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) periode 2022-2027.

Setelah dilantik, Jumhur menyatakan akan fokus pada pengelolaan sampah dan ingin menjadikan isu lingkungan hidup sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari masyarakat.

Pelantikan ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh aktivis lain seperti Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan yang mengantarkannya ke Istana Negara. Mereka yakin masuknya Jumhur menjadi energi besar bagi Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan menilai masuknya Jumhur Hidayat ke dalam kabinet sebagai langkah tepat Prabowo. Value aktivis dan pimpinan buruh dengan enam juta anggota itu setara dengan 10 menteri.

“Reshuffle kabinet yang dilakukan pada 27 April lalu merupakan langkah konsolidasi kekuasaan Prabowo. Tujuannya sekaligus untuk optimalisasi kinerja Kabinet,” ujar Syahganda di Jakarta.

Ia menyebut, sejak awal masa kepemimpinannya, Prabowo menyadari tantangan besar yang dihadapi pemerintahannya. Ia pun menyampaikan, Prabowo kerap memberi sinyal soal beratnya kondisi yang dihadapi, termasuk dalam konteks tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi, baik di dalam negeri maupun global.

Masuknya Jumhur Hidayat diyakini bakal mengimbangi kekuatan tersebut. Dalam posisi sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Syahganda menilai Jumhur akan berperan signifikan dalam struktur kabinet baru.

“Satu kepala Jumhur setara 10 menteri peninggalan Jokowi,” kata Syahganda.

Sementara aktivis sekaligus penga-

mat politik Rocky Gerung mengaku siap membantu sahabatnya, Jumhur Hidayat yang dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup (LH).

Rocky bahkan menghadiri pelantikan Jumhur Hidayat di kantor Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Alasan Rocky Gerung tidak segan membantu Jumhur yaitu agar Kabinet Merah Putih dapat berjalan seimbang.

“Kita ingin bantu Jumhur supaya ada kesempatan untuk bikin balancing di dalam kabinet, itu intinya,” kata Rocky.

“Kita bikin janji mereka yang kita utus ke dalam harus melapor yang di luar,” imbuhnya.

Menurut Rocky, pelantikan Jumhur

gat berkuasa sebetulnya di belakang dia,” ujarnya.

### Tokoh yang Tumbuh dari Rahim Pergerakan

Dua kali masuk penjara, bukan berarti akhir pengabdian pada negara. Jumhur Hidayat menjadi legenda hidup. Ia tokoh pergerakan yang meniti duri di lapangan aksi.

Bolak-balik mendekam dalam penjara, tokoh ini tetap menjadi salah satu sosok kontroversial yang kemudian dipercaya menjadi Menteri Lingkungan Hidup Kabinet Merah-Putih.

Jumhur Hidayat adalah contoh figur yang tumbuh dari rahim gerakan, bu-



“

**Kita bikin janji mereka yang kita utus ke dalam harus melapor yang di luar”**

Hidayat sebagai Menteri LH merupakan peristiwa politik.

Pasalnya, dalam reshuffle kabinet tersebut, hanya Jumhur Hidayat yang dilantik menjadi Menteri LH, menggantikan Hanif Faisol Nurofiq.

“Anda bayangkan ini pergantian kabinet hanya satu orang. Menterinya yang diganti cuma Jumhur. Itu peristiwa politik dan yang diganti seorang yang san-

kan semata dari birokrasi. Ia telah lama dikenal sebagai tokoh buruh senior dan aktivis sosial yang kerap berada di garis depan dalam berbagai isu kebijakan publik, terutama yang menyangkut kesejahteraan tenaga kerja.

Mohammad Jumhur Hidayat, yang akrab disapa Jumhur, lahir di Bandung pada Februari 1968. Sejak masa mudanya, ia telah menunjukkan ketertarikan besar terhadap isu sosial dan politik.

Saat menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jumhur dikenal sebagai salah satu tokoh aktivis mahasiswa. Ia aktif memprakarsai dan memimpin berbagai aksi demonstrasi yang menentang rezim militer Indonesia.

Akibat keterlibatannya dalam aksi menentang kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil, termasuk perampasan tanah milik petani kecil, pada tahun 1989 ia dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. ●

# DARI ISTANA KEMBALI KE ISTANA

Menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office, PCO) di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo pada 2024, Hasan Nasbi sempat mundur dari Istana pada 2025. Toh pada akhir **April 2026** ia kembali, dan duduk sebagai **Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi**.

“

KOMUNIKASI  
YANG BAIK  
ADALAH JEMBATAN  
ANTARA PEMIMPIN  
DAN RAKYAT.

”



#### PERNAH MENJABAT

Kepala Kantor Komunikasi  
Kepresidenan (PCO)  
2024



#### KEMBALI KE ISTANA

April 2026



#### MENJABAT SAAT INI

Penasihat Khusus Presiden  
Bidang Komunikasi

**D**ari rentang waktu 10 tahun terakhir, Hasan Nasbi, kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 11 Oktober 1979 ini menapaki jenjang karier dari bawah melalui dunia akademik dan media sebelum akhirnya bertransformasi menjadi salah satu tokoh komunikasi politik paling diperhitungkan di Indonesia. Langkah besarnya di panggung nasional melekat dengan pemahaman mendalam mengenai perilaku pemilih dan penguasaan strategi opini publik yang tajam.

Tercatat pada 2008 ia mendirikan

dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Hubungan eratnya dengan basis suka-relawan berlanjut ketika ia menginisiasi gerakan independen "Teman Ahok" pada tahun 2016 serta konsisten mengawal dukungan politik untuk Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.

Nah, menjelang Pemilu 2024, Hasan mengambil langkah politik strategis dengan merapat ke kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bertindak sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), ia menjadi perisai komunikasi efektif

impinan beralih ke tangan Presiden Prabowo Subianto dalam struktur awal Kabinet Merah Putih. Tugas utamanya kala itu adalah menyinkronkan seluruh narasi kebijakan istana agar tersampaikan secara satu pintu dan terstruktur kepada masyarakat.

Namun Hasan Nasbi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala PCO pada April 2025. Entah berkaitan atau tidak, pada Maret 2025, ia sempat menjawab pertanyaan soal teror kepala babi ke kantor media. "Sudah, dimasak aja," ucap Hasan kala itu.

Toh rekam jejak Hasan Nasbi mem-



**Hasan Nasbi melejit sebagai arsitek di balik layar yang kerap memetakan dinamika elektoral secara akurat melalui perhitungan cepat (quick count) dan riset perilaku pemilih.**



Cyrus Network, sebuah lembaga survei dan konsultan politik komersial. Lewat Cyrus Network, nama Hasan Nasbi melejit sebagai arsitek di balik layar yang kerap memetakan dinamika elektoral secara akurat melalui perhitungan cepat (quick count) dan riset perilaku pemilih. Kehadiran lembaga ini mengukuhkan posisinya sebagai konsultan politik papan atas yang diperhitungkan oleh berbagai elite partai.

Hasan kian bersinar saat dirinya menjadi salah satu motor penggerak kemenangan pasangan Joko Widodo

dalam mengklarifikasi serangan politik sekaligus mengemas program-program unggulan pasangan tersebut ke ruang publik.

Dedikasi serta kelincahannya dalam berargumen di media massa turut berkontribusi mengantarkan kemenangan mutlak bagi pasangan Prabowo-Gibran. Dari sinilah Hasan kemudian dilantik sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office, PCO) pada 19 Agustus 2024 di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Posisi strategis ini terus ia pertahankan saat estafet kepem-

buktikan bahwa strategi komunikasi rancangannya memiliki daya pukul elektoral kuat di segmen pemilih terbesar generasi milenial dan kini Gen Z. Ini tak terlepas dari aktivitas di media sosial sehingga ia dikenal pula sebagai pengelola akun medsos Datuk Rajoangek.

Dengan perkembangan kecerdasan buatan dan algoritma di berbagai platform media sosial saat ini, rekam jejaknya di medsos bagaikan mendapat tantangan baru. Ia akan menghadapinya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. ●



Hanif Faisol Nurofiq  
**UNTUK  
KETAHANAN  
PANGAN,  
ENERGI, DAN  
LINGKUNGAN  
HIDUP**

Hanif Faisol Nurofiq bergeser menjadi Wakil Menko Bidang Pangan. Bagaimana duetnya dengan Menko Zulkifli Hasan?

“  
Membangun sinergi untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan.”  
”



**KETAHANAN PANGAN**

Memastikan pangan cukup, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat.



**ENERGI MANDIRI**

Mengelola sumber daya energi untuk kemandirian dan kesejahteraan.



**LINGKUNGAN HIDUP**

Menjaga kelestarian alam untuk generasi hari ini dan esok.

**B**erpengalaman sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di masa pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Hanif Faisol Nurofiq menjadi Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) di masa awal kabinet pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Posisinya berubah lagi seiring dengan pelantikannya sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, pada 21 Maret 1971, Hanif menempuh pendidikan tinggi bidang kehutanan di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk gelar sarjana dan magister, hingga meraih gelar Doktor di bidang Studi Lingkungan dari Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Ia meniti karir birokrasi di lingkungan Departemen Kehutanan melalui program ikatan dinas hingga duduk di jajaran kabinet pemerintah.

Pengalamannya sebagai Direktur Jenderal PKTL di Kementerian LHK menjadi bekal penting di kabinet. Sebagai Menteri Lingkungan Hidup, pada akhir Januari 2026, Hanif mengemukakan soal program pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di depan wakil rakyat dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI.

Nah, sejak Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Wakil Menko Pangan pada Senin, 27 April 2026, ia akan berada satu atap kantor dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Titik temu Hanif dan Zulhas adalah program PSEL, dengan catatan Menko Pangan juga menjabat sebagai Koordinator Pusat untuk program menangani limbah menjadi listrik (waste-to-energy) itu.

Sebagai birokrat handal di sektor lingkungan, Hanif memandang krisis sampah dari kacamata pembenahan hulu ke hilir. Perspektifnya menekankan pentingnya disiplin pemilahan sejak dari sumber rumah tangga agar menghasilkan sampah berkuali-

tas tinggi yang siap diproses secara teknologi. Tentu saja ini sejalan dengan kerisauan Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menugaskan Menko Zulhas sebagai Koordinator Pusat untuk Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) untuk mengeksekusi solusi berbasis hilirisasi limbah dalam skala masif.

Malah duet Zulhas-Hanif dapat men-

Zulhas menggunakan otoritasnya untuk memangkas birokrasi perizinan dan mempercepat pembangunan infrastruktur waste-to-energy di berbagai wilayah darurat sampah perkotaan.

Tambahan pula, duet lintas sektoral ini tidak hanya membersihkan ruang hidup dari ancaman pencemaran mikroplastik tanah, tetapi juga menyokong ekosistem pangan yang sehat. Den-



jadi jembatan kokoh antara regulasi kelestarian alam dan ketahanan energi nasional. Hanif membawa keahlian teknologinya untuk memastikan kawasan aglomerasi menghentikan praktik penumpukan terbuka (open dumping) dan menggalakkan gerakan pilah sampah. Sedangkan Menko

gan berkurangnya polusi tanah dan air akibat tata kelola limbah yang buruk, kualitas lahan pertanian di sekitar wilayah aglomerasi dapat terjaga dengan baik. Selain itu, konversi limbah menjadi pasokan listrik bersih berkontribusi langsung pada bauran energi baru terbarukan secara mandiri. ●

## MBG Harus Jalan Terus: **KEMBALIKAN KEPERCAYAAN PUBLIK, KEPALA BGN DAN JAJARANNYA LEGOWO MUNDUR!**

**P**rogram Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan yang secara niat hampir tidak mungkin ditolak. Tujuannya jelas: memperbaiki gizi anak bangsa, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus membuka lapangan kerja dalam waktu cepat. Ini bukan sekadar program sosial, tapi fondasi untuk masa depan Indonesia.

Namun masalahnya bukan di konsep. Masalahnya ada pada eksekusi.

Di bawah komando Badan Gizi Nasional (BGN), pelaksanaan MBG justru memicu gelombang kritik yang semakin keras. Di berbagai daerah, muncul keluhan soal menu yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran - porsi minim, kualitas rendah,

Di titik ini, persoalannya bukan lagi teknis. Ini sudah menjadi krisis legitimasi. Dan dalam krisis seperti ini, langkah biasa tidak akan cukup.

Salah satu opsi yang patut dipertimbangkan adalah: petinggi BGN, termasuk kepala lembaganya, legowo mundur.

Ini bukan soal menyalahkan individu. Ini tentang mengambil tanggung jawab di level tertinggi untuk menyelamatkan program yang jauh lebih besar. Dalam banyak kasus, mundurnya pimpinan justru menjadi titik balik - menghentikan kegaduhan, meredakan kemarahan publik, sekaligus membuka ruang bagi perbaikan menyeluruh.

Publik hari ini butuh sinyal tegas: bahwa pemerintah tidak menutup mata. Bahwa ada keberanian untuk bertanggung jawab, bukan sekadar bertahan.

Namun tentu, mundursaja tidak cukup. Pemerintah harus menjadikan ini momentum reset total. Tata kelola harus dibenahi dari hulu ke hilir. Transparansi anggaran wajib dibuka. Rantai pasok harus diaudit. Vendor harus diseleksi ulang secara ketat. Pemerintah daerah dan pelaku lokal harus dilibatkan lebih besar agar manfaat ekonomi benar-benar terasa.

Yang tak kalah penting, sistem pengawasan harus independen dan real-time. Program ratusan triliun tidak boleh berjalan dengan standar pengawasan seadanya.

BGN atau siapa pun yang melanjutkan, harus paham satu

hal: kepercayaan publik itu mahal, dan sekali rusak, sulit dikembalikan.

MBG masih bisa diselamatkan. Tapi waktunya tidak banyak. Jika dibiarkan, program ini bukan hanya gagal mencapai tujuan, tapi juga akan dikenang sebagai contoh klasik bagaimana niat baik dikalahkan oleh buruknya tata kelola.

Dan jika itu terjadi, yang hilang bukan hanya uang negara. Yang hilang adalah kepercayaan rakyat.

Karena pada akhirnya, rakyat tidak butuh program besar yang terlihat megah di atas kertas. Rakyat butuh bukti nyata di piring mereka.

Dan ketika isi piring itu tidak sesuai janji, tidak aman, bahkan dicurigai jadi ladang keuntungan segelintir orang, maka yang seharusnya memberi harapan, justru berubah menjadi kemarahan. ●



**Agus Sulistriyono**

CEO Promedia Group

Our Believe:

“ **Bisnis informasi tidak akan pernah mati. Tapi medium (platform) akan silih berganti...** ”

bahkan tidak mencerminkan standar gizi yang dijanjikan. Di sisi lain, mulai beredar laporan dugaan kasus keracunan makanan yang memperkuat kekhawatiran publik soal pengawasan kualitas.

Lebih jauh lagi, muncul persepsi bahwa program ini berpotensi hanya memperkaya segelintir pihak - vendor tertentu, kelompok tertentu. Sementara manfaat ke masyarakat luas tidak maksimal. Entah ini sepenuhnya benar atau tidak, yang jelas persepsi ini sudah telanjur hidup dan menyebar.

Dan dalam politik publik, persepsi bisa lebih berbahaya daripada fakta.

Masalah makin rumit ketika respons yang muncul terkesan defensif. Alih-alih terbuka dan evaluatif, publik melihat BGN seperti menutup rapat kritik. Ini mempercepat erosi kepercayaan

# SESAT PIKIR HOMELESS MEDIA

**M**enjaga independensi dengan menjauhi lembaga kekuasaan, menjauhi pejabat pemerintah adalah sesat pikir para praktisi "homeless media".

Tapi - mungkin juga itu justru pengakuan spontan, bahwa demikianlah posisi dan praktik kerja mereka.

Bahwa "homeless media" hanya fokus mengkritisi penguasa, tanpa konfirmasi, verifikasi dan klarifikasi.

Siang malam praktisi "homeless media" mencari cari celah kesalahan pemerintah dan mengeksposnya, lalu menghantamnya! Hingga viral.

Bandingkan dengan jurnalisme konvensional - yang menjelaskan duduk soal dan menyediakan keberimbangan - "cover both side". Menyajikan pernyataan, data dan fakta dari sumber utama, terkonfirmasi dan terverifikasi. Menampung informasi dari berbagai pihak yang kompeten dan relevan. Tidak anti kekuasaan.

Para pengamat, politisi oposisi dan aktivis dipersilakan bicara, lalu jurnalis yang ngepos di istana mengkonfirmasi.

Sejak dulu kala, semua media besar dan kredibel menempatkan jurnalisnya di istana, baik di Gedung Putih (Amerika Serikat) maupun di Istana Negara (Jakarta). Juga di pemerintah negara lainnya. Tokh - pada akhir Presiden Richard Nixon jatuh dan Presiden Suharto turun lewat intensitas perlawanan yang dimuat media.

Harian 'Kompas', 'Sinar Harapan', 'Tempo', 'Pos Kota' semua punya wartawan yang ngepos di Istana - ikut lawatan presiden. Reuters dan AFP juga.

Apakah mereka semua terkooptasi? Silakan cek.

apakah istana bisa membatasi pemberitaan atas kritik terhadap pemerintah sebagai suara publik dan pembandingnya? Tentu tidak.

Homeless media kebalikannya.

Dengan angkuh, arogan, sok bersih - sengaja menjauhi istana dan mem-



OLEH:  
DIMAS SUPRIYANTO

buat content sesuai order donatur, sponsor, bohir, dengan target jelas; anti pemerintah, anti penguasa, kritis dengan mengatas namakan "independensi" dan "kebebasan ekspresi" di "negara demokrasi" - yang dalam praktiknya, mencari cari kelemahan pemerintah dan pejabatnya. Semata mata menyalahkan penguasa.

Upaya Bakom (Badan Komunikasi Pemerintah) RI yang dipimpin Mohamad Qodari menerima Indonesia New Media Forum (IMNF) dan mendekatkan diri pada "homeless media" tidak serta merta tindakan kooptasi - namun menyiapkan perimbangan, informasi yang benar, dari sumber asalnya (A-1), bukan potongan berita dari media arus utama (mainstream) sebagai sumber ke dua - yang kemudian

ditafsir sepihak. Tanpa konfirmasi, verifikasi dan klarifikasi.

Homeless Media nampaknya pada akhirnya lebih nampak sebagai jurnalistik warga ("citizen journalism") atau media yang tidak terikat pada metode dan kaidah jurnalistik konvensional, namun aktif memproduksi konten di berbagai platform.

Masalahnya mereka menaruh sebagai media kredibel dengan konten kontroversial berdasarkan informasi sumber kutipan media utama, sering melakukan "copy-paste" atau tidak memiliki standar operasional prosedur jurnalistik yang jelas.

Ribuan triliun program pembangunan yang digagas dan diwujudkan oleh pemerintah sia sia jika tanpa penjelasan intens dan benar kepada publik lewat berbagai media : arus utama, konvensional, sosial media, karena "disabotase" dan dihakimi sepihak oleh "homeless media".

Karena algoritma media sosial berpihak pada kontroversi, kebencian, informasi sepihak yang mengundang debat, meski diragukan kebenarannya. Dan posisi itu yang diambil oleh sebagian "homeless media".

## Bantahan dari homeless media

**kok-bisa?**

Menanggapi pemberitaan yang beredar bahwa Kok Bisa di-"gandeng" menjadi mitra pemerintah, tim Kok Bisa ingin menyampaikan klarifikasi bahwa:

Kok Bisa adalah kanal konten edukasi independen yang bernaung di bawah Rombak Media, bagian dari ekosistem Tempo Media Group. Sebagai entitas independen, Kok Bisa tidak berafiliasi dengan kepentingan politik manapun.

Kok Bisa tidak pernah menghadiri pertemuan dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM RI), Muhammad Qodari, dan tidak pernah menjalin kemitraan sebagai media pendukung pemerintah.

Oleh karena itu, pernyataan yang menyebutkan bahwa Kok Bisa menghadiri pertemuan maupun menjadi bagian dari kemitraan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.



# HERMAN DERU GENJOT PEMBANGUNAN JEMBATAN DI SUMSEL, PULUHAN INFRASTRUKTUR DIBANGUN SEJAK 2019-2025

Pembangunan infrastruktur jembatan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Herman Deru selama memimpin Provinsi Sumatera Selatan. Sejak menjabat pada periode pertama tahun 2018 hingga berlanjut kembali pada 2025, Herman Deru dikenal agresif mempercepat konektivitas antar-wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan strategis.

Program pembangunan jembatan tersebut tidak hanya difokuskan pada wilayah perkotaan, tetapi juga menysasar daerah-daerah terpencil seperti Musi Rawas, Muratara, PALI, OKU Timur hingga kawasan perbatasan Sumsel. Pemerintah Provinsi Sumsel menilai pembangunan jembatan menjadi solusi untuk memangkas waktu tempuh, mempercepat distribusi hasil pertanian, hingga membuka akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan.

Herman Deru sendiri mulai menjabat sebagai Gubernur Sumsel sejak Oktober 2018 setelah memenangkan Pilkada Sumsel 2018. Ia kemudian kembali menjabat pada periode 2025 bersama Wakil Gubernur Cik Ujang.

"Alhamdulillah, dalam beberapa minggu ini saya beberapa kali ke Musi Rawas. Tadi Kepala PU menjelaskan, jembatan dari PALI sampai Simpang Semambang Musi Rawas jumlahnya 33 jembatan. In-



nya Allah masih ada dua lagi yang akan dibangun. Artinya, saat ini sudah 31 jembatan yang dibangun dan ini akan terus berjalan," kata Herman Deru.

### Puluhan Jembatan Dibangun dan Diresmikan

Pada 2025 hingga awal 2026, Pem-

prov Sumsel mencatat sedikitnya 33 jembatan strategis dibangun pada jalur penghubung PALI hingga Musi Rawas. Dari jumlah tersebut, 31 jembatan telah selesai dibangun dan 17 jembatan di antaranya diresmikan langsung oleh Herman Deru pada Mei 2026.

Ke-17 jembatan tersebut tersebar di

sejumlah kabupaten:

- ▶ Kabupaten OKU Timur:
- ▶ Jembatan Sukaraja
- ▶ Jembatan Air Tuha
- ▶ Jembatan Air Cempaka
- ▶ Jembatan Bantan Pelita
- ▶ Kabupaten Ogan Ilir:
- ▶ Jembatan Air Rasau Bentang
- ▶ Jembatan STA 01+600 Tanah Abang
- ▶ Jembatan STA 03+100 Tanah Abang
- ▶ Kabupaten OKI-Banyuasin:
- ▶ Jembatan Air Sugihan
- ▶ Kabupaten OKU:
- ▶ Jembatan Air Serami
- ▶ Jembatan Air Serami Kecil
- ▶ Kabupaten Muara Enim:
- ▶ Jembatan Lembak Kecil V
- ▶ Kabupaten PALI:
- ▶ Jembatan Air Baung
- ▶ Jembatan Air Seloyan

intah Provinsi Sumsel dalam memperpendek akses antarwilayah sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Dulu sering muncul cerita soal pemekaran Sumsel karena jaraknya terlalu jauh. Kemudian timbul pemikiran bagaimana mendekati wilayah ini. Salah satunya dengan pembangunan jalan dan jembatan yang memang sudah diinginkan para pemimpin sebelumnya,” ujarnya.

Menurut Herman Deru, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pelayanan publik dan konektivitas antar wilayah di Sumsel.

“Mudah-mudahan apa yang kita perbuat ini bermanfaat bagi masyarakat

hutan karena sebagian pembangunan melintasi kawasan hutan dan daerah rawa.

“Sekarang kita sudah merasakan manfaatnya walaupun belum sempurna karena masih ada dua jembatan lagi yang akan dibangun secara bertahap. Sekarang akses sudah lebih dekat. Saya ingat waktu pertama diresmikan, banyak masyarakat bersyukur sampai memotong kambing dan lainnya,” ungkapnya.

Meski demikian, pembangunan tetap berjalan bertahap hingga akhirnya sebagian besar jembatan berhasil diselesaikan pada 2025.

### Infrastruktur Jadi Identitas Pemerintahan Herman Deru

Selama kepemimpinannya, Herman



- ▶ Kabupaten Musi Rawas:
- ▶ Jembatan Air Tambangan
- ▶ Jembatan Air Benakat
- ▶ Jembatan Air Siamang
- ▶ Jembatan Air Temelat

### Pangkas Waktu Tempuh hingga Berjam-jam

Dalam berbagai kesempatan, Herman Deru menyebut pembangunan jembatan dilakukan untuk “mendekatkan wilayah Sumsel” yang selama ini memiliki jarak tempuh sangat panjang antar daerah.

Menurutnya, sebelum pembangunan jalan dan jembatan dilakukan, perjalanan dari Musi Rawas menuju Palembang bisa mencapai 10 hingga 11 jam. Setelah sejumlah ruas dan jembatan selesai dibangun, waktu perjalanan mulai terpankas signifikan.

Gubernur Herman Deru mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemer-

Sumsel dan kita selalu bisa memberikan pelayanan serta pembangunan terbaik bagi daerah,” tambahnya.

Pembangunan jembatan juga disebut menjadi bagian penting mendukung konektivitas kawasan Trans Sumatera bagian selatan dan memperkuat akses ekonomi masyarakat pedalaman yang selama bertahun-tahun mengalami ketertinggalan infrastruktur.

### Tantangan Anggaran dan Pandemi

Program pembangunan jembatan Sumsel tidak berjalan mudah. Herman Deru mengungkapkan proyek-proyek tersebut sempat menghadapi kendala besar, terutama saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada 2020-2022.

Pemerintah Provinsi Sumsel harus melakukan refocusing anggaran sambil tetap mempertahankan pembangunan infrastruktur prioritas. Selain itu, Pemprov juga harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Kementerian Ke-

Deru memang dikenal menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu identitas utama pemerintahannya. Selain jembatan, Pemprov Sumsel juga membangun dan memperbaiki jalan provinsi, rumah sakit, hingga konektivitas antarwilayah pedalaman.

Pada Februari 2026, Herman Deru bahkan meninjau langsung pembangunan jembatan pengganti peninggalan era kolonial tahun 1934 di wilayah pedesaan Sumsel. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus diratakan hingga tingkat desa.

Menurut pemerintah daerah, manfaat pembangunan jembatan kini mulai dirasakan masyarakat, terutama untuk:

- ▶ mempercepat distribusi hasil perkebunan dan pertanian,
- ▶ memudahkan akses sekolah dan rumah sakit,
- ▶ membuka jalur ekonomi baru,
- serta meningkatkan investasi di wilayah pedalaman Sumsel.●

# AJAK MASYARAKAT BERSAMA JAGA KONDUSIVITAS

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamarri Chaniago bersama Gubernur Herman Deru menggelar tatap muka dengan sejumlah elemen masyarakat Sumatera Selatan.

**K**egiatan ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas serta mewujudkan kesejahteraan bersama.

Menurut Menko Polkam, kekompakan dan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci agar berbagai tantangan di tengah masyarakat dapat dihadapi dengan baik.

"Kondisi di masyarakat menuntut Forkopimda untuk fokus dan bekerja bersama-sama agar upaya mensejahterakan masyarakat dapat berjalan lancar. Jika pemerintah daerah dan masyarakat kompak, tidak akan ada masalah. Ini adalah upaya kita bersama untuk terus menjaga itu," ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa ancaman terhadap bangsa saat ini tidak selalu hadir dalam bentuk fisik atau militer. Tantangan terbesar justru kerap muncul di ruang digital melalui penyebaran hoaks, narasi kebencian, maupun pro-

vokasi.

"Yang diserang bukan hanya wilayah, tetapi juga pikiran, keyakinan, dan persatuan masyarakat," katanya.

Selain itu, Djamarri mengingatkan adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya memecah belah persatuan dan menciptakan gangguan keamanan di tengah masyarakat.

"Jangan lupa, ada orang dan kelompok tertentu yang ingin membuat masalah. Itu membahayakan masyarakat dan kita semua. Jika ingin menyampaikan pendapat, silakan. Demonstrasi tidak dilarang, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak anarkis," tegasnya.

Menko Polkam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergandengan tangan bersama pemerintah daerah dalam membangun kesejahteraan.

"Mari kita bangun masyarakat yang sejahtera bersama-sama, bersatu padu dengan pemerintah daerah," pungkasnya.



### Tinjau Kampung Nelayan Merah Putih

Dalam kunjungan ke Sumatera Selatan, Menko Polkam Djamarri Chaniago juga meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin.

Kunjungan tersebut menjadi momen penting untuk meninjau langsung implementasi program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan, sekaligus memastikan kesiapan operasional kawasan nelayan terpadu yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Wakil Gubernur H. Cik Ujang menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan kawasan nelayan di Sumatera Selatan.

“Suatu kebahagiaan bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat Desa Sungsang, dapat menerima kunjungan langsung Bapak Menko Polkam RI. Kehadiran beliau menjadi bentuk perhatian nyata pemerintah pusat dalam mendukung kemajuan sektor kelautan dan kesejahteraan nelayan,” ujarnya.

Cik Ujang menjelaskan, KNMP Sungsang merupakan kampung nelayan pertama di Provinsi Sumsel sekaligus lokasi pertama yang dikunjungi langsung Menko Polkam RI. Program tersebut dinilai strategis dalam mendorong produktivitas nelayan, mengingat Kecamatan Banyuasin II memiliki 3.630 nelayan dengan armada kapal dan perahu mencapai 1.001 unit.

Menurutnya, keberadaan KNMP tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan, tetapi juga membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembangunan KNMP Sungsang IV berdiri di atas lahan milik UPTD Pelabuhan Perikanan Sungsang di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel. Proses pembangunan sempat menghadapi kendala terkait ketersediaan lahan bersertifikat. Namun, berkat sinergi semua pihak, pembangunan dapat direalisasikan.

“Pada awalnya tidak tersedia lahan bersertifikat milik pemerintah kabupaten maupun desa sebagai syarat pembangunan. Karena itu, saya menginstruk-

sikan jajaran terkait untuk membantu percepatan pembangunan KNMP ini,” katanya

Dari 15 prasarana yang dibangun di kawasan tersebut, sejumlah fasilitas dinilai sangat menunjang aktivitas nelayan, di antaranya pabrik es berkapasitas produksi 1-2 ton per hari dan cold storage berkapasitas 10 ton untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.

mendorong pembangunan jembatan permanen yang menghubungkan jalan utama dengan kompleks KNMP Sungsang IV. Menurutnya, akses yang representatif sangat dibutuhkan untuk mendukung distribusi hasil perikanan dan mobilitas masyarakat.

Sementara itu, Menko Polkam RI Jenderal TNI (Purn.) Djamarri Chaniago menegaskan bahwa peninjauan tersebut



Cik Ujang optimistis Koperasi Desa Merah Putih Sungsang IV mampu berkembang menjadi pusat pengelolaan usaha nelayan yang produktif. Ia menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan dari pemerintah pusat maupun daerah agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, ia juga mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN) di kawasan KNMP Sungsang guna memudahkan nelayan memperoleh bahan bakar subsidi.

Tak hanya itu, Pemprov Sumsel turut

merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan program prioritas pemerintah di wilayah perairan dan kawasan nelayan.

Ia memastikan pemerintah pusat akan terus mendorong sinergi lintas sektor agar program strategis seperti KNMP dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.

Kunjungan kerja ini juga menjadi bagian dari rangkaian agenda Menko Polkam RI di Sumatera Selatan yang difokuskan pada penguatan pembangunan kawasan strategis serta pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. ●



## SIAP DAN SIAGA HADAPI KARHUTLA

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menegaskan komitmen kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamar Chaniago, memimpin Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Karhutla Sumsel sekaligus Reaktivasi Desk Karhutla Nasional Tahun 2026 di halaman Griya Agung.

Apel tersebut ditandai dengan pemeriksaan lapangan, reaktivasi desk koordinasi penanggulangan karhutla, serta simulasi penanganan karhutla secara terintegrasi.

Dalam arahannya, Menko Polkam Djamar Chaniago menyampaikan bahwa apel kali ini berbeda dari sebelumnya karena adanya reaktivasi desk koordinasi penanggulangan karhutla tahun 2026.

Ia berharap langkah ini mampu memperkuat keterpaduan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah

daerah, serta unsur terkait dalam mitigasi pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum, hingga pemulihan pascakebakaran.

Menko juga menegaskan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Karena itu, capaian pengendalian yang telah diraih harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

"Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan mitigasi serta membangun kerja sama yang solid dalam



penanganan karhutla," tegasnya.

Ia menambahkan, Sumatera Selatan merupakan wilayah strategis yang perlu mendapat perhatian serius karena memiliki tingkat kerawanan tinggi, dipengaruhi oleh karakter lahan gambut, area perkebunan, serta riwayat kebakaran yang berulang.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla secara nasional pada 2024 mencapai sekitar 376.805 hektar dan pada 2025 sekitar 359.619 hektar.

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Selatan, luas karhutla pada 2024 tercatat sekitar 15.422 hektar dan menurun menjadi 5.939 hektare pada 2025. Untuk periode 1 Januari hingga 30 April 2026, luas karhutla di Sumsel tercatat sekitar 79 hektare.

"Penurunan ini patut disyukuri, tetapi tidak boleh membuat kita lengah. Justru capaian ini harus dipertahankan melalui kerja yang lebih disiplin, lebih dini, dan lebih terpadu," ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta seluruh pihak mencermati faktor cuaca dan iklim. Berdasarkan data BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau pada periode April hingga Juni 2026. Khusus Sumatera Selatan, awal musim kemarau diperkirakan terjadi pada Mei.

### Siaga Daerah Rawan Kahutla

Berdasarkan pemetaan BPBD Sumsel, terdapat 12 kabupaten/kota yang rawan Karhutla pada 2026. Wilayah tersebut harus menjadi prioritas pengawasan, patroli pencegahan, serta penyiapan sumber daya karena memiliki karakteristik lahan gambut atau mineral kering, area perkebunan, dan riwayat kebakaran berulang.

"Dengan mencermati hal itu, saya minta kepada Gubernur Sumatera Selatan, para Forkopimda, bupati dan wali kota, serta seluruh jajaran agar menjadikan penanggulangan Karhutla sebagai prioritas daerah menjelang dan selama musim kemarau 2026," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah, termasuk memastikan posko siaga berjalan optimal, personel dan per-

alatan siap, sumber air terpetakan, jalur mobilisasi terbuka, serta sistem komando lapangan berfungsi efektif.

Selain itu, ia meminta agar data dan informasi terintegrasi dalam satu sistem yang cepat dan akurat. Setiap titik panas harus segera diverifikasi, dan setiap kejadian harus segera dilaporkan serta ditangani tanpa ego sektoral.

Menko juga menegaskan peran dunia usaha di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan agar memenuhi seluruh kewajiban dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayah kerja masing-masing.

"Dunia usaha harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi sumber persoalan," tegasnya

Dalam sambutannya, ia juga menyebutkan Sumatera Selatan harus diposisikan sebagai salah satu barometer pengendalian karhutla di kawasan Sumatera bagian selatan.

Hal ini mengingatkan dampaknya tidak hanya dirasakan secara lokal, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan masyarakat, transportasi, kegiatan ekonomi, kualitas udara, serta citra daerah dan negara.

"Kita jadikan apel kesiapsiagaan hari ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menyatukan langkah, dan memastikan Sumatera Selatan siap menghadapi musim kemarau 2026 dengan kesiapsiagaan penuh. Kita harus bergerak lebih awal, lebih cepat, dan lebih terpadu," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan awal penanggulangan bencana karhutla sebesar Rp2,8 miliar, berupa motor trail pemadam karhutla, mesin pompa pemadam, alat pelindung diri personel, dan perlengkapan lainnya. Apel ditutup dengan simulasi pemadaman karhutla secara terintegrasi. ●



# SUKSES BANGUN INFRASTRUKTUR, DARI JEMBATAN HINGGA PERTANIAN

Pembangunan di berbagai kabupaten dan kota yang gencar dilakukan Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru dan Wakil Gubernur Cik Ujang (HDCU) berdampak dengan naiknya tingkat kepuasan masyarakat. Di sektor pertanian, Sumsel juga dipercaya sebagai Lumjung Pangan Nasional.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga akan terus mendukung program pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Fokus utama diarahkan pada peningkatan produksi serta kesejahteraan petani.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan, termasuk PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, guna menjaga keberlanjutan sektor pertanian di Sumsel.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan menilai keberhasilan Sumsel menjadi daerah surplus beras tidak lepas dari kepemimpinan Herman Deru yang dinilai mampu menggerakkan sektor pertanian secara optimal.

"Saya lihat Gubernur Sumsel ini sangat hebat, bekerja keras luar biasa. Sumsel bisa surplus beras dan menjadi salah satu daerah penyumbang pangan terbesar di Indonesia," ungkapnya.

Ia pun optimistis terhadap capaian swasembada pangan nasional. Berbagai program terobosan pemerintah diyakini mampu mendorong Indo-

nesia mencapai surplus beras secara berkelanjutan.

"Pada tahun 2025, kita surplus beras 4,2 juta ton, dan Sumsel menjadi salah satu penyumbang. Terima kasih kepada Gubernur Sumsel atas kontribusinya," tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa harga gabah yang diterima petani telah sesuai dengan ketetapan pemerintah, sehingga memberikan keuntungan yang lebih adil bagi petani.

"Harga gabah sudah Rp6.500 dan diterima petani juga Rp6.500. Oleh karena itu, kita berterima kasih kepada Presiden RI, Prabowo Subianto," tambahnya.

## Perkuat Kemandirian Energi

Gubernur Herman Deru juga mendukung kegiatan groundbreaking Proyek Hilirisasi Nasional Fase II percepatan pengembangan coal to dimethyl ether (DME) di Tanjung Enim.

Ia menilai masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Muara Enim, patut berbahagia dengan dimulainya pembangunan ini, seraya berharap proyek tersebut dapat terwujud sesuai rencana.

Gubernur mengungkapkan bahwa di-



rinya menjadi saksi langsung perjalanan proyek ini sejak masa pandemi Covid-19 hingga kondisi mulai pulih. Saat itu, masyarakat sempat mengalami kesulitan, bahkan harus mengantri untuk mendapatkan gas LPG.

Menurutnya, kondisi tersebut sempat memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai ironi Sumatera Selatan sebagai daerah kaya minyak, gas, dan batubara, namun masih mengalami keterbatasan pasokan gas. Namun, secara bertahap pemerintah mulai menghadirkan solusi melalui program jaringan gas (jargas) oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan Pertamina.

“Proyek ini menjadi sangat penting, karena akan membantu memenuhi kebutuhan energi masyarakat, khususnya LPG di Sumatera Selatan,” ujar Herman Deru.

Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri, termasuk melalui program biodiesel seperti B50.

### Percepat Lahirnya Wirausaha Muda

Gubernur Herman Deru juga terus mendorong percepatan lahirnya wirausaha muda berorientasi ekspor melalui program “Sultan Muda”. Ia menegaskan bahwa peran generasi muda sangat strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah. Anak muda tidak cukup hanya difasilitasi, tetapi harus diberi tantangan dan ruang untuk berkembang.

Menurutnya, pola pikir yang masih meragukan kemampuan generasi muda perlu diubah dengan memberikan kepercayaan serta kesempatan yang lebih luas.

Ia juga menyoroti capaian program Sultan Muda yang masih perlu dipercepat. Dari target 100 ribu wirausaha muda, saat ini baru terealisasi sekitar 9.020 orang.

Untuk itu, Gubernur mendorong HIPMI Sumsel agar tidak hanya merangkul pelaku usaha yang sudah berjalan, tetapi juga membuka akses bagi generasi muda yang memiliki potensi dan ide besar.

### Gubernur Jembatan

Salah satu instrumen yang bi-

asanya ada dalam tingkat kepuasan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur yang salah satunya adalah jembatan. Dalam masa kepemimpinan Herman Deru sebagai Gubernur Sumsel, sudah 17 jembatan yang telah dibangun baik itu yang menghubungkan kabupaten dan kota serta jembatan tersendiri.

Tentunya dengan adanya jembatan yang terhubung antar kabupaten atau kota akan dapat meningkatkan pergerakan dan kemudahan roda perekonomian masyarakat.

“Bukan jembatan saja, infrastruktur jalan yang dibangun menghubungkan antar kabupaten juga gencar dibangun Herman Deru. Kerja ini sangat

pembangunan jembatan ini pasti sangat dirasakan masyarakat baik kelas bawah, menengah dan atas, bukan proyek mercusuar yang kalau dibangun hanya dirasakan kalangan menengah ke atas saja.

“Wajar kalau Herman Deru dijuluki sebagai Gubernur Jembatan,” terang mantan peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini.

Selain jembatan, pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang digencarkan Herman Deru juga akan berefek besar hidupnya perekonomian masyarakat Sumsel.

“Gebrakan pembangunan jembatan di berbagai daerah dan pembangunan Tanjung Carat serta pembuatan jalan



berdampak dengan kebutuhan dasar terutama mempermudah pergerakan perekonomian masyarakat,” Direktur Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI), Arianto.

Arianto mengungkapkan, dampak

khusus bagi truk lalu lintas pertambangan batubara patut diacungkan jempol selama kepemimpinan Herman Deru. Ini akan menjadi momen yang akan dikenang masyarakat Sumsel,” pungkas mahasiswa doktoral FISIP. ●



## PERDANA DI INDONESIA, LAUNCHING TATA KELOLA SUMUR MINYAK MASYARAKAT

Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, memimpin Apel Ikrar Bersama dan Launching Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 di Lapangan Sepak Bola Polsek Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Musi Banyuasin, memiliki posisi strategis sebagai salah satu penopang energi nasional. Sehingga pengelolaan energi harus dilakukan secara akuntabel dan transparan guna mendukung percepatan target nasional di sektor energi.

"Lahirnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 merupakan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan prinsip transparansi dan integritas yang tinggi," ujar Herman Deru.

Ia menegaskan, regulasi tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan rapat penetapan hasil inventarisasi sumur minyak masyarakat pada 9 Oktober 2025 di Kementerian

ESDM RI yang dipimpin Menteri ESDM RI, terdapat 22.381 sumur minyak masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dikelola oleh tiga badan usaha yang ditunjuk gubernur atas usulan bupati/wali kota.

Rinciannya, PT Petro Muba (Persero) mengelola 14.381 sumur, Koperasi Rezeky Bersama Sejahtera sebanyak 4.000 sumur, serta UMKM PT Keban Berkah Energi sebanyak 4.000 sumur.

Herman Deru juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas penyelenggaraan ikrar bersama tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi tata kelola sumur minyak masyarakat.

"Ini adalah bukti nyata bahwa daerah memiliki semangat yang sama dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam

mewujudkan tata kelola energi yang bersih," katanya.

Ia berharap ikrar bersama tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan dalam komitmen nyata di lapangan.

Selain itu, Herman Deru meminta seluruh pihak memperkuat pengawasan terhadap implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 agar berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

"Dengan semangat kebersamaan yang kita deklarasikan hari ini, kita harapkan Sumatera Selatan terus menjadi pionir dalam pembangunan energi yang berkelanjutan dan berintegritas. Mari kita laksanakan ini dengan penuh tanggung jawab," tutupnya.

Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin, HM Toha Tohet, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mendukung implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, meningkatkan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, dan masyarakat, sekaligus mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sumur minyak sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain menjadi sarana edukasi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menekan aktivitas ilegal drilling di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

"Pemkab Muba berharap adanya dukungan dan pendampingan dari Pemprov Sumsel dalam mempercepat implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025," pungkasnya.

Launching Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 di wilayah Musi Banyuasin ditandai dengan penekanan sirene serta penandatanganan berita acara ikrar bersama oleh Gubernur Sumsel dan Forkopimda Sumsel, Bupati Muba, para BUMD, koperasi, UMKM, serta masyarakat pengelola sumur minyak.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa hasil evaluasi faktual sementara hingga 12 Mei 2026 terhadap sejumlah sumur minyak masyarakat yang telah tercantum dalam berita acara hasil inventarisasi sumur minyak masyarakat yang ditandatangani Tim Gabungan pada 9 Oktober 2025 telah diselesaikan terhadap sebanyak 370 sumur minyak masyarakat.

### Tekankan Keselamatan Pekerja dan Lingkungan

Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru menekankan bahwa keselamatan pekerja dan perlindungan lingkungan menjadi perhatian utama pemerintah dalam implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 terkait tata kelola sumur minyak masyarakat.

Ia menegaskan bahwa setelah adanya legalisasi pengelolaan sumur minyak masyarakat, aktivitas ilegal drilling maupun ilegal refinery harus dihentikan.

"Kita berharap setelah adanya legalisasi ini, ilegal drilling atau pengeboran minyak ilegal dihentikan dan ilegal refinery juga stop," tegas Herman Deru.

Menurutnya, selama ini banyak kor-

ban jiwa akibat aktivitas pengeboran dan pengolahan minyak ilegal yang dilakukan tanpa standar keselamatan yang memadai.

"Banyak nyawa melayang karena mencari nafkah melalui drilling minyak ilegal dan refinery ilegal," ujarnya.

Herman Deru mengatakan, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, nantinya akan ada pembinaan dari KKKS mengenai tata cara pengelolaan sumur rakyat yang benar dan aman, termasuk perlindungan terhadap

"Baik kebunnya, tempat usaha, maupun masyarakat yang berdomisili di desa-desa ini, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan agar tidak tercemar," ujarnya.

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Lingkungan Hidup Muba bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi pencemaran lingkungan akibat aktivitas pengeboran minyak.

Terkait tata niaga minyak, Herman



pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Keselamatan pekerja harus terjamin, termasuk juga dijamin dengan BPJS Ketenagakerjaan dan akan saya instruksikan itu," katanya.

Selain itu, Herman Deru meminta seluruh pihak berkomitmen menjaga lingkungan seiring modernisasi pengelolaan sumur minyak masyarakat. Menurutnya, kawasan pengeboran berada berdampingan dengan pemukiman warga dan aktivitas sosial masyarakat sehingga pengawasan lingkungan harus diperkuat.

Deru menegaskan bahwa minyak hasil sumur rakyat tidak boleh lagi dijual kepada penampung liar setelah terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

"Masyarakat harus menjual kepada koperasi, UMKM maupun BUMD Petro Muba yang telah ditunjuk," katanya.

Ia menambahkan, minyak yang keluar dari Musi Banyuasin di luar jalur resmi dipastikan ilegal karena seluruh hasil produksi harus diserahkan melalui titik serah resmi kepada pihak yang telah ditentukan. ●

# TEKANKAN PENTINGNYA SILATURAHMI DI TENGAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Gubernur Herman Deru mengajak masyarakat menjaga terus silaturahmi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Meski teknologi berkembang pesat, hubungan sosial dan kebersamaan antarmanusia tetap tidak dapat tergantikan.

“Silaturahmi jangan sampai hilang. Dulu saat saya menjadi bupati, yang memegang handphone hanya camat. Sekarang semua orang mencari sinyal. Perubahan dunia begitu cepat dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya,” ujar Herman Deru saat menghadiri Pengajian Akbar Hari Lahir (Harlah) ke-40 Pondok Pesantren Al Istiqomah di Desa Sumber Harjo Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur.

Ia mencontohkan perubahan pola komunikasi masyarakat, termasuk saat ibadah haji yang kini memungkinkan keluarga saling berkomunikasi melalui video call, hingga pengalaman Lebaran virtual pada masa pandemi Covid-19.

“Kita tidak bisa menghindari silaturahmi. Kemajuan teknologi jangan sampai membuat kita menjadi manusia yang masa bodoh. Kita harus menjadi manusia yang peduli dan menjaga pendidikan

anak-anak,” katanya.

Menurut Herman Deru, tantangan terbesar saat ini adalah mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi perubahan zaman dengan tetap memiliki akhlak dan karakter yang baik.

“Anak pintar dan anak cerdas sudah banyak, anak yang berakhlak juga banyak. Tapi belum tentu mereka memiliki keberanian. Ibu-ibu di sini harus membina anak-anak agar berani tampil dan siap menghadapi perubahan,” tambahnya.

Herman Deru juga menekankan pentingnya keikhlasan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

“Kunci menghadapi perubahan adalah ikhlas. Jadilah manusia yang tangguh, dan salah satu cara menjadi tangguh adalah dengan terus menjaga silaturahmi,” ungkapnya.

Sementara itu, penceramah Ustadz K.H. Anwar Zahid dalam tausiyahnya mengatakan bahwa pangkat, jabatan,



dan kedudukan hanyalah titipan Allah SWT sehingga tidak layak untuk disombongkan.

“Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau turun langsung ke masyarakat dan kebijakannya benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.

Usai kegiatan pengajian akbar, Gubernur Herman Deru juga meninjau pembangunan Masjid Jami Darul Falah di Desa Sumber Harjo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur.

### Ajak Warga Jaga Kerukunan

Di tempat terpisah Wagub Sumsel, H. Cik Ujang menghadiri Pengajian Akbar dan Harlah ke-10 Pondok Pesantren Hidayatullah Muftadiin Sigam sekaligus Haul Umami Liliyin ke-4 di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.

Kehadiran Cik Ujang disambut antusias ribuan jamaah yang memadati lokasi kegiatan. Dalam sambutannya, ia mengaku bahagia melihat semangat kebersamaan masyarakat yang mengikuti rangkaian pengajian akbar tersebut.

Menurut Cik Ujang, kekompakan dan kerukunan masyarakat menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan di Sumatera Selatan. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

“Insya Allah, kalau kita selalu kompak, kita akan terus maju bersama. Saya berharap masyarakat Sumsel selalu hidup rukun dan damai sehingga tercipta persatuan yang kokoh,” ujar Cik Ujang di hadapan para jamaah.

Ia juga berharap Pondok Pesantren Hidayatullah Muftadiin Sigam dapat terus istiqomah menjadi lembaga pendidikan yang melahirkan generasi berakhlakul karimah. Menurutnya, pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk moral generasi muda di tengah perkembangan zaman.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatullah Muftadiin Sigam, KH Dachlan Salim Zarkasyi, menyampaikan rasa syukur atas perjalanan 10 tahun pesantren yang dipimpinnya.

Ia menuturkan, pesantren tersebut

dirintis dari bawah hingga kini berkembang pesat dengan jumlah santri dan santriwati yang terus meningkat setiap tahunnya.

“Alhamdulillah, atas doa dan dukungan keluarga serta masyarakat, pesantren yang dirintis dari bawah ini dapat berkembang seperti sekarang. Dengan bertambahnya santri, syiar Islam dan ibadah akan semakin kuat di wilayah kita,” ungkapnya.

Pengajian akbar berlangsung khid-

mat dan meriah dengan menghadirkan penceramah kondang asal Bojonegoro, KH Anwar Zahid.

Dalam tausiyahnya, KH Anwar Zahid menyampaikan pentingnya pendidikan agama sejak dini serta penghormatan kepada guru dan orang tua.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Muara Enim, tokoh agama, tokoh masyarakat, wali santri, serta ribuan masyarakat yang mengikuti acara hingga selesai. ●



# JURUS CEPAT MAHYELDI SELAMATKAN PERTANIAN SUMBAR

Upaya pemulihan sektor pertanian pascabencana di Sumatera Barat menunjukkan kemajuan signifikan.

**D**i bawah kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah, pemerintah provinsi berhasil mempercepat rehabilitasi lahan pertanian hingga melampaui capaian rata-rata nasional, sekaligus mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.

Pengakuan tersebut disampaikan oleh Sekjen Kemendagri Tomsji Tohir dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar pada 30 April 2026.

Dalam forum itu, Kementerian Dalam Negeri menilai progres Sumatera Barat sebagai yang paling maju di antara provinsi terdampak bencana di Pulau Sumatra.

Berdasarkan data yang dipaparkan, dari total 3.902 hektare sawah terdampak, sekitar 98 persen telah memasuki tahap kontrak pekerjaan, sementara 50,8 persen di antaranya sudah rampung secara fisik. Capaian ini jauh melampaui provinsi lain seperti Aceh

yang baru mencapai 0,6 persen dan Sumatera Utara sekitar 5 persen, dengan rata-rata nasional masih berada di kisaran 6 persen.

Menurut Mahyeldi, percepatan tersebut merupakan hasil dari pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat pengawasan. Ia secara konsisten menekankan pentingnya kerja lintas sektor agar petani tidak terlalu lama kehilangan produktivitas akibat kerusakan lahan.

"Fokus utama kami adalah memastikan lahan pertanian kembali produktif secepat mungkin. Ketahanan pangan daerah tidak boleh terganggu terlalu lama, apalagi menghadapi musim kemarau," ujar Mahyeldi dalam beberapa kesempatan terkait penanganan pascabencana.

Mahyeldi menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi lahan dan peningkatan produksi pertanian harus berjalan



beriringan agar dampaknya langsung dirasakan oleh petani.

Pemprov Sumatera Barat melalui Inspektur Daerah, Andri Yulika, menegaskan bahwa capaian ini tidak lepas dari pengawasan ketat yang diinstruksikan langsung oleh gubernur. Selain melibatkan Inspektorat, pengawasan juga diperkuat melalui sinergi dengan TNI, Polri, serta pemerintah kabupaten dan kota.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap memberi perhatian khusus pada wilayah yang progresnya masih tertinggal, seperti Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman. Mahyeldi menargetkan seluruh proses rehabilitasi dapat diselesaikan pada akhir Mei 2026, lebih cepat dari target nasional yang ditetapkan pada Juli.

Langkah percepatan ini dinilai krusial mengingat sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor pertanian masih menjadi kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat, dengan porsi signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, penguatan sektor pertanian

Sumatera Barat juga mendapat dukungan dari tingkat nasional. Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, mendorong peningkatan luas tanam jagung sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pesisir Selatan pada 3 Mei 2026, Rahmat menetapkan target perluasan lahan jagung hingga 4.000 hektare pada 2026, meningkat dari realisasi 3.000 hektare pada tahun sebelumnya.

"Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional," katanya.

Kabupaten Pesisir Selatan disebut sebagai daerah strategis, dengan kontribusi sekitar 800 hektare lahan jagung

pada 2025. Potensi lahan yang masih luas dinilai dapat dioptimalkan melalui dukungan sarana produksi dan pendampingan teknis.

Rahmat menekankan bahwa peningkatan luas tanam harus diiringi dengan kualitas produksi. Ia mendorong penyediaan benih unggul, penguatan manajemen budidaya, serta koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah.

Langkah ini sejalan dengan agenda swasembada pangan nasional yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto, yang menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan pangan. ●



# PALEMBANG MENUJU KOTA SEHAT DAN HUMANIS

Pelaksanaan uji coba kedua Car Free Day (CFD) di Kota Palembang pada Minggu, 3 Mei 2026, menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal pengelolaan lalu lintas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas koordinasi lintas instansi.

Program yang menjadi salah satu prioritas Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, ini berlangsung aman, tertib, dan semakin mendekati format ideal sebagai ruang publik berbasis kesehatan dan lingkungan.

Sejak pagi hari, aktivitas di sejumlah ruas utama kota sudah dipadati warga yang memanfaatkan CFD untuk berolahraga, mulai dari jalan santai, jogging, hingga bersepeda. Di sisi lain, arus kendaraan di sekitar kawasan terdampak tetap terpantau terkendali, terutama di titik-titik strategis seperti kawasan Musi IV, Musi VI, dan sekitar Jembatan Ampera.

Keberhasilan pelaksanaan CFD kali ini tidak lepas dari kesiapan petugas di lapangan. Lebih dari 100 personel Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang diterjunkan dan ditempatkan di berbagai titik rawan kemacetan. Mereka bekerja

sama dengan aparat kepolisian, Satpol PP, serta dukungan dari pihak kecamatan dan kelurahan.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bahwa titik-titik keramaian menjadi prioritas utama guna memastikan kenyamanan warga yang berolahraga.

"Petugas gabungan akan dikerahkan untuk menjaga area-area crowded (ramai) yang dipenuhi PKL (pedagang kaki lima). Kami ingin memastikan kawasan tersebut bebas dari gangguan PKL yang meluber di jalan," tegas Dewa.

Kata Dewa, selain penertiban PKL, pemkot juga akan menerapkan skema penjagaan dari personel gabungan. Petugas di lapangan pun akan ditambah dengan memperkuat tim dari pol-restabes.

Sementara untuk jadwal penutupan jalan lanjut Dewa, pemkot akan meman-



gkas waktu. Sebelumnya pengaturan jam berlangsung hingga 09.30 WIB, ke depan penutupan mulai 05.30-08.00 WIB.

“Penjagaan ketat terutama di jalan alternatif jembatan Musi 4 dan Musi 6,” ujar Dewa

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Agus Supriyanto, menegaskan bahwa uji coba kedua ini difokuskan pada penyempurnaan manajemen lalu lintas. Evaluasi dari pelaksanaan sebelumnya dijadikan dasar untuk mengantisipasi potensi hambatan.

“Pengaturan arus kendaraan kami maksimalkan agar tidak terjadi penumpukan. Meski volume kendaraan cukup tinggi, kondisi tetap dapat terurai dengan baik,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumsel, AKBP Farida, memastikan situasi lalu lintas selama

kegiatan berlangsung tetap kondusif. Penempatan personel dilakukan secara fleksibel mengikuti dinamika di lapangan, sehingga potensi kepadatan bisa segera diatasi.

Faktor penting lain yang turut mendukung kelancaran CFD adalah intensifnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Informasi terkait rekayasa lalu lintas, rute alternatif, serta tujuan pelaksanaan CFD disampaikan secara luas melalui berbagai kanal, termasuk media sosial dan media massa lokal.

Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga meminimalkan kebingungan dan potensi pelanggaran di lapangan.

Program CFD yang digagas Pemkot Palembang bukan sekadar agenda min-

gguan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun kota yang lebih sehat, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kualitas hidup warga.

Secara konseptual, Car Free Day merupakan upaya untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor, meningkatkan kualitas udara, serta menyediakan ruang publik yang aman bagi aktivitas fisik. Mengacu pada berbagai studi lingkungan perkotaan, pembatasan kendaraan di area tertentu secara berkala terbukti mampu menurunkan kadar polutan udara seperti PM2.5 dan karbon monoksida, meskipun bersifat temporer.

Di Palembang, langkah ini juga sejalan dengan upaya pengendalian kemacetan serta penguatan ruang interaksi sosial warga. Kawasan CFD diharapkan menjadi titik temu berbagai komunitas, mulai dari pecinta olahraga, pelaku UMKM, hingga komunitas seni.

Di bawah kepemimpinan Ratu Dewa, CFD menjadi salah satu program unggulan yang masuk dalam agenda pembenahan wajah kota. Selain peningkatan infrastruktur dan layanan publik, pemerintah kota juga menaruh perhatian pada penyediaan ruang terbuka yang inklusif.

Evaluasi berkala terus dilakukan untuk menyempurnakan konsep CFD, baik dari sisi teknis pelaksanaan, manajemen lalu lintas, hingga integrasi dengan kegiatan ekonomi kreatif masyarakat.

CFD bukan hanya soal menutup jalan dari kendaraan, tetapi bagaimana menghadirkan ruang hidup yang lebih sehat, nyaman, dan produktif bagi warga menjadi semangat yang terus didorong dalam implementasinya.

Dengan hasil positif pada uji coba kedua ini, Pemerintah Kota Palembang optimistis CFD dapat segera diterapkan secara lebih luas dan berkelanjutan. Masyarakat pun diimbau untuk memanfaatkan momentum ini dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti olahraga rutin dan aktivitas rekreatif bersama keluarga.

Jika konsistensi pelaksanaan dan dukungan publik terus terjaga, CFD berpotensi menjadi ikon baru Kota Palembang sebuah ruang bersama yang merepresentasikan gaya hidup sehat, kota yang lebih bersih, serta interaksi sosial yang semakin erat. ●



## Penyiksaan Balita di Daycare

# FAKTA KELAM YANG MENGUSIK NURANI PUBLIK

Kasus kekerasan terhadap balita di daycare ilegal Little Aresha, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengguncang publik dan memicu respons tegas dari pemerintah daerah hingga pusat.



**P**eristiwa ini tak hanya membuka luka mendalam bagi korban dan keluarga, tetapi juga menelanjangi lemahnya pengawasan serta celah regulasi dalam sistem pengasuhan anak usia dini di Indonesia.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengesam keras praktik kekerasan yang terjadi di lembaga penitipan anak tersebut. Ia menyatakan keprihatinan mendalam, terutama karena pelaku didominasi perempuan yang

secara sosial identik dengan peran pengasuhan.

"Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin anak-anak diperlakukan seperti itu, apalagi oleh mereka yang seharusnya memiliki naluri keibuan," ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, akhir April lalu.

Pernyataan ini mencerminkan kegelisahan moral sekaligus kritik terhadap degradasi kualitas pengasuhan di lembaga nonformal yang tidak ter-

standarisasi.

Sultan menegaskan bahwa seluruh daycare tanpa izin operasional wajib menghentikan kegiatan sementara hingga memenuhi aspek legalitas. Dari data Pemda DIY, terdapat sekitar 68 daycare dengan 31 di antaranya belum mengantongi izin resmi.

Menurutnya, status ilegal berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari minimnya pengawasan hingga rendahnya standar keselamatan anak. Ia menegaskan bahwa penutupan sementara adalah langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah DIY menyiapkan Surat Edaran (SE) yang akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan inspeksi menyeluruh terhadap daycare.

Operasi lapangan akan difokuskan pada dua aspek utama yakni legalitas kelembagaan, termasuk izin operasional, kualitas layanan, mencakup keamanan, kesehatan, dan kelayakan fasilitas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY, Erlina Hidayati Sumardi menegaskan bahwa gubernur juga mendorong penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih komprehensif.

"SOP harus menjamin pemenuhan hak anak secara menyeluruh, mulai dari aspek keamanan hingga kualitas interaksi pengasuh," ujarnya.

Kasus ini turut menjadi perhatian legislatif. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyebut peristiwa ini sebagai "alarm serius" bagi sistem perlindungan anak nasional.

Komisi X memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Dinas Pendidikan DIY guna membahas langkah konkret. Ia menekankan pentingnya integrasi lintas sektor, termasuk standarisasi nasional daycare, sertifikasi kompetensi pengasuh, sistem pengawasan berbasis teknologi dan sinkronisasi data antar kementerian.

"Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab satu institusi, melainkan kerja kolektif negara," tegasnya.

Secara administratif, daycare merupakan bagian dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Di DIY, tercatat 217 Taman Penitipan Anak (TPA) telah terdaf-

tar dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Namun, keberadaan puluhan daycare ilegal menunjukkan masih adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.

Secara nasional, tren meningkatnya keluarga dengan orang tua bekerja mendorong kebutuhan layanan penitipan anak. Data Badan Pusat Statistik (BPS)

bukti utama.

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta kemudian melakukan penyelidikan intensif dan menetapkan 13 tersangka, terdiri dari satu kepala yayasan, satu kepala sekolah dan 11 pengasuh.

Langkah hukum ini menjadi sinyal kuat bahwa kekerasan terhadap anak, dalam bentuk apa pun, tidak akan ditol-



menunjukkan partisipasi angkatan kerja perempuan terus meningkat dalam satu dekade terakhir, yang secara langsung berdampak pada tingginya permintaan daycare. Sayangnya, pertumbuhan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat.

Kasus Little Aresha mencuat setelah orang tua korban mencurigai adanya perubahan perilaku dan kondisi fisik anak mereka. Dugaan kekerasan diperkuat melalui pemeriksaan lanjutan, termasuk rekaman CCTV yang menjadi

eransi.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo memastikan bahwa pemerintah kota telah mengantongi data lengkap terkait daycare berizin maupun tidak. Pemkot kini memperkuat koordinasi lintas dinas guna memastikan seluruh lembaga penitipan anak memenuhi standar yang ditetapkan.

"Pemkot kini memperkuat koordinasi lintas dinas guna memastikan seluruh lembaga penitipan anak memenuhi standar yang ditetapkan," katanya. ●

# SAMPAH JAKARTA DISULAP JADI LISTRIK, INVESTASI TEMBUS RP17 TRILIUN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi jangka panjang krisis sampah ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan setiap fasilitas mampu mengolah 2.500 hingga 3.000 ton sampah per hari.

Langkah konkret telah dimulai melalui penandatanganan kerja sama pembangunan dua fasilitas utama di kawasan Bantargebang dan Tanjungan, Kamal Muara. Kedua lokasi tersebut dirancang sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) dengan kapasitas besar guna mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir.

"Dua lokasi ini akan menjadi tulang punggung pengolahan sampah Jakarta, masing-masing dengan kapasitas 2.500 sampai 3.000 ton per hari," ujar Pramono di Kompleks Wali Kota Jakarta

rived Fuel (RDF) di Rorotan. Kombinasi teknologi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, dari pemilahan hingga konversi menjadi energi.

Jakarta saat ini menghadapi persoalan sampah yang kompleks. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menunjukkan produksi sampah harian ibu kota mencapai lebih dari 7.500 ton.

Sebagian besar masih berakhir di TPST Bantargebang, yang telah lama mengalami kelebihan kapasitas.

Dengan beroperasinya seluruh fasilitas PSEL dan RDF, pemerintah optimistis beban Bantargebang dapat dikurangi secara signifikan. Bahkan, Pramono menyebut potensi berbaliknya masalah yakni kekurangan bahan baku sampah



Timur, Selasa 5 Mei 2026.

Selain dua proyek tersebut, Pemprov DKI juga menyiapkan pembangunan fasilitas serupa di Sunter, serta penguatan sistem melalui fasilitas Refuse De-

untuk diolah bisa saja terjadi jika sistem berjalan optimal.

"Kalau semua fasilitas ini beroperasi, persoalan sampah bisa selesai. Tantangannya justru jangan sampai kita

kekurangan bahan baku untuk PLTSA," katanya.

Untuk tahap awal, pasokan utama akan difokuskan dari timbunan sampah lama di Bantargebang melalui metode cut and fill, sehingga tidak hanya mengatasi sampah baru, tetapi juga mengurangi gunung sampah yang telah ada selama bertahun-tahun.

### Investasi Jumbo dan Target Operasi 2028

Dari sisi pendanaan, proyek ini membutuhkan investasi besar. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan total kebutuhan dana mencapai sekitar USD 1 miliar atau setara Rp17,39 triliun.

Ia menjelaskan, pembangunan fasilitas dengan kapasitas 1.000 ton per hari membutuhkan sekitar Rp2 triliun. Dengan target kapasitas hingga 8.000 ton bahkan berpotensi meningkat menjadi 10.000-12.000 ton per hari, kebutuhan investasi pun melonjak signifikan.

"Kalau kapasitasnya 8.000 ton, investasinya sekitar USD 1 miliar. Namun bisa lebih besar karena kita juga ingin mengolah sampah lama di Bantargebang," ujarnya.

Pemerintah menargetkan fasilitas ini mulai beroperasi pada awal 2028. Saat ini, proyek memasuki tahap lanjutan berupa penentuan kontraktor dan persiapan konstruksi.

### Skema Bisnis dan Regulasi

Listrik yang dihasilkan dari PSEL akan dijual ke Perusahaan Listrik Negara dengan tarif sebesar USD 20 sen per kWh. Skema ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pengolahan sampah perkotaan berbasis teknologi ramah lingkungan.

Kebijakan tersebut menjadi payung hukum penting dalam menarik investasi sekaligus menjamin kepastian usaha bagi pengembang proyek energi berbasis sampah.

Sebagai bagian dari strategi menyeluruh, Pemprov DKI juga telah menerbitkan Instruksi Gubernur terkait pemilahan sampah dari sumber. Dalam waktu dekat, deklarasi bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup akan dilakukan untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut.

Langkah ini dinilai krusial karena keberhasilan PSEL tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kedisiplinan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan industri.

Pramono menegaskan bahwa percepatan proyek menjadi prioritas utama pemerintahannya. Ia telah menginstruksikan jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Asisten Pembangunan untuk segera menindaklanjuti seluruh tahapan

pergeseran paradigma pengelolaan sampah di Jakarta dari sekadar pembuangan menuju pemanfaatan sebagai sumber energi terbarukan. Jika terealisasi sesuai target, Jakarta berpotensi menjadi salah satu kota di Asia Tenggara yang berhasil mengintegrasikan sistem ekonomi sirkular dalam skala besar.

Namun, tantangan tetap ada, mulai dari kesiapan infrastruktur, konsistensi kebijakan, hingga penerimaan publik ter-



teknis.

"Kami ingin proyek ini berjalan cepat dan menjadi solusi nyata. Untuk batch kedua, saya minta bisa selesai secepat mungkin," tegasnya.

Pembangunan PSEL menandai

hadap teknologi pengolahan sampah. Dengan investasi besar dan dukungan regulasi yang kuat, keberhasilan proyek ini akan menjadi tolok ukur transformasi pengelolaan lingkungan perkotaan di Indonesia. ●

# NEW MEDIA DI LINGKARAN ISTANA

Bakom RI menyambut kehadiran Indonesia New Media Forum. Bagaimana selanjutnya?

**B**adan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk Presiden pada 17 September 2025. Namun dengan Kepala Bakom dijabat oleh Muhammad Qodari sejak Senin, 27 April 2026, tanggal pelantikannya, yang menonjol adalah melakukan pendekatan ke komunitas homeless media untuk menyinergikan penyebaran informasi.

Dalam konferensi pers dipimpin Kepala Bakom Muhammad Qodari, ia menyambut kehadiran Indonesia New

bertransformasi menjadi new media. "New Media Forum ini wadah kolaborasi dari beberapa pelaku new media. Jadi dulu namanya dikenal dengan istilah homeless media, tapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media," kata dia.

Kepala Bakom ini menyebutkan, New Media Forum yang hadir. Hitung punya hitung, 40 entitas jumlahnya: Folkative, Indozone, Dagelan, Indomusikgram, Infipop, Narasi, Muslimvox, USS Feeds, Bapak-bapak ID, Menjadi Manusia, GNFI, Cretivox, Kok Bisa?, Taubatters, Pandemictalks, Kawan Hawa, Volix Me-



Media Forum di samping media konvensional. "Pada kesempatan ini, sebelum masuk kepada materi, kami juga menyambut hangat kehadiran teman-teman dari New Media Forum, mitra baru dari Badan Komunikasi Pemerintah dalam ekosistem media digital di Indonesia," ujar Qodari di acara yang berlangsung pada Rabu, 6 Mei 2026.

Qodari menyebut para pelaku new media ini dulunya sering disebut dengan istilah 'homeless media'. Para 'homeless media' ini, katanya, akhirnya

dia, Ngomongin Uang, Big Alpha, Good States, Hai Dulu, Proud Project, Vibes, Unframe, Kumpul Leaders, CXO Media, How To Do Nothing, Everless Media, Geometry Media, Folks Diary, Dream, Melodi Alam, NKTSHI, Modestalk, Lead Media, Nalar TV, hingga Mahasiswa dan Jakarta serta North West.

Toh keesokan harinya, Kamis, 7 Mei 2026, rangkaian bantahan muncul dari beberapa New Media. Narasi yang merasa dicatut oleh Qodari menyatakan tidak pernah bergabung dalam

Indonesia New Media Forum. Mereka mengatakan tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak menghadiri pertemuan maupun konferensi pers terkait Indonesia New Media Forum ataupun Badan Komunikasi Pemerintah sehari sebelumnya.

"Narasasi merupakan media resmi yang terdaftar dan terverifikasi Dewan Pers dengan nomor sertifikat 472/DP-Verifikasi/K/XI/2019. Narasasi beroperasi sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang tercantum pada situs resmi Dewan Pers," sebagaimana dikutip melalui akun Instagram @narasinewsroom.

Selain itu, akun Instagram Ngomongin Uang juga mengeluarkan pernyataan sikap bahwa tidak pernah menerima undangan, menghadiri pertemuan, maupun melakukan komunikasi, baik secara digital maupun tatap muka dengan Badan Komunikasi Pemerintah. "Oleh karena itu, klaim di berbagai media yang menyatakan bahwa Ngomongin Uang digandeng ataupun menjadi mitra pemerintah adalah tidak benar," sebagaimana dikutip melalui akun Instagram @ngomonginuang.

Sedangkan Founder (pendiri) Bapak2ID, James Jan Markus, membantah pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Qodari. "Beritanya tidak benar, dan kami tidak pernah menghadiri acara yang disebutkan," ujar James, Kamis, 7 Mei 2025.

Sedangkan Pimpinan Redaksi Indozone Fahmy Fotaleno mengemukakan Indonesia New Media Forum (INMF) adalah inisiatif mandiri untuk memperkuat jejaring antar-new media. "Tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintah. Fokus utama kami adalah mewujudkan ekosistem media baru yang mengedepankan aspek kredibilitas, akurasi dan bertanggung jawab," katanya.

Dia juga menegaskan, Indozone adalah media yang berdiri tegak di atas kepentingan publik. "Indozone adalah media yang dijalankan secara profesional dan telah terverifikasi oleh Dewan Pers. Olehnya itu keberadaan kami sah secara hukum," ungkap Fahmi.

Nah, di mata wartawan senior Darto Wiryosukarto, M Qodari yang ia sebut spin doctor Istana, tak perlu menyewa

buzzer anonim seperti waktu sebelumnya. "Sekarang ada yang lebih murah, lebih nurut, lebih haus --tampil di-- FYP (For You Page), beranda utama aplikasi TikTok sesuai dengan algoritma akun pengguna. Itulah pengertian salah satu homeless media menurut Darto.

Menurut Darto, ini bukan media melainkan endorser pakai APBN. Dulu, sambungnya, buzzer dibayar buat trending; sekarang homeless media beroleh gelar mitra strategis sehingga tampak sah.

sampai 5 miliar satu bulan, hemat kami yang terbaik adalah kita bisa engage agar membuat kualitas new media makin meningkat," ungkap Qodari.

Tanggapan datang dari Plt Deputi III Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah RI Kurnia Ramadhana. Ia memastikan tidak ada kerja sama atau kontrak antara Bakom dan Indonesia New Media Forum.

"Bakom menghormati penuh independensi new media maupun media konvensional. Pertemuan dengan ber-



"Jadi, Pak Qodari, selamat upgrade. Dari cebong-kampret ke FYP-kontrak. Dari akun bodong ke media bodong. Satu hal yang nggak berubah: yang dibodohin tetap rakyat," ungkap Darto.

Apa yang dikemukakan oleh Darto sebenarnya tanggapan dari pernyataan Qodari soal New Media. "Dengan realitas bahwa new media sudah punya pengikut yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai angka miliaran, 4

bagai pelaku new media semata-mata bertujuan membuka ruang komunikasi dan memperluas akses informasi publik," kata Kurnia dalam siaran pers, dikutip Jumat, 8 Mei 2026.

Toh Indonesia New Media Forum sudah terbentuk. Apakah tumpang-tindih, malah bersaing dengan media konvensional daring atau bersinergi, yang jelas lingkaran Istana semakin ramai, dan viral. Boleh jadi akan lebih panjang lagi ceritanya. ●



## GULA, GAYA HIDUP, DAN BOM WAKTU GAGAL GINJAL DI USIA PRODUKTIF

Penyakit gagal ginjal kini tidak lagi identik dengan kelompok lanjut usia. Pemerintah mencatat tren peningkatan kasus justru mulai bergeser ke kelompok usia produktif, termasuk anak muda, dipicu kombinasi pola konsumsi tinggi gula, gaya hidup sedentari, hingga keterlambatan deteksi dini.

**P**eringatan itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menilai perubahan pola penyakit ini menjadi alarm serius bagi sistem kesehatan nasional.

Menurut Budi, gagal ginjal kini bukan hanya persoalan medis, tetapi juga ancaman pembiayaan negara karena menjadi salah satu penyakit katastrofik dengan beban terbesar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Sudah bukan penyakit orang tua saja, sekarang banyak anak-anak muda usia produktif juga terkena gagal ginjal," ujar Budi.

Ia menyoroti kebiasaan konsumsi minuman tinggi gula, termasuk minuman cepat saji dan produk "kekinian", yang dinilai berkontribusi pada akumulasi risiko penyakit kronis dalam jangka panjang.

"Dan kamu setiap hari nyicil untuk kena penyakit ini," kata Budi, mengingatkan bahwa konsumsi gula berlebih secara terus-menerus dapat berdampak serius terhadap fungsi ginjal.

Ancaman gagal ginjal tak hanya terlihat dari peningkatan kasus, tetapi juga lonjakan biaya penanganannya. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Budi mengungkapkan pembiayaan penyakit ginjal melalui JKN mencapai Rp13,3 triliun, menjadikannya penyakit dengan beban tertinggi kedua setelah penyakit jantung yang menembus Rp17,3 triliun.

Lebih mengkhawatirkan, biaya pengobatan gagal ginjal melonjak drastis hingga 476 persen dalam lima tahun terakhir.

"Ada angka menarik, ginjal naiknya sampai 476 persen dalam lima tahun terakhir," ujar Budi.

Kementerian Kesehatan menilai lonjakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari tingginya prevalensi diabetes, hipertensi, obesitas, dan konsumsi gula berlebih empat faktor utama yang diketahui berkaitan erat dengan penurunan fungsi ginjal kronis.

Sebagai langkah pengendalian, pemerintah tengah mempercepat kebijakan pelabelan kandungan gula atau

nutri-level pada produk pangan dan minuman, agar masyarakat lebih mudah mengenali risiko konsumsi harian mereka.

"Itu sebabnya kita mau tekan gula ini supaya jangan orang Indonesia gagal ginjal sampai Rp13 triliun sendiri BPJS hanya untuk bayar beban ginjal," tegasnya.

Di kalangan medis, perubahan pola penyakit ini dinilai sejalan dengan perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan. Konsumsi makanan ultra-proses, kurang aktivitas fisik, dehidrasi, penggunaan obat anti-nyeri tanpa pengawasan, hingga kebiasaan minum berpemanis

edukasi publik terkait penyakit ginjal.

Masyarakat lebih sadar pada kandungan gula harian yang kerap luput diperhitungkan.

"Coba tebak, berapa jumlah gula yang masuk ke tubuh kalian setiap menghabiskan satu gelas minuman manis cepat saji itu?" ujarnya.

Di sisi layanan, persoalan lain muncul dari tingginya ketergantungan pada hemodialisis atau cuci darah. Data Indonesian Renal Registry (IRR) 2024 menunjukkan, dari 136.793 pasien aktif dan 60.034 pasien baru, sekitar 98 persen menjalani hemodialisis.

Sebaliknya, penggunaan terapi man-

ginjal lebih lama.

Di banyak negara, pendekatan ini juga digunakan untuk mengurangi tekanan layanan rumah sakit.

Selain pencegahan berbasis perubahan perilaku, pemerintah juga mulai mengevaluasi sistem pembiayaan JKN untuk penyakit katastrofik lain, termasuk stroke, agar kualitas layanan tidak tertinggal.

Berikut lima penyakit dengan beban JKN tertinggi saat ini:

1. Jantung: Rp17,3 triliun
2. Gagal ginjal: Rp13,3 triliun
3. Kanker: Rp10 triliun
4. Stroke: Rp7 triliun

**9 Gejala Gagal Ginjal yang Sering Diabaikan**

1. **Mudah lelah**  
Penumpukan limbah & anemia bisa bikin tubuh lemas, lesu, dan sulit fokus.
2. **Kulit kering & gatal**  
Terjadi karena gangguan keseimbangan mineral & limbah yang menumpuk di tubuh.
3. **Kencing berdarah**  
Tanda saringan ginjal rusak, bisa juga karena infeksi atau batu ginjal.
4. **Tubuh bengkak**  
Cairan menumpuk akibat ginjal tak bisa buang kelebihan natrium, terutama di kaki & tangan.
5. **Susah tidur**  
Nyeri kaki, gelisah, atau sleep apnea bisa bikin penderita gagal ginjal susah tidur.
6. **Tulang melemah**  
Ketidakseimbangan kalsium-fosfor bisa bikin tulang rapuh & mudah rusak.
7. **Hilang nafsu makan**  
Penumpukan racun bikin makanan terasa tidak enak atau bikin mual.
8. **Nyeri sendi**  
Penumpukan protein abnormal bisa menyerang sendi, bikin kaku & nyeri.
9. **Urine berbusa**  
Tanda kebocoran protein ke urine. Waspadai jika terjadi terus-menerus.

Baca artikel-artikel kesehatan terpercaya seputar kesehatan dan lifestyle di [www.hellosehat.com](http://www.hellosehat.com)



disebut mempercepat kerusakan ginjal pada usia muda.

Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI), yang kerap mendorong skrining dini penyakit ginjal, menilai banyak pasien baru terdiagnosis saat fungsi ginjal sudah menurun signifikan.

Menurut kalangan nefrolog, penyakit ginjal kronik sering berkembang tanpa gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi melalui pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kreatinin, dan urin sederhana menjadi kunci pencegahan.

"Masalah terbesar kita bukan hanya pengobatan, tetapi keterlambatan mengetahui seseorang sudah mengalami kerusakan ginjal," ujar seorang sumber nefrolog yang kerap terlibat dalam

diri Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) baru sekitar 2 persen, sementara transplantasi ginjal masih di bawah 1 persen.

Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Richard Samosir, menilai kondisi itu berisiko memicu tekanan besar terhadap kapasitas layanan kesehatan nasional

"Jika hanya bergantung pada mesin cuci darah, sementara jumlah pasien terus meningkat, kapasitas layanan tidak akan mampu mengejar. Antrean akan semakin panjang dan beban anggaran kesehatan ikut melonjak," ujarnya.

Menurut Tony, diversifikasi terapi ginjal harus menjadi agenda serius pemerintah. CAPD, misalnya, memungkinkan pasien menjalani terapi mandiri di rumah, lebih fleksibel, serta dinilai dapat membantu mempertahankan fungsi

5. Sirosis hati: Rp280 miliar

Bagi banyak pengamat kesehatan, data tersebut menunjukkan bahwa strategi kuratif semata tidak lagi cukup. Fokus harus bergeser pada pencegahan, edukasi publik, serta intervensi sejak usia muda

Tanpa perubahan pola konsumsi dan reformasi sistem layanan, beban pembiayaan diperkirakan terus meningkat dalam 10 hingga 20 tahun mendatang.

Di tengah tren itu, pesan pemerintah menjadi sederhana namun mendesak, gagal ginjal bukan ancaman masa tua. Ia bisa dimulai dari kebiasaan kecil hari ini dari apa yang diminum, dimakan, dan diabaikan setiap hari. Dan jika tidak dikendalikan, bom waktunya bukan hanya menyerang kesehatan individu, tetapi juga daya tahan sistem kesehatan nasional. ●

# RAFFI AHMAD DAN MISI BESAR BPJS KESEHATAN

Penunjukan Raffi Ahmad sebagai Duta Kehormatan BPJS Kesehatan menandai pendekatan baru dalam memperkuat sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

**D**i tengah tantangan memperluas literasi kesehatan publik, langkah ini dinilai bukan sekadar simbolik, tetapi bagian dari strategi membangun kedekatan program negara dengan masyarakat, terutama generasi muda.

Penganugerahan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, yang menyebut pemilihan Raffi Ahmad didasarkan pada rekam jejak pengaruh sosial, komitmen publik, dan kapasitas komunikasi yang kuat.

"Beliau adalah tokoh panutan, memiliki komitmen, dan ingin membantu keberhasilan program-program ini," ujar Prihati.

Penunjukan ini menjadi yang pertama dalam sejarah BPJS Kesehatan. Kehadiran figur publik diharapkan mam-

pu menjembatani pesan-pesan layanan kesehatan yang selama ini kerap dipersepsikan formal dan jauh dari keseharian masyarakat.

Masuknya Raffi Ahmad sebagai duta kehormatan dipandang sebagai upaya memperluas penetrasi edukasi kesehatan melalui kanal yang lebih relevan dengan kelompok usia produktif.

Di era dominasi media sosial dan komunikasi digital, peran figur berpengaruh dinilai efektif membangun kesadaran baru tentang pentingnya pencegahan penyakit dan gaya hidup sehat.

Raffi sendiri menekankan bahwa kesehatan tidak boleh dipahami sebatas urusan saat sakit.

"Jangan nunggu sakit dulu baru mau sehat. Hidup sehat itu dimulai dari pikiran positif, pola makan sehat, olahraga, dan



semangat gotong royong,” ujar Raffi

Pesan tersebut sejalan dengan transformasi paradigma JKN yang kini tidak hanya berfokus pada pembiayaan layanan kuratif, tetapi juga penguatan promotif dan preventif.

Saat ini Program JKN disebut telah menjangkau lebih dari 285 juta peserta, menjadikannya salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, BPJS Kesehatan juga memperkuat layanan melalui digitalisasi, integrasi sistem, serta respons pengaduan secara real time.

Dalam konteks itu, peran duta kehormatan diproyeksikan bukan hanya mendukung kampanye, tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial nasional.

Raffi menyebut amanah tersebut menjadi pengingat untuk turut mengawal keberlangsungan program yang telah menopang akses kesehatan masyarakat

“Amanah ini menjadi pengingat bagi kami dan tim untuk terus berperan aktif mendukung serta mengawal keberlanjutan sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Program JKN,” katanya.

Perhatian pemerintah terhadap sektor kesehatan, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto, disebut menjadi faktor penting yang mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor.

### Lima Fokus Peran Raffi Ahmad sebagai Duta Kehormatan

Dalam peran barunya, sedikitnya ada lima fokus yang akan menjadi sorotan:

Pertama, memperluas edukasi publik tentang JKN.

Raffi diharapkan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, hak, dan kewajiban peserta.

Kedua, membangun kesadaran hidup sehat sejak dini.

Edukasi pencegahan penyakit dan gaya hidup sehat menjadi pesan utama yang diarahkan ke generasi muda.

Ketiga, memperkuat keberlanjutan JKN.

Kehadiran duta kehormatan diharapkan mendukung kepercayaan publik terhadap sistem jaminan kesehatan nasional.

Keempat, mendorong kolaborasi so-

sial.

Raffi mengajak influencer, komunitas, dan masyarakat luas terlibat dalam semangat gotong royong mendukung pemerataan layanan kesehatan.

Kelima, memperluas jangkauan komunikasi digital.

Dengan kekuatan media sosial, sosialisasi program diharapkan lebih efektif menjangkau kelompok yang selama ini belum tersentuh komunikasi konven-

tong royong bersama BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Di tengah perubahan pola komunikasi publik dan tantangan sistem kesehatan nasional, langkah BPJS Kesehatan menggandeng figur populer menunjukkan satu hal: masa depan jaminan kesehatan bukan hanya soal pembiayaan layanan, tetapi juga soal membangun kesadaran kolektif.

Dan di titik itulah, peran seorang



sional.

BPJS Kesehatan menegaskan penunjukan ini melalui proses seleksi dan ke depan model serupa berpotensi diperluas ke kalangan akademisi, praktisi kesehatan, hingga tokoh masyarakat.

Bagi Raffi Ahmad, mandat ini tidak berhenti pada gelar kehormatan. Ia menyebut keterlibatan publik, khususnya anak muda, menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.

Ia juga mengajak generasi muda menjadikan kepedulian terhadap kesehatan sebagai gerakan bersama. “Kalau peduli terhadap kesehatan, ayo kita go-

duta menjadi relevan—bukan sekadar wajah kampanye, melainkan penghubung antara kebijakan dan partisipasi masyarakat.

Pengamat kebijakan publik kesehatan dari Universitas Indonesia, Prof. Hasbullah Thabrany, menilai keterlibatan tokoh publik dapat menjadi instrumen efektif selama diikuti edukasi substansial.

“Literasi JKN masih menjadi tantangan. Jika figur publik mampu menghubungkan pesan kebijakan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, dampaknya bisa signifikan,” ujarnya. ●



## Air Terjun Toroan

# KEAJAIBAN DI PESISIR MADURA SAAT AIR TERJUN BERTEMU LAUT

Madura selama ini lebih dikenal lewat tradisi karapan sapi, kuliner khas, hingga wisata religi yang tersebar di berbagai wilayah. Namun di bagian timur Pulau Garam, tersimpan sebuah lanskap alam yang menghadirkan pengalaman berbeda dari destinasi wisata pada umumnya.

**N**amanya Air Terjun Toroan, sebuah keajaiban geologi di pesisir selatan Madura yang menawarkan panorama langka, air terjun yang jatuh langsung ke laut.

Berlokasi di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Air Terjun Toroan menjadi salah satu destinasi yang mulai menarik perhatian wisatawan domestik maupun pecinta ekowisata.

Bukan tanpa alasan, keberadaan air terjun yang bermuara langsung ke laut merupakan fenomena yang sangat jarang ditemukan, bahkan di Indonesia.

### Lanskap Langka di Tepi Laut

Berbeda dengan air terjun pada umumnya yang berada di tengah pegunungan atau kawasan hutan pedalaman, Toroan justru hadir di kawasan pesisir. Aliran air yang berasal dari Sungai Payung jatuh dari tebing setinggi sekitar 20 meter, lalu langsung bertemu dengan air

laut di bawahnya.

Fenomena ini menciptakan perpaduan visual yang dramatis. Air tawar yang mengalir deras beradu dengan ombak laut, membentuk lanskap unik yang menjadi daya tarik utama kawasan ini.

Di saat air laut sedang pasang, percikan ombak bahkan terlihat menyatu dengan jatuhnya air terjun, menciptakan pemandangan yang sulit ditemukan di tempat lain.

Dalam sejumlah catatan pengembangan pariwisata daerah, formasi seperti ini termasuk kategori coastal waterfall atau air terjun pesisir sebuah bentang alam yang relatif langka secara global.

### Warna Keemasan yang Menjadi Ciri Khas

Salah satu hal yang kerap membuat pengunjung penasaran adalah warna air Toroan yang tampak kekuningan atau keemasan, terutama saat debit air meningkat.

Fenomena ini bukan berarti airnya

tercemar, melainkan dipengaruhi kondisi alami. Kandungan sedimen, karakter tanah kapur khas Madura, serta material organik yang terbawa dari hulu kerap memunculkan rona keemasan pada aliran air, terutama saat terkena pantulan cahaya matahari.

Efek visual ini justru menjadi identitas Toroan yang membedakannya dari air terjun lain. Saat sore menjelang, warna air berpadu dengan cahaya matahari dan birunya laut, menghadirkan panorama yang kerap diburu fotografer.

### Harmoni Hutan Kecil, Tebing, dan Laut

Daya tarik Toroan tidak berhenti pada air terjunnya. Kawasan di sekelilingnya dipenuhi vegetasi rindang yang menciptakan suasana teduh di tengah iklim

pesisir yang biasanya panas.

Pepohonan yang tumbuh di sekitar tebing berfungsi menjaga kelembapan alami kawasan. Semilir angin laut berpadu dengan suara jatuhnya air menghadirkan atmosfer yang menenangkan.

Di bawah air terjun terdapat kolam alami yang kerap dimanfaatkan pengunjung untuk bermain air atau sekadar merasakan kesegaran aliran sungai. Namun wisatawan tetap disarankan berhati-hati, terutama saat debit air tinggi atau ombak laut sedang besar.

Bagi pencinta lanskap alami, tempat ini menghadirkan tiga elemen sekaligus dalam satu ruang: sungai, tebing, dan laut

Letak Air Terjun Toroan yang tidak jauh dari kawasan Pantai Nepa menjadi

nilai tambah bagi wisatawan. Destinasi ini dapat dimasukkan dalam satu jalur perjalanan wisata di Sampang.

Pengunjung bisa menikmati pesisir Nepa, kawasan konservasi monyet ekor panjang di sekitar hutan Nepa, lalu melanjutkan perjalanan menuju Toroan.

Akses menuju lokasi juga relatif mudah. Dari pusat Kota Sampang, perjalanan darat menuju Kecamatan Ketapang dapat ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam, tergantung kondisi lalu lintas.

Jalur menuju objek wisata kini jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu, meski sebagian titik tetap membutuhkan kehati-hatian karena berada di kawasan tebing pesisir.

Dalam perspektif pengembangan wisata berkelanjutan, Toroan memiliki potensi besar sebagai destinasi ekowisata.

Kawasan ini tidak hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga menyimpan nilai edukasi tentang bentang geologi pesisir, ekosistem peralihan air tawar dan laut, hingga konservasi lingkungan.

Sejumlah pemerhati pariwisata menilai Toroan dapat dikembangkan sebagai destinasi unggulan Madura berbasis nature tourism, asalkan pengelolaannya mengedepankan konservasi.

Tantangan terbesar justru ada pada menjaga kelestarian kawasan dari sampah wisata, kerusakan vegetasi, serta pembangunan yang berlebihan.

Jika dikelola dengan tepat, Toroan dapat menjadi contoh bagaimana destinasi alami tumbuh tanpa kehilangan karakter aslinya.

Bagi wisatawan yang ingin menikmati panorama terbaik, pagi dan sore hari menjadi waktu ideal untuk datang.

Pada pagi hari, suasana relatif tenang dengan udara segar dan cahaya lembut untuk fotografi. Sementara sore menghadirkan momen dramatis ketika cahaya matahari memantul pada air terjun dan permukaan laut.

Musim kemarau juga kerap menjadi pilihan terbaik karena akses lebih aman dan visibilitas lanskap lebih jelas.

Meski demikian, saat musim hujan debit air biasanya lebih besar sehingga air terjun tampak lebih megah, walau pengunjung perlu memperhatikan faktor keselamatan. ●





# MENGHITUNG UANG, BARANG, DAN ORANG

Danantara akan terlibat dalam pengelolaan ojek online. Perlu cermat menghitung uang, barang, dan tentu saja orang yang menggantungkan hidupnya dari sana.

Pembelaan Presiden Prabowo Subianto terhadap para pengemudi ojek online (ojol), membuka kemungkinan percepatan merger antara Gojek (bagian dari GoTo) dan Grab Indonesia. Terlebih Presiden menegaskan pula sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) soal ojol agar potongan aplikator maksimal 8 persen, bukan sampai 20 persen seperti sebelumnya.

"Kita juga mengatur, saya juga telah tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Tadi, pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi," kata Prabowo di hadapan massa dalam perayaan May Day di kawasan Monumen Nasional Jakarta, Jumat pagi, 1 Mei 2026.

Dengan ungkapan sehari-hari yang lebih mudah dipahami massa, Prabowo menegaskan pembelaannya terhadap para pengemudi ojol. "Enak aje. Lu yang keringat, dia yang dapet duit. Sorry aje,"

kata Prabowo disambut sorakan massa yang berjubel.

Menurut dia, pengemudi ojol yang mempertaruhkan nyawanya setiap hari untuk mencari uang, bukan aplikator (pemilik aplikasi dalam jaringan –darling– internet). Aplikator, sambungnya, selama ini terlalu diuntungkan, padahal driver ojol lah yang berkeringat di lapangan.

Jadi, Prabowo menegaskan potongan pendapatan driver ojol harus berada di bawah angka 10 persen. "Ojol kerja keras. Ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari. Ojol, aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Gimana ojol, setuju 20 persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? 10? Kalian minta 10 persen? Ya, saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen. Harus di bawah 10 persen," ujar Prabowo.

Alhasil, muncul angka delapan persen melalui Perpres. Toh masih menjadi pertanyaan, bagaimana penerapan Perpres Nomor 27 Tahun 2026?

Salah satu kemungkinan adalah merger (penggabungan usaha) Grab

Indonesia, yang menjadi bagian dari jaringan ojol global, dan Gojek bagian dari GoTo. Sebagai jembatan merger kedua operator terbesar ojol di Indonesia, Danantara dapat berperan antara lain lantaran memiliki saham melalui antara lain anak-cucu BUMN seperti Telkomsel. Sedangkan pengendali Gojek sejauh ini memiliki kedekatan dengan kalangan pemerintah seperti Hans Patuwo yang resmi diangkat sebagai Direktur Utama (CEO) GoTo menggantikan Patrick Sugiyo Walujo, dengan Agus D.W. Martowardojo sebagai Komisaris Utama pada akhir 2025.

“Masuknya Danantara ke dalam struktur pemegang saham GOTO dan potensi keterlibatannya dalam Grab memicu spekulasi merger antara kedua raksasa tersebut. Jika Danantara bertindak sebagai jembatan untuk merger Grab-Gojek, maka akan tercipta entitas gabungan yang menguasai 91 persen pasar Indonesia,” seperti dikutip dari kajian Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) awal Mei 2026.

Toh isu merger Gojek-Grab yang sudah pasang-surut sejak 2018 itu berimplikasi luas. Di satu sisi, pemerintah ingin menurunkan komisi menjadi 8 persen untuk membela rakyat (pengemudi). Di sisi lain, menciptakan monopoli pasar justru berisiko merugikan konsumen (penumpang) di masa depan karena tidak adanya persaingan harga.

Lebih dari itu, keterlibatan Istana hingga terbitnya Perpres No 27 Tahun 2026 tersibak sejak lama dan memahami soal implikasi merger terhadap konsumen pengguna jasa. Pada November 2025, misalnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah sudah mendengar rencana penggabungan kedua perusahaan yang menguasai layanan transportasi daring itu.

“Iya. Rencananya memang begitu (Grab-GoTo bergabung),” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 November 2025.

Prasetyo belum bisa memastikan skema penggabungan yang akan diambil kedua perusahaan dalam bentuk merger atau akuisisi. “Masih dicari bentuknya,” ujarnya.

Ia juga menyinggung keterlibatan BPI Danantara dalam pembahasan rencana

penggabungan tersebut. Prasetyo belum merinci peran pengelola BUMN itu. Namun, Telkom dan anak usahanya, PT Telekomunikasi Selular Indonesia (Telkomsel) sudah berinvestasi sekitar Rp6,4 triliun untuk memiliki saham GoTo.

“Danantara juga ikut terlibat di situ karena ada proses korporasinya juga yang menjadi bagian dari yang dibicarakan gitu. Makanya minta tolong sabar dulu,” ungkap Prasetyo.

gerakkan ekonomi. Jadi tujuan utamanya arahnya ke situ,” ungkap mensesneg Prasetyo.

Toh, sejak 2025 pula sudah tersiar kabar Grab Holdings Ltd, perusahaan teknologi berbasis di Singapura, hendak mengakuisisi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Namun, rencana penggabungan itu dikabarkan menemui kendala regulasi dari pemerintah Indonesia.

Apakah Perpres No 27 Tahun 2026



Lebih lanjut, Prasetyo memastikan penggabungan kedua perusahaan tidak akan menciptakan monopoli. Ia menekankan tujuan dari penggabungan itu adalah agar perusahaan tetap berjalan dengan optimal dan tetap bisa menggerakkan ekonomi melalui keterlibatan mitra.

“Karena bagaimana pun perusahaan ini adalah pelayanan yang di situ tercipta tenaga kerja saudara-saudara kita yang menjadi mitra itu jumlahnya cukup besar. Dan sekarang kita tersadar bahwa ojol adalah pahlawan ekonomi, meng-

menjadi salah satu bagian dari solusi mengatasi kendala merger Grab dan Gojek? Masih perlu waktu untuk melihat kesepakatan bisnisnya. Terlebih merger dan akuisisi sangat berbeda pengertiannya. Merger adalah penggabungan, akuisisi adalah pencaplokan.

Tentunya perlu pula hitung-hitungan peningkatan penghasilan para pengemudi ojol yang menjadi perhatian Presiden Prabowo. Hingga awal 2026, jumlah mitra aktif pengemudi gabungan Gojek dan Grab tercatat sekitar 6,8 juta orang. •



## 53 TAHUN ASDP MENYEBERANG

Melayani jalur penyeberangan (ferry) sejak 1973, apa kabar PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di perjalanan 53 tahunnya? Keselamatan menjadi prioritas.

Prioritas keselamatan bukan hanya untuk para pengguna layanannya tentu saja, melainkan juga kesinambungan badan usaha milik negara yang menyeberangkan warga, kendaraan, maupun barang di laut, sungai, maupun danau, hingga ke daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Akan banyak yang terdampak jika ASDP Ferry terganggu.

Nah, prioritas keselamatan ini mengemuka dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 melalui kegiatan puncak ASDP Charity Run di Kantor Pusat ASDP, Jakarta, Minggu, 10 Mei 2026. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama layanan penyeberangan dengan memperkuat standard operasional, pengawasan, dan kesiapan armada.

"Di tengah kompleksitas operasional dan tingginya mobilitas nasional, aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama perusahaan," kata Heru.

Apa yang dikemukakan Dirut Heru memang relevan karena belakangan ini terjadi kecelakaan di jalur darat seperti kecelakaan kereta api di Bekasi, Jawa Barat, maupun kecelakaan bus penumpang ALS di Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan.

Toh Heru mengakui, sepanjang 2025, ASDP masih menghadapi sejumlah insiden pelayaran, mulai dari kecelakaan, kapal kandas, hingga tabrakan kapal. meski begitu, ASDP berhasil menjaga tingkat kecelakaan kapal pada angka 0,220 persen, lebih baik dibanding target perusahaan sebesar 0,230 persen, dengan total lima kecelakaan kapal sepanjang tahun.

Heru menegaskan keselamatan harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap proses operasional perusahaan. "Keselamatan tidak boleh dianggap selesai. Ini harus menjadi kesadaran kolektif dan prioritas utama dalam setiap lini pelayanan dan operasional kita," ungkapnya.

Di sisi lain, ASDP terus memperkuat

perannya sebagai penghubung wilayah nusantara, khususnya daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).

Hingga akhir 2025, layanan penyeberangan perintis ASDP mencatat lebih dari 93 ribu trip atau tumbuh 11 persen dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Dari sisi volume, sepanjang tahun 2025, total penumpang tercatat mencapai 7,8 juta orang. Pada periode Angkutan Lebaran 2025 saja, volume penumpang melonjak hingga 5,82 juta orang (naik 10,5 persen dari 2024).

Proyeksi total penumpang pada 2026 terus meningkat. Pada masa Angkutan Lebaran 2026, tercatat 4,72 juta penumpang hanya dalam periode arus mudik dan balik nasional.

Untuk volume kendaraan, sepanjang 2025, ASDP melayani total 15,8 juta unit. Namun, pada periode puncak Lebaran, volume kendaraan sempat mengalami penurunan tipis 2 persen karena distribusi moda transportasi yang lebih merata. Volume kendaraan pada masa Lebaran 2026 mencapai 1,21 juta unit di 15 lintasan pantauan nasional, tumbuh delapan persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Kinerja finansial juga menggembirakan. Sepanjang 2025 ASDP membukukan laba senilai Rp285,4 miliar. Sedangkan pada periode yang sama pendapatan kotornya tercatat Rp 4,96 triliun. Dari sinilah, ASDP dengan laba belum sampai enam persen pada 2025 bukan sekadar berorientasi keuntungan.

"Capaian tersebut menegaskan peran strategis ASDP bukan hanya sebagai operator transportasi, tetapi juga perekat konektivitas dan penggerak ekonomi nasional," ujar Sekretaris Perusahaan ASDP Windy Andale, Senin, 11 Mei 2026.

Meski begitu, kinerja pada 2025 tak ubahnya sebagai keberhasilan mengatasi beban di tahun sebelumnya. Sebagaimana dikemukakan Heru dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis, 2 April 2026, kinerja keuangan ASDP sepanjang 2024 menanggung beban biaya

hingga mencapai sekitar Rp80,81 miliar. Sementara itu, pada 2025 tercatat sebesar Rp50,62 miliar.

"Kami itu ya, menanggung beban yang sampai dengan tahun 2025 per tahunnya itu 50,62 miliar. Lalu kemudian tahun 2024 itu 80,81 miliar," ujar Heru.

Heru mengatakan, beban tersebut berasal dari layanan perintis perusahaan pelat merah melalui public service obligation (PSO) atau penugasan yang diberikan pemerintah kepada BUMN yang lebih besar dibandingkan dengan layanan komersial.

Berdasarkan data paparannya, ASDP saat ini melayani sebanyak 227 lintasan perintis atau mengambil porsi 71,4 persen. Sementara itu, layanan komersial hanya sebanyak 91 lintasan atau setara 28,6 persen.

"Dari 28,6 persen kapal komersial ini, ini tentunya harus meng-cover sekitar

71,6 persen dari kapal perintis dan beberapa biaya yang kemudian tidak di-cover oleh biaya subsidi," tutur dia.

Di sisi lain, lanjut Heru, perseroan juga dihadapkan pada kondisi sebagian besar atau hampir sebanyak 100 aset kapal yang usianya telah mencapai lebih dari 30 tahun, yang sudah membutuhkan peremajaan.

Mayoritas kapal yang sudah tua memiliki kapasitas kurang dari 1.000 penumpang. "Kapal kami sebagian besar ini kapalnya di atas 30 tahun. Dan itu kapasitas ya itu kecil-kecil di bawah 1.000. Jadi mohon izin kami juga membutuhkan dukungan," kata dia.

Nah, relevan lagi dengan prioritas keselamatan para pengguna jasa ASDP. Toh berharap keselamatan penumpang perlu seiring dengan upaya menjaga kesinambungan ASDP. Tetaplah pandai meniti buih hingga selamat badan sampai ke seberang. ●



# PAPARKAN PROGRAM PRIORITAS PADA MAHASISWA

Mahasiswa merupakan kunci dalam menentukan arah masa depan bangsa, termasuk dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian nasional.

Untuk itu Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bertemu langsung dengan 118 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari seluruh Indonesia membahas berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari program pembangunan pertanian, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), hingga capaian dan transformasi besar sektor pertanian nasional.

Pertemuan ini menjadi ruang strategis pertukaran gagasan antara pemerintah dan generasi muda. Sejak awal diskusi, suasana berlangsung hidup dengan partisipasi aktif mahasiswa dari berbagai daerah yang menyampaikan per-

tanyaan kritis, masukan, hingga laporan langsung dari lapangan.

Mentan Amran secara terbuka memaparkan berbagai program prioritas Presiden Prabowo yang tengah dijalankan pemerintah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa karena berfungsi sebagai offtaker bagi hasil produksi petani dalam negeri.

"MBG ini jangan dilihat berdiri sendiri. Ini menjadi offtaker bagi 160 juta petani Indonesia. Ekonomi desa bergerak, pasar hidup, dan anak-anak kita ke depan lebih cerdas karena gizinya terpenuhi," jelasnya.

Selain itu, penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk membangun ekonomi berbasis desa yang kuat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa rantai pasok pangan tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan nilai tambah maksimal bagi petani sebagai pelaku utama.

"Selama ini komoditas pertanian harus melalui 8 tahap untuk sampai ke konsumen, sementara dengan Kopdes nantinya memutus rantai yg selama ini dinikmati middleman hingga 336 triliun per tahun," tegas Mentan Amran.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran juga memaparkan berbagai capaian strategis sektor pertanian yang disebutnya berbasis data dan telah diverifikasi oleh berbagai lembaga nasional maupun internasional. Ia menegaskan bahwa dalam periode terakhir, Indonesia berhasil memperkuat kemandirian pangan dengan capaian swasembada pada sejumlah komoditas utama, sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor. Produksi pangan nasional, khususnya beras, mengalami peningkatan signifikan yang berdampak langsung pada penguatan cadangan pangan nasional.

"Stok kita beras tertinggi selama



merdeka, 5 juta ton lebih. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dulu hanya sekitar 2,6 juta ton, sekarang sudah di atas 5 juta ton," tegasnya.

Pada periode 2025–2026, Indonesia mencatat impor pangan hanya kurang dari 5 persen dari total kebutuhan 11 komoditas utama, atau jauh di bawah batas yang ditetapkan FAO. Produksi dalam negeri mencapai 73,7 juta ton, sementara kebutuhan nasional sekitar 68,7 juta ton, dan impor hanya 3,5 juta ton, terutama untuk komoditas seperti kedelai, bawang putih, dan daging ruminansia.

Khusus untuk beras, Indonesia tidak melakukan impor beras medium sepanjang 2025. Produksi beras nasional menurut BPS mencapai 34,69 juta ton dan sesuai prediksi FAO dan USDA. Ini menunjukkan bahwa untuk komoditas paling strategis tersebut, Indonesia telah benar-benar swasembada. Dengan capaian ini, Indonesia dinilai sudah memenuhi kriteria swasembada pangan menurut standar FAO.

Dari sisi kesejahteraan petani, indikator Nilai Tukar Petani (NTP) juga menunjukkan tren positif dan berada pada level tertinggi sebesar 125,45 di Februari 2026, yang mencerminkan meningkatnya daya beli dan kesejahteraan petani. Hal ini didorong oleh berbagai kebijakan prorakyat, termasuk penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen yang disebut sebagai yang pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia

"Pupuk subsidi turun 20 persen. Ini tidak pernah terjadi selama republik ini merdeka. Di saat dunia kekurangan pupuk dan harga naik, di Indonesia justru turun," ujar Mentan Amran.

Ekspor komoditas pertanian menunjukkan tren peningkatan yang kuat, sementara impor berhasil ditekan, sehingga memperkuat neraca perdagangan dan posisi Indonesia di pasar global. Berdasarkan data BPS tentang ekspor segar dan olahan Januari-Desember 2025, nilai ekspor naik 28,26 persen atau naik sebesar Rp166,71 triliun. Sementara itu, nilai impor turun 9,66 persen atau turun sebesar Rp41,68 triliun.

### Terima Laporan Mahasiswa

Dalam forum ini Mentan Amran langsung menindaklanjuti laporan dugaan

pelanggaran di sektor pertanian yang disampaikan peserta.

Dua laporan yang langsung direspon yakni dugaan peredaran bawang merah ilegal di Sumatera Utara serta kelangkaan pupuk subsidi bagi petani bawang merah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Atas laporan tersebut Mentan Amran langsung melakukan sambungan telepon kepada pihak terkait di daerah.

"Terima kasih mahasiswa. Inilah yang kita harapkan. Kalau ada pelanggaran, laporkan. Tidak boleh ada pembiaran. Kita berantas mafia, kita tindak tegas," tegas Mentan Amran di hadapan peserta diskusi.

Ia bahkan langsung mencoba menghubungi aparat penegak hukum di Su-

ta dalam mengawal kebijakan publik, khususnya di sektor pertanian. Ia mengapresiasi sikap mahasiswa yang dinilai kritis namun tetap konstruktif.

"Kita butuh pengkritik yang konstruktif. Bukan fitnah, tapi kritik berbasis data. Kita buka apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi," katanya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik mafia di sektor pertanian. "Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian sudah 76 tersangka. Ini bukti bahwa kita tidak main-main," tegasnya.

Sementara itu, Koordinator BEM SI Wilayah Sumatera Utara, Muzan Mirisan, mengapresiasi respons cepat Mentan Amran atas laporan mahasiswa. Ia me-



matara Utara terkait laporan bawang merah ilegal yang dinilai merugikan petani lokal. Menurutnya, praktik ilegal seperti itu tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak harga pasar dan melemahkan kesejahteraan petani.

"Nah itu ditangkap, masukkan penjara. Kapan negeri ini bisa makmur kalau ada pembiaran? Sama dengan beternak kejahatan di republik ini," ujarnya.

Selain itu, laporan dari mahasiswa asal NTB terkait kelangkaan pupuk subsidi juga langsung direspons cepat. Mentan Amran menegaskan akan segera melusuri distribusi pupuk di wilayah tersebut dan memastikan tidak ada penyimpangan di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Mentan Amran juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai mitra kritis pemerin-

nyebut, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan di lapangan.

"Kita apresiasi kepada Pak Menteri, ada beberapa tadi yang langsung ditindaklanjuti ya. Di Sumatera Utara, kita menyoroti kasus bawang merah ilegal yang ada. Kami berharap setelah kegiatan ini bisa dapat dibasmi mafia-mafia, terutama bawang merah ilegal yang masuk ke daerah Sumatera Utara," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Muhammad Abdi Maludin, mahasiswa asal NTB yang melaporkan persoalan pupuk. Ia menjelaskan bahwa ada oknum yang memperlakukan sehingga pupuk bersubsidi tidak sampai ke petani bawang merah. Ia menilai respons cepat Mentan Amran menjadi bukti keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa. ●



## SIAPA BILANG INDONESIA MENOLAK BASEM NAIM

Sementara dinamika politik global di titik panas Selat Hormuz berkembang menjadi krisis keamanan dan ekonomi, dampaknya merembet ke dalam negeri. Salah satunya adalah kabar beredar mengenai penolakan tokoh senior Hamas, Dr Basem Naim, masuk ke Indonesia.

**K**abar dari beberapa media dalam negeri pun berkembang lagi di media sosial dengan mengaitkan penolakan itu dengan pemberitaan awal 2026 mengenai sebuah surat yang mengatasmakan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas), berisi perintah penolakan masuk terhadap warga negara Palestina pemegang visa apa pun.

Tangkapan layar yang beredar di media sosial berjudul "Permohonan Penolakan Pendaratan dan Penyampaian Pembatalan Visa Warga Negara Palestina" dan ditujukan ke "Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi dari "Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan". Suratnya tertanggal 17 September 2025.

"Menindaklanjuti arahan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bahwa setiap orang asing berwarga negara Palestina pemegang visa jenis apapun yang akan masuk ke Indonesia yang melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik darat, laut

maupun udara untuk dilakukan penolakan dengan alasan keimigrasian (immigration reason). Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini dengan hormat disampaikan permohonan bantuan untuk dapat diinformasikan kepada Seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia," demikian bunyi surat tersebut.

Surat itu kemudian ditutup dengan tanda tangan secara elektronik oleh Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Eko Budianto.

Menganai surat tertanggal 17 September 2025 itu, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) Agus Andrianto membantah pernah mengeluarkan surat edaran tersebut. Agus menyatakan merasa heran dengan isi surat yang beredar itu. Sebab dirinya tak pernah membahas itu bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

"Nggak bener lah itu. Kapan pula Pak Menlu ke kantor saya memberi arahan bersama ke pegawai masalah itu," kata Menimipas Agus, Rabu, 7 Januari 2026.

Agus menegaskan pula, jajaran imigrasi masih menerbitkan visa bagi WN

Palestina. Sehingga Agus mempertanyakan keaslian surat itu yang berisi larangan sejak 17 September 2025.

“Surat itu tertanggal bulan September tanggal 17 sementara kami masih terbitkan Visa September-Desember 2025. Ada 1.270 visa yang kita terbitkan untuk warga Palestina. November kita terbitkan 20 Visa dengan tarif Rp 0 untuk mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Unhan,” ucap Agus.

Nah, beriringan dengan kabar penolakan Basem Naim masuk ke Indonesia, muncul lagi kaitannya dengan surat yang telah dibantah Menimipias Agus tadi. Tambahan pula kabarnya Basem Naim sudah mengunjungi Malaysia pada April 2026 lalu.

Laman web The Palestinian Information Center, palinfo.com, memang memuat kunjungan itu. Menampilkan beberapa foto, laman web itu mengemukakan delegasi tingkat tinggi dari Gerakan Hamas telah menyelesaikan kunjungan resmi ke Malaysia, bertemu dengan pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh nasional. Menurut pernyataan yang dirilis oleh Hamas, delegasi tersebut termasuk anggota biro politiknya, Basem Naim dan Fawzi Barhoum.

Kunjungan tersebut mencakup serangkaian pertemuan, terutama dengan wakil perdana menteri Ahmad Hamidi, selain beberapa pejabat pemerintah, dan perwakilan partai dan organisasi masyarakat sipil. Hamas menjelaskan bahwa kunjungan delegasinya ke Malaysia merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat, memberi mereka informasi tentang perkembangan di arena Palestina di tengah agresi Israel yang sedang berlangsung, dan menjajaki cara untuk mendukung rakyat Palestina dalam menghadapi tantangan saat ini.

Meski begitu, laman web tersebut tak memuat apakah Basem Naim akan berkunjung ke Indonesia atau tidak. Begitu pula akun X DropSiteNews yang memposting kunjungan itu pada Minggu, 26 April 2026. Postingan DropSiteNews menyebutkan, delegasi Hamas mengakhiri kunjungan resmi ke Malaysia pada Sabtu 25 April 2026, bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi bersama para pejabat

pemerintah, perwakilan partai, dan kelompok masyarakat sipil, dengan mengutip siaran pers Hamas.

“Delegasi tersebut — dipimpin oleh anggota Biro Politik Dr. Basem Naim dan pemimpin senior Fawzi Barhoum — membahas perkembangan terbaru dalam negosiasi gencatan senjata Gaza, situasi kemanusiaan di Jalur Gaza, perluasan pemukiman Israel dan aneksasi di Tepi Barat, penutupan Masjid Al-Aqsa

dengan para mediator mengenai Fase 2 dari perjanjian gencatan senjata.

Sedangkan kabar maupun posting viral di media sosial tentang cegah tangkal (cekal) Basem Naim masuk Indonesia sudah mendapat tanggapan dari Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipias Hendarsam Marantoko. “Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengecek data pada sistem cekal dan perlintasan. Berdasarkan hasil penelusuran, nama



dan Gereja Makam Suci, serta kondisi yang dihadapi para tahanan Palestina.”

Masih dari postingan DropSiteNews, Hamas mengatakan pertemuan tersebut “sangat positif” dan mencerminkan “sikap tegas” Malaysia dalam mendukung hak-hak Palestina. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Hamas yang lebih luas untuk memperkuat dukungan politik dan diplomatik di seluruh negara mayoritas Muslim di tengah negosiasi yang sedang berlangsung

Basem Naim (WN Palestina) tidak ada dalam hasil pengecekan sistem perlintasan,” kata Hendarsam, Jumat, 8 Mei 2026.

Selain itu, kata dia, Imigrasi juga memiliki data, dokter Basim Naim tidak ada dalam daftar cegah dan tangkal (cekal) Imigrasi. Berdasarkan pengecekan data penolakan masuk di tempat pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pula, tidak ada penolakan atas nama tersebut. ●



## BEKAS PEJABAT DAERAH JADI INCARAN KEJAKSAAN

Yang terbaru adalah penetapan tersangka Arinal Djunaidi, Gubernur Provinsi Lampung 2019-2024. Bagaimana di berbagai daerah lainnya?

Sekitar 12 jam setelah kedatangannya ke Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung, Arinal Djunaidi keluar dari lift Gedung Pidana Khusus mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda (pink) dengan tangan terborgol dan wajah bermasker. Ia tidak memberikan pernyataan banyak kepada media dan langsung masuk ke mobil tahanan Kejaksaan

Selasa malam, 28 April 2026 itu juga, iring-iringan mobil tahanan tiba di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung di Way Huwi, Jati Agung, kawasan yang masuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya Arinal menjalani proses administrasi penerimaan warga binaan baru, pemeriksaan barang bawaan, dan penempatan di sel isolasi untuk orientasi selama 14 hari pertama sesuai protokol rutan.

Toh dua hari kemudian, Kamis, 30 April 2026 pagi, dua bekas bupati yang sama-sama menghuni Rutan Way Huwi menemui Arinal. Keduanya M Dawam Rahardjo yang pernah menjabat Bupati Lampung Timur 2021-2024 dan Dendi Ramadhona Kaligis, Bupati Pesawaran 2016-2025. Dari pertemuan ini saja, tampak bahwa beberapa kepala daerah di Lampung sudah menjadi incaran Kejak-

saan.

Dawam tercatat sedang menanti keputusan banding atas putusan Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungkarang yang memvonisnya delapan tahun penjara atas kasus korupsi proyek pembangunan taman rumah dinas bupati tahun anggaran 2022. Kasus dugaan korupsi itu diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Lampung sejak November 2024. Kejati Lampung secara resmi mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor Print-10/L.8/Fd.2/11/2024 pada 11 November 2024.

Konstruksi hukumnya, Dawam diduga melakukan mark-up (penggelembungan harga) pada pengadaan barang dan jasa. Selain itu, ia dinilai memiliki peran langsung dalam pengaturan tender, penentuan pelaksana proyek, hingga pengendalian teknis pekerjaan. Pada 9 Januari 2025, Kejati Lampung menggeledah rumah Dawam serta dua lokasi lain, yakni Kantor Bupati Lampung Timur dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Timur. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik Kejati Lampung menyita dokumen terkait pembangunan kawasan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur.

Berlanjut dengan persidangan di pen-



gadilan. Dalam sidang tuntutan pada 5 Februari 2026, Jaksa Penuntut Umum Rudi Vernando menuntut Dawam dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, denda Rp300 juta subsidair kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp3,5 miliar. Selanjutnya majelis hakim juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) sebagai bagian dari proses persidangan.

Hingga pada 26 Februari 2026, Majelis Hakim yang diketuai oleh Firman Khadafi Tjindarbumi menjatuhkan hukuman kepada Dawam Rahardjo berupa pidana penjara delapan tahun dan enam bulan serta denda Rp300 juta, dengan subsider 100 hari kurungan. Selain itu vonis hakim mewajibkan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp3,9 miliar dan

akan diganti dengan pidana penjara tambahan selama empat tahun tiga bulan jika tidak dilunasi. Vonis hakim lebih berat dalam hal uang pengganti dibandingkan dengan tuntutan jaksa.

Dawam pun mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PN Tanjungkarang, Kamis 26 Februari 2026. "Banding resmi sudah kami ajukan hari Rabu kemarin," kata PH Dawam Rahardjo, advokat senior Sukarmin SH

MH, pada Kamis, 5 Maret 2026.

Langkah hukum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang ini, lanjut Sukarmin, karena banyak fakta-fakta persidangan yang dikesampingkan oleh majelis hakim Tipikor pimpinan Firman Khadafi Tjindarbumi. "Hakim keliru dalam menerapkan dan mempertimbangkan alat bukti yang terungkap di persidangan," ungkap Sukarmin yang optimistik, hakim PT Tan-



jungkarang akan membuat keputusan adil bagi kliennya.

Akan halnya Dendi, bekas Bupati Pesawaran ini tersangkut perkara korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kabupatennya pada 2022 yang dilaporkan oleh masyarakat setempat ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Hingga akhir April 2026, proses hukum sedang dalam tahap sidang pembuktian di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Perkara Dendi juga bertambah

heboh dengan adanya dugaan gratifikasi yang nilainya jauh melampaui nilai proyek fisik perluasan jaringan perpipaan SPAM tahun anggaran 2022 dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Air Minum senilai Rp8,2 miliar.

Proyek ini diduga dialihkan dari Dinas Perkim ke Dinas PUPR tanpa persetujuan kementerian terkait. Selain itu terdapat temuan praktik mark-up (penggelembungan dana), pengondisian pemenang tender, serta pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, seperti pipa yang ditanam terlalu dangkal.

Penyidik menaksir kerugian mencapai Rp7,02 miliar, atau hampir delapan persen dari total nilai proyek. Lebih dari itu, Dendi menghadapi dakwaan berlapis korupsi proyek fisik plus penerimaan gratifikasi/fee proyek yang diduga mencapai Rp59,5 miliar serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Nah, ketika bertemu pada Kamis, 30 April 2026, entah apa isi pembicaraan Dendi, Dawam, dan Arinal Djunaedi. Yang jelas, Arinal kini menjadi sesama penghuni Rutan Way Huwi.

Bekas Gubernur Lampung itu terjerat dugaan korupsi pengelolaan dana participating interest (PI) sebesar 10 persen di Wilayah Kerja Offshore South East Sumatera (WK OSES). Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan dana yang diterima oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Lampung, PT Lampung Energi Berjaya (LEB), senilai USD 17.286.000 atau sekitar Rp271 miliar.

Arinal ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan dari pagi hingga malam di Gedung Pidana Khusus Kejati Lampung. Pen-

etapan tersangka ini berdasarkan pada pengembangan penyidikan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tiga terdakwa lainnya, yaitu Heri Wardoyo (Komisaris PT LEB), M Hermawan Eriadi (Direktur Utama PT LEB), dan Budi Kurniawan (Direktur Operasional PT LEB).

Di Lampung saja gambarannya sudah seperti ini. Bagaimana dengan para kepala daerah di provinsi lain? Sila ikuti sajian di laman-laman berikutnya. •

# UJIAN PULA UNTUK KEJAKSAAN

Arinal Djunaidi sudah berstatus tersangka. Masih adakah celah untuk lolos dari jerat hukum?

**S**emuanya tinggal kenangan. Pelantikan Arinal Djunaidi bersama Chusnunia Chalim (Nunik) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada 12 Juni 2019 semula mengundang harapan manfaat lebih besar untuk warga provinsi ini; setidaknya melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Terlebih Arinal adalah birokrat kawakan yang meniti karir dari penyuluh pertanian di Kota Bandar Lampung pada 1986 hingga menjadi Sekretaris Daerah Provinsi pada 2014-2016 dan berlanjut menjadi Ketua DPD Partai Golkar Lampung setelah pensiun sebelum maju dalam Pemilihan Gubernur.

Namun, selepas jabatan Gubernur, kisah selanjutnya bagaikan tragedi, kejatu-

han figur yang semula berada di posisi puncak. Momen kejayaan saat prosesi di Istana Negara kini menjadi kontras tajam dengan jerat hukum yang harus dihadapi Arinal Djunaidi di masa purnatugasnya.

Sejak Selasa malam, 28 April 2026, Arinal harus mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Bandar Lampung di Way Huwi, Jati Agung, Lampung Selatan. Ini adalah rangkaian proses hukum penyidikan kasus dugaan korupsi dana Participating Interest (PI) 10 persen di PT Lampung Energi Berjaya (LEB), badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Lampung. Nilainya mencapai 17.286.000 dolar AS atau setara Rp272 miliar di wilayah kerja migas Offshore South East Sumatera (OSES).

Dana PI merupakan hak daerah dalam pengelolaan wilayah kerja migas yang semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016, PI 10 persen adalah besaran maksimal penyertaan modal yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada BUMD di wilayah kerja migas. Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keterli-

batan putra daerah dalam pengelolaan sumber daya alam lokal. Dalam pelaksanaannya, daerah tidak perlu menyeter modal di awal. Sedangkan kewajiban biaya operasi migas dibayar terlebih dahulu oleh kontraktor tanpa bunga, yang kemudian dicicil oleh BUMD dari hasil produksi migas dalam kontrak. Celah penyimpangannya adalah tata kelola dana tunai oleh BUMD.

Nah, Kejaksaan Tinggi Lampung mengungkapkan penyidikan terhadap penyimpangan tata kelola di BUMD itu juga menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatan mantan Gubernur Lampung 2019-2024 dalam pemanfaatan dana PI itu. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Danang Suryo Wibowo mengemukakan, penetapan tersangka terhadap Arinal sudah melalui serangkaian pemeriksaan saksi dan gelar perkara secara mendalam. "Hasil pemeriksaan dan gelar perkara, ditemukan dua alat bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan saudara ARD," ujarnya.

Guna kepentingan penyidikan, kata Danang, penahanan ARD di Rutan Kelas I Bandarlampung di Way Hui terhitung mulai 28 April hingga 17 Mei 2026. Alasan penahanan adalah untuk



mempermudah proses penyidikan serta mencegah adanya upaya penghilangan barang bukti atau intervensi terhadap saksi-saksi kunci yang masih diperiksa. "Kami menahan ARD terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest 10 persen atau dana PI di Wilayah Kerja OSES yang dikelola oleh PT Lampung Energi Berjaya (LEB)," ujar Danang

Toh Arinal masih berpeluang lolos dari jerat hukum. Ketua Tim Kuasa Hukum Arinal, advokat Ana Sofa Yuking, menilai penetapan tersangka terhadap bekas Gubernur Lampung itu terkesan sebagai pemaksaan tanpa dua alat bukti yang cukup. Ana Sofa menegaskan bahwa selama dua kali proses pemeriksaan, penyidik tidak mampu menunjukkan bukti adanya satu rupiah pun aliran dana Participating Interest 10 persen yang masuk ke rekening pribadi Arinal Djunaidi.

"Penetapan tersangka ini kami nilai tidak sah. Jika ingin mendalami perkara, seharusnya dilakukan melalui fakta-fakta yang digali di persidangan yang sedang berjalan saat ini, bukan ditarik mundur dengan menetapkan klien kami sebagai tersangka dan melakukan penahanan," ujar advokat Ana dalam konferensi pers di Granny's Nest Boutique Hotel & Resto di Jln. Mayjen Ryacudu, Sukarame, Bandarlampung, Rabu 29 April 2026 malam.

Menurut dia, seharusnya jika Kejati ingin memperdalam perkara tersebut, dilakukan di dalam persidangan. Bukan dengan memanggil kliennya dan kemudian menetapkan sebagai tersangka serta melakukan penahanan. Advokat Ana pun mengungkapkan tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Kejati di rumah kliennya pada 3 September 2025 silam berlangsung tanpa surat izin pengadilan sementara saat itu Arinal belum pernah diperiksa oleh penyidik.

"Sidang perkara ini kan sudah jalan, kenapa ditarik mundur? Kalau mau diperdalam, gali saja di persidangan," ucapnya

Advokat Ana mengemukakan pula sampai saat ini JPU belum menyampaikan perhitungan kerugian negara kepada pihaknya. Sedangkan sesuai ketentuan perundang-undangan, sambungnya, hanya Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) yang berhak melakukan perhitungannya.

Dengan berbagai argumen itu, pihak Arinal mengajukan surat penangguhan penahanan untuk Arinal. "Kami sudah mengajukan surat penangguhan penahanan ke Kejati Lampung dan sudah diterima oleh pihak Kejati Lampung," kata Ana Sofa.

Alasan permohonan penangguhan penahan, menurut Ana, pertama kliennya (Arinal Djunaidi) sudah sangat amat kooperatif selama ini. Setiap ada pemanggilan, kliennya sudah begitu kooper-

la mengemukakan bahwa dana sekitar 17 juta dolar AS yang menjadi sorotan merupakan penerimaan sah, tercatat dalam sistem perbankan, dan digunakan sesuai peruntukannya. Sebagian dana telah disalurkan sebagai dividen dan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sementara sisanya masih tersimpan di rekening perusahaan dan telah diblokir oleh pihak kejaksaan. "Seluruh aliran dana jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang hilang," ujarnya.

Ana juga menegaskan bahwa Arinal



atif datang memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan yang selengkap berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Lebih dari itu, Ana mengemukakan tengah menyiapkan langkah hukum berupa pengajuan praperadilan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk menguji keabsahan status tersangka terhadap Arinal.

Djunaidi tidak terlibat dalam pengelolaan dana tersebut dan tidak menerima keuntungan pribadi. Ia menyebut peran kliennya semata-mata menjalankan kewenangan sebagai gubernur dalam menindaklanjuti penawaran dana PI sesuai regulasi yang berlaku. "Tidak ada satu rupiah pun yang diterima klien kami, dan tidak ada campur tangan dalam pengelolaan dana," tandasnya. ●



# LAMPUNG 1 CONTOH SAJA

Lampung bolehlah dibilang miniatur Indonesia dengan keragaman suku bangsanya. Namun, urusan korupsi pengelolaan dana participating interest di Lampung hendaknya tak menular ke provinsi lainnya.

**W**ilayah Kerja yang menghasilkan dana participating interest di Lampung berlokasi di lepas pantai Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan di daratan Lampung Timur (dan Tengah) bukan hal mengejutkan bertebaran gapura-gapura khas dan pura berdiri megah layaknya di Pulau De-

wata. Suku Bali yang bermigrasi ke sini tetap mempertahankan tradisi spiritual dan arsitektur mereka dengan sangat kuat, menciptakan pemandangan unik di mana nuansa Bali hadir di tengah tanah Sumatera. Lampung memang satu-satunya tempat di luar Bali dengan atmosfer komunal Pulau Dewata paling kental.

Namun, soal dana participating interest bukan hanya Lampung yang memilikinya, melainkan juga beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Kecuali Lampung, terdapat setidaknya 11 wilayah kerja (WK) migas di Indonesia yang telah atau dalam proses pengalihan hak Participating Interest (PI) 10 persen kepada pemerintah daerah masing-masing.

Sebut saja misalnya, Jawa Barat yang mengelola PI 10% di Wilayah Kerja Offshore North West Java (WK ONWJ) bersama DKI Jakarta sejak 2018 melalui BUMD PT Migas Hulu Jabar. Sedangkan Jakarta memiliki hak PI 10% di dua wilayah kerja, yaitu WK ONWJ (berbagi dengan Jawa Barat) dan WK Southeast Sumatra (berbagi dengan Lampung).

Selain Jakarta, dan Jawa Barat, tercatat Jawa Timur pun memiliki hak PI 10% untuk beberapa wilayah kerja migas. Misalnya WK Ketapang juga WK West Madura Offshore melalui BUMD PT Petrogas Jatim Adipodai.

Provinsi lainnya di Sumatera, Riau tercatat mendapatkan pengalihan PI 10% untuk WK Rokan dari PT Pertamina Hulu Rokan senilai kurang lebih Rp3,5 triliun pada akhir 2023. Riau juga mengelola PI di WK Siak. Selain Lampung dan Riau, Aceh juga memiliki porsi PI. Malah PI untuk Aceh dapat melampaui 10 persen berdasarkan kekhususan provinsi ini

Beralih ke Kalimantan, Provinsi Kaltim tercatat menerima PI 10% untuk WK Mahakam sejak 2019. Wilayah lain seperti Penajam Paser Utama juga berhak atas PI di Blok Eastkal. Sedangkan Kalimantan Selatan (dan Sulawesi Barat) berbagi hak PI 10% untuk WK Sebuku (Blok Pulau Lari-Larian) yang ditetapkan pada 2023.

Namun, bagaimana pengelolaan dana PI di masing-masing provinsi itu, hasil audit keuangan yang dapat mencerminkannya. Yang jelas, untuk

Lampung indikasi korupsi dana PI oleh Badan Usaha Milik Daerah sudah menjalani proses sidang di pengadilan.

Persidangan bagi tiga petinggi PT Lampung Energi Berjaya (LEB), yakni M. Hermawan Eriadi, Budi Kurniawan, dan Heri Wardoyo, sudah berlangsung sejak akhir 2025 di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Dalam rangkaian persidangan, jaksa mengungkapkan skema penyelewengan dana bagi hasil migas senilai Rp271,5 miliar yang seharusnya masuk ke kas daerah namun justru dialirkan ke kantong pribadi dan pihak swasta.

Selanjutnya keterangan para terdakwa maupun beberapa saksi di bawah sumpah menjadi pintu masuk yang mengungkap bahwa kebijakan strategis di balik aliran dana tersebut tidak lepas dari intervensi dan kendali langsung pimpinan daerah saat itu, Gubernur Arinal Djunaidi.

Memasuki awal tahun 2026, fakta-fakta persidangan mendorong Kejaksaan Tinggi Lampung untuk melakukan pengembangan penyidikan terhadap Arinal Djunaidi. Pada Maret 2026 Tim Penyidik Kejati Lampung menggeledah kediaman Arinal dan menyita aset senilai Rp38,5 miliar. Rinciannya antara lain, tujuh unit mobil, logam mulia seberat 645 gram, uang tunai dari berbagai mata uang, deposito di beberapa bank, dan 29 sertifikat hak milik atas lahan. Penemuan barang bukti yang tidak selaras dengan profil penghasilan resmi pejabat publik tersebut semakin memperkuat sangkaan adanya praktik gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari dana PI migas.

Aneka aset sitaan dari kediaman Arinal ternyata menjadi bagian dari barang bukti di persidangan tiga petinggi BUMD Lampung. "Barang bukti yang bersangkutan telah digunakan sebagai barang bukti perkara Heri Wardoyo dkk dan terlampir dalam berkas perkara," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, dalam pernyataan resmi pada 11 April 2026.

Selanjutnya Kejati Lampung mulai menyebut Arinal Djunaidi memiliki peran dalam perkara dugaan korupsi komisi migas-participating interest (PI) 10%- senilai Rp271,5 miliar pada PT Lampung Energi Berjaya. "Peran

aktif -Arinal Djunaidi- itu telah diuraikan dalam dakwaan tipikor atas nama terdakwa Heri Wardoyo dkk," sambung Kasipenkum Ricky Ramadhan.

Dugaan korupsi pengelolaan dana participating interest (PI) 10% PHE-OSES senilai US\$17.286.000 melalui PT Lampung Energi Berjaya (LEB), semakin terungkap melalui keterangan mantan Penjabat Gubernur Samsudin dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungkarang pada Kamis, 30 April 2026.

Dalam kesaksiannya, Samsudin mengaku awalnya buta sama sekali

Merespons surat tersebut, Samsudin langsung memerintahkan Sekdaprov (saat itu Fahrizal Darminto) dan Karo Perekonomian (Rinvayanti) untuk melakukan penelusuran mendalam. Hasilnya mengejutkan: dana sudah tercatat di APBD sebagai proyeksi pendapatan, namun uang fisiknya tak kunjung masuk ke kas daerah.

Menyadari adanya indikasi pengelolaan yang tidak transparan, Samsudin mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 Agustus 2024.



mengenai keberadaan dana PI senilai US\$17.286.000 atau setara Rp271 miliar tersebut. Tabir gelap ini baru terbuka saat ia menerima surat dari Ketua DPRD Lampung periode tersebut, Mingrum Gumay, pada Juni 2024.

"Saya baru tahu dan terhenyak saat menerima surat itu. Isinya terkait dana PI 10% senilai Rp271 miliar," ujar Samsudin di hadapan majelis hakim dan tiga terdakwa: M. Hermawan Eriadi, Budi Kurniawan, dan Heri Wardoyo.

Keputusan krusial dari RUPSLB tersebut memaksa PT LEB (melalui induknya) untuk menyetorkan dividen sebesar 85% dari dana yang diterima, yakni senilai Rp140,9 miliar, langsung ke kas daerah Pemprov Lampung. Langkah ini menjadi titik balik penyelamatan sebagian dana PI yang sebelumnya tak jelas rimbanya.

Bagaimana dengan PI di provinsi lain? Kemungkinan Kejaksaan juga mengincar potensi tindak pidana korupsinya. •

# KEKUASAAN, PROGRAM DAN PENYIMPANGAN

Penanganan perkara korupsi di tingkat daerah kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Tanimbar menetapkan mantan Bupati periode 2017–2022, Petrus Fatlolon, sebagai tersangka.

Penetapan ini menegaskan peran aktif institusi kejaksaan dalam mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran publik, sekaligus menjadi cermin tantangan tata kelola pemerintahan daerah.

Kasus ini tidak hanya menyangkut kerugian negara, tetapi juga menguji konsistensi penegakan hukum terhadap pejabat publik yang pernah memegang kekuasaan strategis.

Mantan Bupati Kepulauan Tanimbar periode 2017–2022 itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar pada 19 Juni 2024 dalam perkara dugaan korupsi perjalanan dinas.

Sebelum menjabat sebagai bupati di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon dikenal sebagai politisi yang memiliki pengalaman legislatif. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua

DPRD Kota Sorong selama dua periode, sebelum akhirnya memenangkan kontestasi kepala daerah pada 2017.

Dengan latar belakang di sektor energi dan pengalaman organisasi, Fatlolon membawa pendekatan pembangunan berbasis potensi sumber daya daerah. Ia memimpin wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga akses layanan publik yang belum merata.

Selama masa kepemimpinannya, sejumlah program strategis dijalankan pemerintah daerah dengan fokus utama pada pembangunan dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal.

Pemerintah daerah mendorong pembangunan infrastruktur dasar, termasuk transportasi laut dan darat, guna menghubungkan wilayah antar-pulau dan menekan kesenjangan pamban-



gunan.

Melalui penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu langkahnya adalah keterlibatan dalam sektor energi melalui perusahaan daerah, yang diharapkan mampu mengoptimalkan potensi migas di kawasan tersebut.

Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun, di balik berbagai program

Ruben Benharvioto dan Petrus Masela.

“Atas temuan itu, tim penyidik Kejaksaan Negeri Tanimbar secara kolektif menetapkan PF (Petrus Fatlolon) sebagai tersangka,” kata Fazlurrahman, Rabu 19 Juni 2024.

Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp1.092.917.664. Sementara untuk kerugian yang harus dipertanggungjawabkan senilai Rp314.598.000.

“Kerugian negara ini berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh tim auditor

Kasus ini mengungkap pola klasik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah yakni manipulasi dokumen administrasi, pencairan anggaran tanpa kegiatan riil dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengendalian keuangan.

Selain itu, lemahnya pengawasan internal, terutama pada belanja operasional seperti perjalanan dinas, menjadi celah utama terjadinya penyimpangan.

Kasus yang menjerat Petrus Fatlolon menjadi refleksi nyata bahwa keberhasilan program pembangunan tidak cukup diukur dari output fisik semata,



tersebut, muncul persoalan serius terkait akuntabilitas anggaran yang kemudian berujung pada proses hukum.

Kasus yang menjerat Petrus Fatlolon berkaitan dengan dugaan korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020.

Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanimbar, Muh. Fazlurrahman, dalam pengembangan penyidikan, tim jaksa menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan Petrus Fatlolon sebagai tersangka. Selain alat bukti, penetapan tersangka Fatlolon dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa

Kejaksaan Tinggi Maluku,” jelas Fazlurrahman.

Kasus ini tidak berhenti pada pelaku teknis, tetapi dikembangkan hingga menysasar pengambil kebijakan di level kepala daerah. Kejaksaan memastikan perhitungan kerugian negara dilakukan secara akurat melalui kerja sama dengan auditor.

Selain mantan bupati, kasus ini juga melibatkan sejumlah pejabat lain, mencerminkan adanya pola penyimpangan yang sistemik. Langkah ini menunjukkan upaya penegakan hukum yang lebih komprehensif dan tidak tebang pilih.

tetapi juga dari integritas dalam pengelolaan anggaran.

Dari panggung kekuasaan hingga status tersangka, perjalanan ini menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa akuntabilitas hanya akan membuka ruang penyimpangan. Di sisi lain, langkah tegas kejaksaan menjadi sinyal bahwa penegakan hukum terus bergerak untuk menjaga kepercayaan publik.

Pada akhirnya, kasus ini bukan hanya tentang satu individu, melainkan tentang bagaimana sistem pemerintahan harus dibenahi agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. ●

# KASUS JONAS SALEAN DAN UJIAN SERIUS KINERJA KEJAKSAAN

Upaya pemberantasan korupsi di daerah tertuju pada penanganan dugaan korupsi aset tanah yang melibatkan mantan Wali Kota Kupang periode 2012–2017, Jonas Salean.

**K**asus ini tidak hanya membuka praktik lama penyalahgunaan aset pemerintah daerah, tetapi juga menjadi indikator penting sejauh mana Kejaksaan mampu menjaga konsistensi penegakan hukum terhadap pejabat publik.

Penetapan tersangka terhadap Jonas Salean oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Oktober 2025 menjadi titik krusial dalam pengungkapan perkara ini. Langkah tersebut diikuti dengan penahanan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup, termasuk hasil audit kerugian negara dan dokumen kepemilikan tanah.

Sebelum terseret kasus hukum, Jonas Salean merupakan sosok dengan rekam jejak panjang di birokrasi Nusa Tenggara Timur.

Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang (2002–2007), kemudian terpilih sebagai Wali Kota Kupang periode 2012–2017. Setelah itu, ia juga sempat menjadi anggota DPRD Provinsi NTT periode 2019–2024.

Posisi tersebut menempatkannya dalam lingkup kekuasaan yang memiliki akses langsung terhadap kebijakan strategis, termasuk pengelolaan aset daerah.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kewenangan ini menjadi krusial karena berkaitan dengan pengamanan kekayaan negara yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Selama masa kepemimpinannya, Pemerintah Kota Kupang mencatat sejumlah program pembangunan, mulai dari penguatan infrastruktur kota, penataan kawasan permukiman, hingga peningkatan layanan publik. Upaya pembenahan administrasi pertanahan dan aset daerah juga menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi saat itu.

Namun, di balik berbagai program tersebut, pengelolaan aset justru menjadi titik lemah. Sejumlah kajian tata kelola pemerintahan daerah menunjukkan bahwa sektor aset, khususnya tanah, kerap menjadi sumber persoalan akibat lemahnya pengawasan, tidak tertibnya administrasi, serta celah penyalahgu-



naan kewenangan.

Kasus yang menjerat Jonas Salean berpusat pada dugaan korupsi pengalihan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang. Tanah tersebut berada di kawasan strategis Jalan Veteran, Kota Kupang.

Berdasarkan penyidikan Kejati NTT, modus yang digunakan diduga berupa pemindahtanganan aset daerah kepada pihak yang tidak berhak, penerbitan rekomendasi atau penunjukan kapling tanah dan proses sertifikasi menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pribadi dan pihak lain.

Kejati NTT di bawah kepemimpinan Kajati Zet Tadung Allo, S.H., M.H. berkomitmen menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara maupun daerah.

“Langkah ini sejalan dengan upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di Nusa Tenggara Timur,” katanya.

Objek perkara mencakup beberapa bidang tanah yang sebelumnya tercatat sebagai aset pemerintah daerah, namun kemudian beralih status menjadi milik individu.

Dalam konstruksi perkara, tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Hasil audit Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat kerugian negara dalam kasus ini berkisar antara Rp3,9 miliar hingga Rp5,9 miliar. Angka ini menjadi salah satu dasar penting bagi penyidik dalam menjerat tersangka dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Jonas Salean dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dalam proses penyidikan, Kejati NTT juga telah memeriksa sejumlah saksi serta mengembangkan perkara dari kasus lain yang telah lebih dahulu diputus di pengadilan. Beberapa pihak terkait sebelumnya telah divonis ber-

salah, memperkuat konstruksi hukum terhadap perkara ini

“Berkas perkara tersangka pun telah dinyatakan lengkap (P-21), menandakan kesiapan untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan di pengadilan,” bebarnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Jonas Salean dengan pidana penjara selama 6 tahun. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, dengan agenda pembacaan amar tuntutan.

Dalam tuntutan, JPU menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam

kum tetap, harta terdakwa akan disita dan dilelang, atau diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Dalam perkara ini, terdakwa juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp10 ribu. Tuntutan tersebut ditandatangani oleh Penuntut Umum Advani Ismail Fahmi.

Kuasa hukum terdakwa, Tommy Jacob, menilai tuntutan jaksa tidak berdasar karena tidak didukung fakta persidangan. Ia menyebut dalam perkara lain, pengadilan telah memerintahkan penghapusan kerugian negara sehingga unsur tersebut dinilai tidak terpenuhi.

“Dalam putusan itu sudah jelas bahwa hakim memerintahkan pemerintah Kabupaten Kupang untuk menghapus dari aset daerah karena tanah itu meru-



dakwaan primair. Namun, pada dakwaan subsidiair, Jonas Salean dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Atas perbuatannya, terdakwa dituntut pidana penjara selama 6 tahun, dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan,” demikian isi tuntutan jaksa.

Selain hukuman penjara, Jonas juga dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 140 hari. JPU juga menuntut pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2.050.697.048.

Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hu-

pakkan hak pak Jonas serta telah dieksekusi Desember lalu,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dasar tuntutan jaksa yang merujuk pada surat penunjukan tanah kavling tahun 1989, yang menurutnya memiliki sejumlah persyaratan yang tidak pernah dipenuhi. Selain itu, terdapat perbedaan lokasi objek tanah antara yang tercatat dalam administrasi dan kondisi sebenarnya.

Kuasa hukum lainnya, Ferdianto Boimau, menambahkan bahwa negara tidak seharusnya mengambil keuntungan dari masyarakat. Ia mempertanyakan tuntutan uang pengganti, mengingat tanah tersebut telah disita dan memiliki kekuatan hukum tetap.

“Tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan disita. Lalu apa yang perlu diganti? Tanah sudah disita, lalu diminta uang pengganti. Artinya negara untung 2 miliar,” tegasnya. ●



# SKANDAL BIBIT NANAS RP60 MILIAR

Di balik ambisi meningkatkan sektor pertanian, program pengadaan bibit nanas justru berubah menjadi skandal besar.

**K**ejaksanaan berhasil membongkar dugaan korupsi bernilai Rp60 miliar yang kini menjerat mantan Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin.

Proyek yang digadang-gadang sebagai pengungkit ekonomi itu kini dipertanyakan, setelah jutaan bibit dilaporkan tak termanfaatkan.

Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi menahan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara Rp 50 miliar pada Senin 9 Maret 2026.

Salah satu tersangka yang resmi menggunakan rompi tahanan adalah mantan Pejabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan yakni Bahtiar Baharuddin

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, mengungkapkan bahwa penetapan dan penahanan para tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal

dua alat bukti yang sah dan cukup.

"Pada Senin 9 Maret 2026, kami resmi melakukan penahanan terhadap lima tersangka," ujar Kajati Sulsel dalam keterangan pers di Kantor Kejati Sulsel, Makassar, Senin, 9 Maret 2026.

Selain mantan Pj Gubernur Sulsel, tim penyidik Pidsus Kejati Sulsel juga melakukan penahanan terhadap Tersangka RM selaku Direktur PT. AAN, Tersangka RE selaku Direktur PT. CAP, Tersangka HS selaku Tim Pendamping Pj Gubernur, dan Tersangka RRS yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar.

Selain kelima orang tersebut, Kejati Sulsel sebenarnya telah menetapkan satu tersangka lain berinisial UN yang menjabat sebagai KPA/PPK.

"Namun, terhadap tersangka UN belum dilakukan penahanan dengan pertimbangan yang bersangkutan sedang dalam keadaan sakit," tambahnya.

Kasus ini bermula dari proyek Pengadaan Bibit Nanas di Dinas Tanaman

Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

Dari total nilai proyek sebesar Rp 60 miliar, tim penyidik menduga adanya praktik penggelembungan harga (mark-up) serta indikasi pengadaan fiktif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga mencapai sekitar Rp 50 miliar.

Sebelum dilakukan penahanan, Kejati Sulsel telah melakukan serangkaian proses hukum yang panjang. Pada 17 Desember 2025 lalu, penyidik Pidsus telah memeriksa mantan Pj Gubernur BB secara maraton selama kurang lebih 10 jam untuk mendalami kebijakan terkait proyek pengadaan tersebut.

Untuk memastikan para pihak tidak melarikan diri dan mempersulit penyidikan, Kejati Sulsel juga telah mengajukan permohonan pencekalan ke luar negeri kepada Jaksa Agung Muda Intelijen pada 30 Desember 2025. Pencekalan tersebut berlaku untuk keenam orang yang kini telah berstatus tersangka.

Proses pengungkapan kasus ini juga diwarnai dengan pengeledahan di Kantor Dinas TPHBun, Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta kantor rekanan.

Dari lokasi tersebut, penyidik menyita ratusan dokumen kontrak dan bukti transaksi keuangan, serta telah memeriksa lebih dari 80 orang saksi dari berbagai unsur, termasuk birokrasi, legislatif, swasta, hingga kelompok tani.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan perundang-undangan dengan pasal berlapis yakni Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 618 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kejati Sulsel menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas perkara ini dan menindak tegas setiap pihak yang terbukti merugikan keuangan negara demi menjaga integritas tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Fakta lain yang menguatkan dugaan korupsi adalah munculnya proyek ini tanpa pembahasan yang jelas di DPRD.

Bahtiar Baharuddin merupakan pejabat birokrat senior yang dipercaya pemerintah pusat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan pada periode 2023-2024.

Sebagai Pj Gubernur, Bahtiar memiliki kewenangan strategis dalam pengendalian program pembangunan daerah, pengelolaan anggaran APBD dan pengambilan kebijakan sektor per-



Sejumlah anggota DPRD Sulsel mengaku tidak pernah membahas program pengadaan bibit nanas dalam rapat komisi maupun badan anggaran (Banggar), sehingga proyek tersebut diduga sebagai "penumpang gelap" dalam APBD 2024.

Hal ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan anggaran.

tanian dan pangan

Salah satu program yang didorong pada masa kepemimpinannya adalah pengembangan komoditas hortikultura, termasuk rencana pengadaan bibit tanaman dalam skala besar untuk meningkatkan produksi pertanian daerah.

Namun, program tersebut justru menjadi pintu masuk penyidikan kasus korupsi yang kini menjeratnya. ●



## KEPALA DAERAH DI SUMSEL BERADA DALAM ANCAMAN KEJAKSAAN

Menjalani kondisi yang tenang dan aman setelah menjalani masa jabatan menjadi dambaan kepala daerah di masa pensiunnya. Namun rupanya mereka masih berada dalam ancaman dari kejaksaan yang mengincarnya menjadi tersangka di masa pensiun.

Beberapa kepala daerah di Sumatera Selatan misalnya mulai dari Bupati, Walikota hingga Gubernur banyak berubah status menjadi tersangka. Terbaru adalah mantan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin dan mantan Walikota Palembang Harnojoyo serta banyak lainnya.

Di Sumatera Selatan nama Gubernur Alex Noerdin sangat populer dan mampu membawa provinsi ini dikenal di dunia internasional. Sayangnya ada banyak kebijakan yang dinilai menyalahi kebijakan tertinggi, Alex Noerdin dianggap ikut bertanggung jawab.

Usai menjabat sebagai Gubernur Sumsel, Alex Noerdin sempat tiga kali berstatus tersangka oleh kejaksaan.

Pada 2023, terdakwa mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin divonis bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun atas kasus dugaan tindak korupsi, pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) tahun 2010-2019.

la juga berstatus sebagai tersangka pada proyek dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel.

Kemudian pada pertengahan tahun 2025 lalu, Alex pun terjerat kasus hukum baru, yakni revitalisasi pasar. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan akhirnya menetapkan empat tersangka kasus revitalisasi Pasar Cinde Palembang, termasuk mantan Gubernur Alex Noerdin, yang telah menjalani proses penyidikan sejak tahun 2023.

Alex Noerdin dikenal sebagai gubernur yang cukup berpengaruh dalam pembangunan dan promosi daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Selama menjabat, Alex Noerdin turut mendorong berbagai proyek infrastruktur dan pengembangan olahraga di Sumatera Selatan. Salah satu pencapaian yang paling diingat adalah peran aktifnya dalam menyukseskan penyelenggaraan ajang olahraga berskala internasional yang mengangkat nama Palembang di mata dunia yakni SEA Games 2011 dan Asian Games 2018.

Sehingga saat kasusnya digelar, dukungan dari masyarakat Sumsel begitu tinggi dan meminta agar Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi dan amnesti pada Alex Noerdin atas jasanya selama.

Sayangnya hingga ia wafat, Alex Noerdin belum menerima Abolisi dan Amnesti dari Presiden Prabowo.

Sebelum Alex Noerdin, ada mantan Gubernur Sumsel Syahril Oesman yang juga masuk penjara usai selesai menjabat.

Mantan Gubernur Sumsel Syahril Oesman ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi alih fungsi hutan lindung menjadi pelabuhan Tanjung Api-api. Syahril Oesman dihukum satu tahun penjara di pengadilan pertama dan tingkat banding lalu berubah menjadi tiga tahun penjara di tingkat kasasi.

Menurut hakim, Syahril telah terbukti memerintahkan Direktur PT Chandratex Indo Artha Chandra Antonio Tan sebagai penyandang dana untuk mempermudah proses izin alih fungsi hutan Pantai Air Telang menjadi pelabuhan Tanjung Api-Api. Uang Rp 5 miliar digelontorkan kepada sejumlah anggota Dewan di Komisi IV DPR saat itu.

### Walikota dan Wawako Sama-sama Masuk Penjara

Nasib tragis dialami Walikota dan Wakil Walikota Palembang, Harnojoyo - Fitrianti Agustinda periode 2019-2023 yang berstatus tersangka dan divonis penjara oleh kejaksaan dalam kasus yang berbeda.

Mantan Walikota Harnojoyo terlibat dugaan korupsi pembangunan Pasar Cinde bersama Alex Noerdin oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel.

Keterlibatan Harnojoyo selaku Walikota Palembang di pembangunan Pasar Cinde dalam dakwaan jaksa

yakni memfasilitasi percepatan Pengurusan Perijinan.

Menyediakan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) bagi pedagang Pasar Cinde, melaksanakan relokasi pedagang, melakukan penghapusan dan pembongkaran bangunan.

Harnojoyo selaku Walikota Palembang meneruskan kepada PD Pasar Palembang Jaya kemudian ditindak-



lanjuti oleh Direktur Utama PD Pasar Palembang Jaya untuk menghapus dan mem-

bangunan Pasar Cinde.

Dalam kasus ini Kejati Sumsel mengungkapkan kalau Harnojoyo menerima aliran dana sebesar Rp 500 juta.

Atas perbuatannya itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang memvonis terdakwa Harnojoyo, hukuman 4 tahun 6 bulan.

Majelis hakim menilai, Harnojoyo terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan

kesatu primair Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang.

Sementara Mantan Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda alias Finda, divonis 7,5 tahun penjara dalam perkara korupsi dana Palang Merah Indonesia (PMI).

Finda dinyatakan bersalah bersama suaminya, Dedi Sipriyanto, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi PMI, dalam kasus yang sama.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp300 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.

Tak hanya itu, terdakwa Fitrianti Agustinda juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar lebih dari Rp2 miliar. Apabila tidak mampu membayar, maka diganti dengan pidana penjara tambahan selama 2 tahun. ●



# BEKAS PEJABAT BANK BUMD BEBAS DI PERKARA SRITEX

Majelis hakim membebaskan delapan dari sembilan bankir bank BUMD yang menjadi terdakwa perkara penyaluran kredit Sritex. Satu bankir tersandung gratifikasi.

**T**ok! Sejumlah bekas bankir di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lolos dari jerat hukum dalam perkara korupsi kredit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, menjatuhkan vonis bebas antara lain terhadap mantan Direktur Utama Bank Jabar Banten (Bank BJB) Yuddy Renaldi, mantan Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno, mantan Direktur Bank Jateng, Pujiono, serta mantan Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Jateng Suldiarta.

Palu majelis hakim juga menandai vonis bebas terhadap mantan Direktur Bank DKI Babay Parid Wazdi, mantan Direktur Bank DKI Priagung Suprpto, mantan Kepala Divisi Korporasi BJB Dicky Syahbandinata dan Senior Executive Vice President Bisnis BJB Beny Riswandi. Semuanya mendapat vonis bebas dari dakwaan korupsi penyaluran kredit kepada Sritex. Namun, majelis hakim menjatuhkan vonis 6 tahun

penjara kepada mantan Direktur Utama Bank DKI, Zainuddin Mappa karena terbukti menerima gratifikasi dalam perkara yang sama.

Dalam sidang yang digelar Senin malam, 20 April 2026, jaksa Fajar Santoso dan timnya mengemukakan Zainuddin Mappa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi nepotisme. "Perbuatan terdakwa juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, Zainuddin Mappa juga ikut menikmati hasil tindak pidana sebesar 50 ribu dolar Amerika Serikat," tandas jaksa membacakan amaruntutannya.

Dalam sidang tersebut, jaksa menuntut majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 603 huruf c Undang-Undang Nomor 1/2023 tentang KUHP. Majelis hakim yang memeriksa juga diminta menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun terhadap terdakwa.



Zainuddin juga dikenakan denda Rp1 miliar, jika tidak dibayar maka harta dan pendapatannya dapat disita dan dilelang untuk menutup denda. Perihal, harta benda tidak cukup untuk membayar biaya denda, maka diganti pidana penjara selama 190 hari.

“Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti 50 ribu dolar Amerika Serikat, dengan mempertimbangkan barang bukti yang telah disita, dan telah ditampung di rekening penampungan,” ungkap jaksa.

Jaksa menegaskan, terdakwa menerima uang 50.000 dolar AS dari petinggi Sritex, Iwan Setiawan Lukminto melalui Allan Moran Severino. Uang itu diberikan sebagai bagian dari rangkaian korupsi kredit yang disalurkan ke Bank DKI kepada Sritex.

Dua bankir dari Bank DKI lainnya,

tahun, denda Rp1 miliar setara 190 hari kurungan

Untuk klaster Bank BJB, Mantan Direktur Utama, Yuddy Renaldi dituntut 10 tahun, denda Rp1 miliar setara 190 hari kurungan. Sedangkan mantan Senior Executive Vice President Bisnis, Beny Riswandi dituntut delapan tahun, denda Rp1 miliar setara 190 hari kurungan. Sementara mantan Kepala Divisi Korporasi dan Komersial, Dicky Syahbandinata dituntut enam tahun, denda Rp1 miliar setara 190 hari kurungan.

Nah, dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan, Ketua Majelis Hakim Rommel Franciskus Tampubolon ternyata membebaskan delapan dari sembilan terdakwa.



mantan Direktur Teknologi dan Operasional Priagung Suprpto, dan Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan Babay Farid Wazdi juga telah dituntut secara terpisah. Keduanya dituntut selama tujuh tahun penjara serta denda Rp1 miliar setara 190 hari kurungan.

Dari klaster Bank Jateng, mantan Direktur Utama, Supriyatno dituntut 10 tahun, denda Rp1 miliar setara 190 kurungan. Sedangkan mantan Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial, Pujiono dituntut delapan tahun, denda Rp1 miliar setara 190 hari kurungan, Sementara mantan Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial, Suldiarta dituntut 7

“Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah menurut dakwaan penuntut umum untuk seluruhnya,” kata Hakim Ketua Rommel Franciskus Tampubolon dalam sidang dengan terdakwa Yuddy Renaldi di Semarang, Kamis, 7 Mei 2026.

Menurut hakim, tidak pernah ada perintah, penekanan, maupun intervensi dari terdakwa untuk memroses permohonan kredit PT Sritex. Majelis hakim menyatakan terdakwa justru meminta permohonan kredit tersebut diproses sesuai ketentuan. “Tidak ada bukti jika terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau jabatan dalam memutus permohonan kredit,”

kata Rommel Franciskus Tampubolon

Selain itu, kata dia, tidak ditemukan kesalahan subjektif atau niat jahat, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. “Terdakwa tidak mempunyai kehendak untuk melawan hukum. Akibat hukum yang terjadi dalam perkara tersebut bukan konsekuensi perbuatan terdakwa, tetapi dari pihak lain di luar pengetahuan, kekuasaan, kehendak terdakwa,” katanya.

Ia mengatakan terdakwa juga tidak pernah mengetahui rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Sritex. Dalam putusannya, hakim memerintahkan terdakwa untuk dibebaskan seketika setelah putusan dibacakan.

Hakim juga memerintahkan kemampuan, kedudukan, serta hak dan martabatnya dipulihkan oleh karena tidak terbukti bersalah dalam seluruh dakwaan jaksa.

Terhadap putusan tersebut, hakim mempersilakan penuntut umum untuk melakukan upaya hukum lanjutan.

Dari pihak penuntut umum, Kejaksaan Agung mengemukakan akan mempelajari putusan Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Semarang. “Kami menghormati dan menghargai putusan majelis hakim dan tentunya jaksa penuntut umum akan mempelajari dahulu secara lengkap isi putusan tersebut,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Supriatna kepada media, Jumat, 8 Mei 2026.

Toh Anang belum memberikan tanggapan lebih jauh terkait putusan tersebut. Ia mengatakan jaksa penuntut umum (JPU) masih mempelajari isi lengkap putusan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. “Tentunya JPU akan mempelajari dulu secara lengkap isi putusan tersebut. Nantinya itu akan menjadi pertimbangan bagi kami untuk mengambil sikap,” ujar Anang.

Sambil menanti kelanjutan perkara untuk klaster Bank BUMD, sekadar mengingatkan, hampir 30 bank menyalurkan kredit kepada Sritex. Macet juga. ●



# ROY RIADY, JAKSA 'AGAK LAIN' YANG BANYAK DIHINDARI PARA KORUPTOR

Nama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady membuat heboh saat menuntut Nadiem Makarim dengan 18 tahun penjara. Tuntutan ini dinilai tidak lazim untuk mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tersebut karena dianggap tidak terlibat dalam korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019–2022 tersebut.



“  
*Seorang jaksa yang berani, tegas, dan konsisten menegakkan hukum tanpa memandang siapa.*”

Aksi 'Agak Lain' dari Jaksa Roy Riady ini sebetulnya bukan hal baru. Di Sumatera Selatan namanya cukup tenar dan tidak asing lagi karena pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Prabumulih, Kajari Musi Banyuasin dan kini ditarik ke Jakarta.

Keputusan menuntut Nadiem Makarim hingga 18 tahun dinilai cukup berani. Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, JPU dalam tuntutanannya meminta Majelis Hakim menyatakan terdak-

wa Nadiem Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Perbuatan tersebut, dinilai melanggar ketentuan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam dakwaan primer.

Dalam tuntutan itu, JPU meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun kepada Nadiem, dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani diperhitungkan sebagai pengurang hukuman.

Jaksa juga meminta agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selain hukuman penjara, JPU menuntut pidana denda sebesar Rp1 miliar yang wajib dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Jika denda tidak dibayar, jaksa meminta harta atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Apabila hasil penyitaan tidak mencukupi, hukuman denda itu diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Tak hanya itu, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran

## FAKTA PENTING



### TUNTUTAN 18 TAHUN PENJARA

Roy Riady menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara.



### DINILAI TIDAK LAZIM

Tuntutan ini dianggap tidak lazim untuk mantan menteri yang dinilai tidak terlibat korupsi.



### BERPENGALAMAN DI PIDANA KHUSUS

Berpengalaman menangani berbagai perkara besar di direktorat tindak pidana khusus.



### INTEGRITAS & KONSISTENSI

Dikenal tegas, tidak mencukupi, dan berkomitmen menegakkan hukum secara adil.

## REKAM JEJAK & DEDIKASI



Dikenal berintegritas tinggi dan tidak memandang bulu dalam menegakkan hukum.



Berpengalaman dalam menangani berbagai perkara korupsi besar di Indonesia.



Menjadi sosok jaksa yang disegani dan banyak dihindari para koruptor.

uang pengganti senilai Rp 809,5 miliar dan Rp4,87 triliun.

JPU Roy Riady menjelaskan surat tuntutan itu disusun berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari berbagai alat bukti sah.

Termasuk keterangan puluhan saksi, pendapat ahli, dokumen persidangan, hingga hasil audit BPKP.

"Fakta persidangan juga mengungkap adanya dugaan konflik kepentingan, di mana terdapat hubungan investasi dan utang usaha antara pihak penyedia teknologi dengan perusahaan yang dimiliki oleh Terdakwa, sehingga menciptakan simbiosis yang tidak sehat dalam pengadaan barang

Betung-Tempino tahun 2024.

Saat menjabat sebagai Koordinator Pidsus di Kejati Sumsel, Roy Riady juga menangani sejumlah perkara korupsi besar. Salah satunya kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya yang turut menyeret mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, ke meja hijau.

Ketika bertugas sebagai Koordinator Pidsus di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT), Roy Riady juga memimpin pengusutan dugaan korupsi dan tindak pidana

rektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Jakarta.

### Warung Kopi Mang Oy

Sebelum menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Roy Riady lebih dulu menjabat sebagai Kajari Prabumulih.

Saat menjabat Kajari Prabumulih, Roy Riady banyak menuntaskan kasus hukum di Kota Nanas ini. Salah satunya, kasus korupsi melibatkan Mantan Komisioner KPU Prabumulih. Kasus korupsi Dinkes Prabumulih masalah pelayanan kesehatan pada 2019 menjerat NM selaku pegawai Dinkes Prabumulih dan Mantan Kadinkes Prabumulih, dr HTT.

Meski dikenal tegas terhadap hukum, Mang Oy, sapaan akrabnya dikenal sosok pria sederhana.

Saat di Prabumulih, Roy rajin menanam Oyong memanfaatkan lahan kosong di Rumah Dinasnya di Jalan Sudirman Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat.

"Saya tinggal di Jalan Lintas Barat Komplek Puri Impian 2 di Sukabangun 2 Palembang. Di rumah saya, ada Warung Kopi alias Warkop Mang Oy menyediakan dan menjual sarapan pagi bagi masyarakat sekitar rumah saya," jelas ayah dua anak ini.

Meski hasilnya tidak seberapa, tetapi suami Nofita Dwi Wahyuni SH MH ini sangat senang punya usaha Warkop menyediakan dan menjual sarapan pagi tersebut.

"Iya, kita menjual aneka sarapan pagi. Makanan tradisional asli Palembang, meliputi nasi gemuk. Lalu, burgo, laksan, celimpungan dan lontong," cerita pria berdarah Baturaja, Kabupaten OKU ini.

Harga menu di Warkopnya relatif murah dan terjangkau bagi masyarakat sekitar rumahnya, berlangganan menjadi pembeli setia setiap pagi. "Harga sarapan pagi kita jual mulai Rp 10-12 ribuan saja perpersinya," sebutnya saat itu. ●



negara," ujar JPU Roy Riady.

Dalam persidangan, jaksa juga menyoroti dugaan praktik birokrasi menyimpang melalui dugaan pembentukan 'shadow organization' atau pemerintahan bayangan yang melibatkan pihak eksternal seperti Ibrahim Arief, Jurist Tan, dan Fiona Handayani.

### Penjarakan Orang Terkaya di Sumsel

Sebelum bertugas di Jakarta, Roy Riady diketahui pernah mengemban amanah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Musi Banyuasin (Muba) dan pernah menetapkan orang terkaya di Sumatera Selatan (Sumsel) Haji Halim sebagai tersangka kasus korupsi.

Haji Halim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi memalsukan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam pengadaan tanah jalan tol

pencucian uang terkait penjualan aset tanah di Labuan Bajo dengan nilai mencapai Rp1,3 triliun.

Atas kiprahnya tersebut, Roy Riady berhasil masuk tiga besar Adhyaksa Awards 2024 untuk kategori Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi.

Roy Riady juga termasuk dalam daftar 25 kandidat penerima Adhyaksa Awards 2024.

Para kandidat dipilih melalui proses seleksi ketat dari ribuan nama yang diusulkan masyarakat maupun internal kejaksaan, sebelum akhirnya ditentukan oleh Dewan Pakar dalam rapat seleksi di Jakarta Selatan pada Mei 2024.

Roy Riady diketahui memiliki harta kekayaan mencapai Rp 2,3 miliar, dikutip dari laman e-LHKPN

Usai menjabat sebagai Kajari Muba, Roy diamanahi sebagai Kepala Subdi-

# JAKSA INCAR MANTAN KEPALA DAERAH

Sejumlah Eks Gubernur hingga Bupati Terseret Kasus Korupsi



Gelombang penindakan kasus korupsi kembali menyeret sejumlah mantan kepala daerah di Indonesia. Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami berbagai dugaan penyimpangan anggaran, gratifikasi proyek, hingga jual beli jabatan yang melibatkan eks gubernur, bupati, dan wali kota.

Berikut sejumlah nama mantan kepala daerah beserta kasus yang menjerat mereka:

## 1. SUGIRI SANCOKO

**Kasus: Dugaan gratifikasi proyek RSUD dan jual beli jabatan.**

Mantan Bupati Ponorogo tersebut ditangkap KPK pada November 2025. Ia diduga menerima suap proyek pembangunan rumah sakit daerah serta promosi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo. Penyidik juga menduga dana korupsi digunakan untuk menutup utang politik Pilkada.

## 2. ROHIDIN MERSYAH

**Kasus: Dugaan pemerasan dan penggalangan dana ilegal.**

Rohidin disebut meminta uang dari ASN dan pengusaha untuk kepentingan politik dan dukungan pencalonan gubernur. Kasus ini menjadi salah satu sorotan besar dalam daftar kepala daerah terjerat korupsi 2024–2026.

## 3. RISNANDAR MAHIWA

**Kasus: Pemotongan APBD dan pungutan liar.**

Eks Pj Wali Kota Pekanbaru itu diduga melakukan pemotongan anggaran serta pungutan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

## 4. ABDUL WAHID

**Kasus: Dugaan pemerasan proyek infrastruktur.**

Dalam penyelidikan KPK, Abdul Wahid diduga meminta fee proyek dan imbalan dari sejumlah pejabat dinas pekerjaan umum terkait proyek jalan dan jembatan di Riau.

## 5. ARDITO WIJAYA

**Kasus: Gratifikasi proyek pengadaan barang dan jasa.**

Ardito diduga meminta komisi hingga 20 persen dari sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Total fee yang diduga diterima mencapai miliaran rupiah.

## 6. ANNAS MAAMUN

**Kasus: Suap alih fungsi lahan dan suap DPRD.**

Annas Maamun menjadi salah satu mantan gubernur yang berulang kali tersandung kasus korupsi. Setelah divonis dalam kasus suap alih fungsi lahan, ia kembali terseret perkara suap anggota DPRD Riau.

## 7. ALEX NOERDIN

**Kasus: Korupsi pembangunan masjid dan PDPDE Sumsel.**

Alex Noerdin divonis dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan pembangunan Masjid Sriwijaya dan penyalahgunaan dana BUMD PDPDE Sumsel.

## 8. SAMSUL ASHAR

**Kasus: Korupsi pembangunan Jembatan Brawijaya.**

Mantan Wali Kota Kediri itu ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi proyek jembatan yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp14 miliar.

Penindakan terhadap mantan kepala daerah menunjukkan aparat penegak hukum terus memperluas penyidikan terhadap praktik korupsi di tingkat daerah. Kejaksaan dan KPK menegaskan komitmennya untuk memburu pihak-pihak yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk mantan pejabat yang sebelumnya memiliki kekuasaan besar di daerahnya. ●

# info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



**INFO PASANG IKLAN**  
**NUR AISAH**  
**0815-1157-6312**

IKLAN BACK COVER

**RP 75.000.000**

IKLAN DISPLAY/HAL

**RP 50.000.000**

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

**RP 65.000.000**

CENTER SPREAD

**RP 80.000.000**

*Kami Hadir  
 Memberikan  
 info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**



iNOVASI UNTUK NEGERI  
**Info Indonesia**

EDISI # 67 MEI 2026

# JAKSA INCAR MANTAN KEPALA DAERAH

Kejaksaan Agung makin gencar menelisik dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan kepala daerah. Modus lama, kerugian negara, dan gantinya siapa?

**HUKUM**  
VONIS RINGAN,  
KEADILAN  
DIPERTANYAKAN

**NASIONAL**  
JUDI ONLINE,  
DARURAT YANG  
BELUM USAI

KEJAKSAAN AGUNG

**DIPERIKSA**

DUGAAN  
KORUPSI  
KERUGIAN NEGARA

**CELAH  
KORUPSI  
DI MBG**